



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG ADIL DALAM POLIGMI DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DUNIA ISLAM

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor Pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Al-Ahwal Al-Syakhsyah



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SOBRI
NIM. 31695104850

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1441 H/2019 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

Sobri

31695104850

Dr. (Doktor)

Pemikiran Ibn Hazm Tentang Adil dalam Poligami dan Singkronisasinya dengan Hukum Keluarga Dunia Islam.

Prof. Dr. Afrizal, M. MA

Penguji I / Ketua

Dr. Abu Anwar, M. Ag

Penguji II / Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M. Ag

Penguji III

Prof. Dr. Yaswirman, MA

Penguji IV

Dr. Azni, M. Ag

Penguji V

Prof. Dr. H. Sudirman. M. Johan, MA

Penguji VI / Promotor

Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd

Penguji VII / Co-Promotor

Tanggal Pengesahan 03 Desember 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul: **“Pemikiran Ibn Hazm Tentang Adil Dalam Poligami dan Sinkronisasinya Dengan Hukum Keluarga Dunia Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : SOBRI
NIM : 31695104850
Program studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 November 2019
Co. Promotor

Promotor

Prof. Dr. H. Sudirman M, Johan MA
MEd
NIP: 195305181980031002

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag,
NIP.19711001 199503 1 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP: 197206282005012004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **PROF. DR. H. SUDIRMAN M. JOHAN, MA**
 DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Perihal : Disertasi Saudara
SOBRI

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: SOBRI
NIM	: 31695104850
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Adil Dalam Poligami dan Singkronisasinya Dengan Hukum Keluarga Dunia Islam"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 07 November 2019
 Promotor,

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA
 NIP : 195305181980031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©
PROF. DR. H. AKBARIZAN, M.AG., M.PD
Dosen PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara:
SOBRI

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap Disertasi saudara :

Nama	: SOBRI
NIM	: 31695104850
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: “Pemikiran Ibn Hazm Tentang Adil Dalam Poligami dan Singkronisasinya Dengan Hukum Keluarga Dunia Islam”

Maka dengan ini dapat disetujui untuk Diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 07 November 2019
 Co-Promotor


Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
 NIP.19711001 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SOBRI
NIM : 31695104850
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Adil Dalam Poligami dan Singkronisasinya Dengan Hukum Keluarga Dunia Islam"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"Pemikiran Ibn Hazm Tentang Adil Dalam Poligami dan Singkronisasinya Dengan Hukum Keluarga Dunia Islam"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 07 November 2019

Saya yang menyatakan,



SOBRI
NIM. 31695104850

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Ucapan Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayahdan kasih sayang-Nya yang tidak terhingga,dengan itu semua penulis dapat menyelesaikan disertasi ini..Shalawat beserta salam buat baginda Rasulullah SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari alam yang penuh dengan kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Disertasi ini berjudul dengan judul “ **Pemikiran Ibn Hazm tentang Adil dalam Poligami dan Singkronisasinya dengan Hukum Keluarga Dunia Islam**”. Penulisan Disertasi ini merupakan salah satu persyaratan dalam mencapai gelar gelar Doktor (S3) StarataTiga pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang turut membantu merampungkan disertasi ini, baik dalam bentuk sumbangan pemikiran, berupagagasan, saran, dan bimbingan serta motivasi, maupun dalam bentuk materil yang sangat berarti bagi penulis selama dalam proses perkuliahan dan penelitian. Semua bantuan tersebut, hanya Allah SWT yang paling sempurna untuk membalasnya dan semoga amal kebaikan tersebutmenjadi asbab ke surga.

Seiring dengan itu, penulis memberikan penghargaan sertamenyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dan berjasa dalam penyelesaian penelitian dan penulisan disertasi ini

1. **Ayahanda Suradi (Alm) serta Ibunda Dahiyah** yang tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mengasuh serta mendidik penulis sampai saat ini dengan penuh ketabahan dan kesabaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi S3 Program Doktor melalui Program Beasiswa 5000 Doktor dalam negeri.
 3. Bapak, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
 4. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M.MA., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
 5. Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
 6. Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag, selaku Ketua Program Studi S3 Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
 7. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA dan Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd., sebagai Promotor dan co. Promotor, yang telah membimbing penulis dengan penuh kebijaksanaan, kearifan dan kesabaran dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.
 8. Bapak Dr. Azni, M.Ag, sebagai penguji internal dalam seminar hasil, yang telah memberikan koreksi, evaluasi dan saran terhadap disertasi ini.
 9. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA., sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama dalam proses pembelajaran dan penulisan disertasi ini.
 10. Segenap Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan dan penulisan disertasi ini.
 11. Bapak dan Ibu segenap Pegawai administrasi, akademik, dan perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, yang telah memberikan bantuan yang tidak terhingga.
 12. Teristimewa buat Istri tercinta **Weti Susanti, MA**, yang selalu memberikan motivasi dalam suka dan duka, dan Putra/Putri kami tersayang; **Muhammad Habiburrahman, Muhammad Hasbiyallah, Muhammad Husein** dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatimah al-Zahra, sebagai sumber energi dan inspirasi dalam penyelesaian studi serta penulisan disertasi ini. Tidak terlupakan teman-teman seperjuangan pada Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau angkatan 2016 Program Beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah saling berbagi dan memberi motivasi dalam proses studi.

Sebagai manusia biasa yang lemah, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk kesempurnaannya penulis sangat berharap kontribusi yang konstruktif dari kita bersama, dengan demikian karya ilmiah ini layak untuk menjadi salah satu bahan rujukan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kiranya, hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, sembari berharap semoga segala dosa dan kekhilafan kita Allah ampuni, dan segala amal ibadah kita Allah terima dan dibalasi dengan sorga-Nya. Aamiin.

Pekanbaru, Desember 2019

Hormat Penulis

SOBRI

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP	
NOTA DINAS PROMOTOR	
NOTA DINAS CO-PROMOTOR	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR PEDOMAN <i>TRANSLITERASI</i> ARAB-INDONESIA	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Signifikasi Penelitian	13
D. Metode Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	17
BAB II	
IBN HAZM: RIWAYAT HIDUP DAN KARYANYA	19
A. Biografi Ibn Hazm	19
1. Kelahiran dan Nama	19
2. Kondisi Sosial Politik di Masa Ibn Hazm	23
3. Kondisi Budaya dan Ilmiah	26
4. Kondisi Sosial Keagamaan	28
5. Pendidikan, Guru dan Murid-Muridnya	32
6. Karya-karya Ibn Hazm	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

B. Mazhab Zahiri sebelum Ibn Hazm.....	47
C. Kecenderungan Ibn Hazm Kepada Mazhab Zahiri	55
D. Peranan Ibn Hazm Dalam Mazhab Zahiri.....	65
E. Pujian Ulama terhadap Ibn Hazm	71

TINJAUAN TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI 77

A. Pengertian, Sejarah dan Sebab Terjadi Poligami	77
1. Pengertian Poligami	77
2. Sejarah Poligami	78
3. Sebab Terjadi Poligami.....	84
4. Dasar Hukum Poligami.....	86
5. Hukum Poligami	101
6. Batasan Poligami.....	105
7. Syarat Poligami	119
B. Poligami Dalam Hukum Perkawinan Indonesia	125
C. Berlaku Adil Dalam Poligami.....	151
1. Pengertian Adil.....	151
2. Teori Keadilan Perspektif Barat	152
3. Teori Keadilan Perspektif Islam	155
4. Keadilan Merupakan Perintah Allah	159

BAB IV

PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI DAN SINGKRONISASINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DUNIA ISLAM168

A. Pemikiran Hukum Ibn Hazm Tentang Adil Dalam Poligami.....	168
1. Adil dalam Nafkah	168
2. Adil dalam Pembagian Giliran.....	215
3. Adil atas Tempat Tinggal.....	228
4. Adil atas biaya hidup dan Pakaian	230
5. Posisi Pemikiran Ibn Hazm di antara Pendapat Ulama...	239



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Singkronisasi Pemikiran Ibn Hazm Tentang Adil Dalam Poligami dengan Hukum Keluarga Dunia Islam	253
1. Aturan Poligami dalam Hukum Keluarga Dunia Islam	253
2. Analisis Singkronisasi Pemikiran Ibn Hazm dengan Hukum Keluarga Dunia Islam	273
PENUTUP.....	280
A. Kesimpulan	280
B. Rekomendasi.....	281

DAFTAR KEPUSTAKAAN
BIO DATA PENULIS
TOEFL
TOAFL

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Buku Karya Ibn Hazm	39
Tabel 2: Siapakah Ibn Hazm	75
Tabel 3: Perbedaan poligami pra Islam dan poligami Nabi Muhammad saw	83
Tabel 4: Poligami dalam berbagai perspektif.....	149
Tabel 5: Makna adil dalam poligami	165
Tabel 6: Aplikasi adil dalam poligami menurut Ibn Hazm.....	237
Tabel 7: Poligami menurut ulama dan tokoh	251
Tabel 8: Pengelompokkan Negara Muslim.....	273
Tabel 9: Pemikiran Ibn Hazm	278



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Alif		Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
Ba		B	Be
Ta		T	Te
Sa		S	Es (dengan titik di atas)
Ja		J	Je
Ha		H	Ha (dengan titik di bawah)
Kha		Kh	Ka dan Ha
Dal		D	De
Zal		Z	Zet (dengan titik di atas)
Ra		R	Er
Za		Z	Zet
Sa		S	Es
Sya		SY	Es dan Ye
Sa		S	Es (dengan titik di bawah)
Dat		D	De (dengan titik di bawah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
Ga	G	Ge
Fa	F	Ef
Qa	Q	Qi
Ka	K	Ka
La	L	El
Ma	M	Em
Na	N	En
Wa	W	We
Ha	H	Ha
Hamzah	’	Apostrof
Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah () terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	A	A	
Kasrah	I	I	
Dammah	U	U	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

: mata

: rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4

Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

: *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

: *al-madinah al-fadilah*

: *al-hikmah*

: *rabbana*

رَبَّنَا

: *najjaina*

: *al-haqq*

: *al-hajj*

: *nu''ima*

: *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

: 'Ali(bukan 'Aliyyatau 'Aly)

: 'Arabi(bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Hamzah

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-biladu*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

: *ta'muruna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fizilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat Fi 'Umum al-Lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sabri (NIM 31695104850) : "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Adil dalam Poligami dan Singkronisasinya dengan Hukum Keluarga Dunia Islam"

Perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam adalah perkawinan poligami. Pro-kontra seputar poligami terus berkembang di kalangan ulama dan dalam hukum keluarga dunia Islam. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagian lain menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi yang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dari hasil tela'ahan penulis, Ibn Hazm berpendapat bahwa syarat wajib poligami adalah berlaku adil di antara para Istri. Jika tidak mampu untuk berbuat adil, maka dilarang melakukan poligami. Sementara itu, aturan poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam satu sama lain tidaklah sama, meskipun menganut mazhab yang sama. Berdasarkan persoalan di atas, disertasi ini membahas tentang bagaimana konstruksi pemikiran Ibn Hazm tentang syarat adil dalam poligami dalam kitab *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla* dan apa singkronisasinya dengan hukum keluarga dunia Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan analisis datanya dilakukan dengan metode (content analysis) dan analisis komparasi. Metode tersebut akan penulis gunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisa pemikiran Ibn Hazm yang meliputi syarat adil dalam poligami dan bagaimana singkronisasinya dengan hukum keluarga dunia Islam. Tahapan yang dilalui dalam penelitian ini adalah menela'ah sumber primer yaitu kitab *al-Muhalla* khususnya bab nikah dan yang terkait dengannya dan diiringi dengan mengkaji sumber sekunder yang tidak lepas dari rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa; 1) adil dalam poligami menurut Ibn Hazm adalah secara mutlak, yaitu adil lahir dan batin, materi dan immateri. 2) dalam hukum keluarga dunia Islam didapati bahwa negara Turki dan Tunisia, poligami dilarang keras, sementara Syria, Somalia, Mesir, dan Indonesia membolehkan poligami dengan persyaratan yang berupaya untuk memperkecil terjadinya poligami. 3) Konstruksi pemikiran Ibn Hazm dalam masalah ini adalah dengan menghubungkan secara timbal-balik antara dimensi normativitas ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah dengan dimensi historisitas pemahaman ayat-ayat tersebut pada level kehidupan sosio-historis masyarakat Muslim setempat. 4) Tujuan Ibn Hazm dengan memberikan syarat yang berat dalam berpoligami bagi suami adalah agar perempuan dijadikan Subjek dalam perkawinan dan bukan sebagai objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صبر (NIM 31695104850): "تفكير بن حزم البناء حول تعدد الزوجات وصلته بقانون الأسرة في العالم الإسلامي"

تعدد الزوجات إثارة للجدل بين الفقهاء الإسلاميين هو الزواج متعدد الزوجات. تستمر إيجابيات وسلبيات تعدد الزوجات في التطور بين العلماء وفي قانون الأسرة في العالم الإسلامي. يدافع بعض العلماء عن تعدد الزوجات باعتباره شكلاً من أشكال تنفيذ أوامر الله ، بينما يرفض البعض الآخر تعدد الزوجات بمجموعة متنوعة من الحجج المرتبطة دائماً بالظلم بين الجنسين. من نتائج دراسة المؤلف ، يقول ابن حزم أن الشرط الإلزامي لتعدد الزوجات عادل بين الزوجات. إذا كنت غير قادر على تحقيق العدالة ، فخطئ القيام بتعدد الزوجات.

وفي الوقت نفسه ، فإن قواعد تعدد الزوجات في قانون الأسرة في العالم الإسلامي ليست هي نفسها لبعضها البعض ، على الرغم من أنها تتبع المدرسة نفسها. استناداً إلى المشكلات المذكورة أعلاه ، تناقش هذه الرسالة كيف أن بناء ابن حزم يفكر في الظروف العادلة في تعدد الزوجات في كتاب "المهلا في سيرة المحلة" وما مدى صلته بقانون الأسرة في العالم الإسلامي.

في هذه الدراسة ، استخدم المؤلفون دراسة وصفية نوعية ، وتم إجراء تحليل البيانات باستخدام الطريقة (تحليل المحتوى) والتحليل المقارن. سيتم استخدام الطريقة من قبل المؤلف لوصف وتحليل أفكار ابن حزم الذي يتضمن الشروط العادلة في تعدد الزوجات ومدى ملاءمتها لقانون الأسرة في العالم الإسلامي. كانت المراحل التي مرت في هذه الدراسة هي فحص المصادر الأولية ، وتحديدًا كتاب المهلا وخاصة فصول الزواج وتلك المتعلقة به. ويرافقه استعراض المصادر الثانوية التي لا يمكن فصلها عن صياغة المشكلة التي هي محور البحث.

من البحوث التي أجريت ، يمكن أن نستنتج أن ؛ 1) الإنصاف في تعدد الزوجات وفقاً لبن حزم هو المطلق ، أي العدالة الجسدية والعقلية ، المادية وغير المادية. من البحوث التي أجريت ، يمكن أن نستنتج أن ؛ 1) الإنصاف في تعدد الزوجات وفقاً لابن حزم هو المطلق ، أي العدالة الجسدية والعقلية ، المادية وغير المادية. 3). إن بناء فكر ابن حزم حول هذه القضية هو الربط بين الأبعاد المعيارية لآيات القرآن والسنة مع البعد التاريخي لفهم هذه الآيات على المستوى الاجتماعي التاريخي للمجتمع الإسلامي المحلي. 4). كان الغرض من ابن حزم من خلال إعطاء ظروف صعبة في تعدد الزوجات للأزواج هو أن تصبح النساء رعايا في الزواج وليس ككائنات.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau. Tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Sabri (NIM 31695104850): "Ibn Hazm's Thinking About Polygamy and Its Synchronization to Muslim World Family Law"

The most debated marriage among Islamic jurists is the polygamy marriage. The pros and cons around polygamy continue to develop among scholars and in the family law of the Islamic world. Some scholars advocate polygamy as a form of implementation of God's commands and some others reject polygamy with a variety of arguments that are always associated with gender injustice. From the results of the author's study, Ibn Hazm argues that the mandatory requirement of polygamy is fair among the Wives. If you are unable to do justice, it is forbidden to do polygamy. Meanwhile, the rules of polygamy in family law in the Islamic world are not the same to each other, even though they follow the same school. Based on the above problems, this dissertation discusses how the construction of Ibn Hazm's thought about the fair conditions in polygamy in the book of *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla* and what is its relevance to the family law of the Islamic world

In this study the authors used a qualitative descriptive study, and data analysis was carried out using the method (content analysis) and comparative analysis. The method will be used by the author to describe and analyze the thoughts of Ibn Hazm which includes the fair conditions in polygamy and how relevant they are to the Islamic world family law. The stages that were passed in this study were to examine primary sources, namely the book of *al-Muhalla* especially the marriage chapter and those related to it. and accompanied by reviewing secondary sources that cannot be separated from the formulation of the problem that is the focus of research.

From the research conducted, it can be concluded that; 1) fairness in polygamy according to Ibn Hazm is absolutely, that is, physical and mental fairness, material and immaterial. 2) in the Islamic world family law it is found that the countries of Turkey and Tunisia, polygamy is strictly prohibited, while Somalia, Somalia, Egypt, and Indonesia allow polygamy with conditions that seek to minimize the occurrence of polygamy. 3). The construction of Ibn Hazm's thought on this issue is to link reciprocally between the normative dimensions of the verses of the Qur'an and the Sunnah with the historical dimension of understanding these verses at the socio-historical level of the local Muslim community. 4). The purpose of Ibn Hazm by giving heavy conditions in polygamy for husbands is for women to become subjects in marriage and not as objects

Latar Belakang Masalah

Islam membolehkan pernikahan¹ secara poligami,² dan poligami merupakan salah satu persoalan dalam fikih *munakahat*³ yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan dan perdebatan hangat dikalangan ulama, akibatnya dalam praktek poligami selalu diliputi pro dan kontra karena alasan keadilan dan kesetaraan jender yang telah menjadi keharusan zaman.⁴ Di sisi lain, masalah poligami juga masih terdapat banyak perbedaan dalam perundang-undangan dan hukum keluarga di negara muslim modern. Sebab persoalan ini menyangkut keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang sulit untuk diwujudkan karena wacana publik yang di antaranya

¹ Istilah tersebut diserap dari kata Arab *al-Nika>h* yang berakar dari kata *Nakah>a*, *Yankih>u*, *Nika>h>an* yang berarti “mengawini” dan bisa juga berarti “bersetubuh atau bersenggama”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461. Hanya saja, dewasa ini kerap kali dibedakan antara *kawin* dan *nika>h*, akan tetapi pada prinsipnya antara *perkawinan* dan *pernikahan* hanya berbeda pada bagaimana menarik akal kita saja. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

² Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika pengertian tersebut digabung maka poligami mempunyai arti: Suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang. Sistem perkawinan yang banyak atau seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu orang. Lihat: Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), hlm. 2736. Lihat juga: Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 259. Baca: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 693. Dan baca juga: W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 763. Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 606. Lihat: Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. (Jakarta : LKAJ-SP, 1999), hlm. 2. Lihat: Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 133. Lihat: Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, (Yogyakarta: Aca Nemia, t.t), hlm. 84

³ Bila kata “*fikih*” dihubungkan dengan kata “*munakahat*”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliyah furu’iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 5

⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki*. Pengantar dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. v.



dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang tidak berperspektif jender.⁵

Pada dasarnya, ketentuan umum perkawinan dan juga poligami telah diatur dalam Alquran (Arab: *al-Qur'a>n*) dan Sunnah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan manusia melaksanakan pernikahan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan fitrah manusia untuk hidup berpasangan dengan lawan jenisnya. Secara umum ketentuan tersebut sangat komprehensif baik mengenai hal yang diperintahkan maupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena penjelasan dalam Alquran dan Sunnah tentang perkawinan masih bersifat umum, menimbulkan berbagai persoalan yang masih menjadi perdebatan dalam tema pokok perkawinan diantaranya tentang pembolehan terhadap poligami, yang mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan istri.⁶

Pada sisi lain bagi kaum perempuan, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak, martabat dan statusnya, poligami dipandang sebagai suatu upaya eksploitasi kaum Hawa demi kebutuhan biologis kaum Adam. Bagi kaum Adam pada umumnya, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah

⁵ Jender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang diinstruksi secara sosial maupun kultural. Alquran mengakui perbedaan-perbedaan anatomis antara laki-laki dan perempuan dan mengakui bahwa anggota setiap jender menjalankan fungsi yang mencerminkan berbagai perbedaan berdasarkan rumusan budaya yang baik tempat mereka berada. Amrina Wadud, *Alquran Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Kerdilan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 27. Oleh karena budaya berubah-ubah, maka perubahan ciri dari sifat laki-laki dan perempuan dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain. Nazaaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 34-35. Lihat juga, Ariati Jamil dan Amany Lubis, *Seks dan Jender, dalam Pengantar Kajian Jender*. (Jakarta: PSW UIN, 2003), hlm. 55.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalidjaja Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipraktikkan oleh Nabi Muh}ammad saw. Kondisi yang demikian itu senantiasa menjadikan poligami wacana yang menarik untuk terus dikaji dan didiskusikan. Poligami tidak hanya menjadi obyek perbincangan dunia Islam, tetapi juga dunia Barat, Orang-orang Barat sering mengangkat isu poligami sebagai alat untuk mendeskreditkan Islam.⁷

Berdasarkan hal itu, poligami menjadi pembahasan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pro-kontra seputar poligami terus berkembang di kalangan ulama diberbagai negara muslim. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagian lain menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi yang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Dalam Islam, poligami diyakini sebagai salah satu solusi ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lain. Pembolehan poligami dalam kondisi tersebut diharuskan dengan mengutamakan sikap adil di antara para Istri. Bagi suami yang kurang mampu untuk berbuat adil, dilarang melakukan poligami.⁸

Pelarangan bagi laki-laki yang tidak mampu bersikap adil dalam poligami, selaras dengan ajaran Islam sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, yang sangat menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia. Satu dari penghormatan tersebut adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki.⁹ Karena ukuran

⁷ Mereka mengklaim bahwa Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Sebuah pandangan yang keliru, karena yang benar adalah bahwa masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Lihat: Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ, 1999), hlm. 3.

⁸ Syaifullah, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung, Fokus Media, 1993), hlm. 5

⁹ Penghormatan terhadap manusia ini terlihat dari ajarannya yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terekam dalam Q.S. *al-Hujurat*/49:13. Lihat: Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Jender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 60.

keutamaan dan kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada jenis kelamin yang melekat pada dirinya, akan tetapi kualitas diri di hadapan Tuhan.¹⁰ Misi pokok yang diemban Alquran ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya.

Merujuk kepada sejarah poligami sejak awal, sesungguhnya praktik poligami telah ada sebelum Islam datang dan telah dilakukan secara luas dengan tidak ada pembatasan jumlah perempuan yang boleh diperistri. Seorang laki-laki boleh mengawini setiap wanita yang dikehendaknya. Ini dilakukan baik dari kalangan umat Hindu, bangsa Persia, bangsa Arab Jahiliyah, bangsa Romawi maupun bangsa-bangsa yang mendiami berbagai daerah Eropa dan Asia Barat (misalnya bangsa Tracia dan bangsa Lidia). Sebagai salah satu sistem perkawinan pada waktu itu, poligami membawa nasib yang menyedihkan bagi kaum wanita, derajat wanita dianggap lebih rendah dari derajat pria.¹¹

Kedatangan agama Islam mengatur poligami dengan memberikan batasan dan kontrol yang tegas sebagaimana yang telah diatur dalam surat *al-Nisa'* ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (القرآن: النساء: ٣)¹²

¹⁰ Dalam catatan sejarah, perempuan dipandang sebagai makhluk inferior, emosional dan kurang akalnyanya. Kental dominasi budaya patriarkhi seringkali tidak mampu diretas secara tuntas oleh agama-agama yang dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan yang berbasis etnik, ras, agama maupun gender. Karena misi keadilan dan kesetaraan yang diemban oleh perintah Tuhan kemudian tidak dipahami oleh generasi pengikutnya, sehingga nilai-nilai patriarkhis secara perlahan kembali mendominasi dalam produk-produk hukum dan pemahaman kitab suci. Lihat: Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *op. cit.*, hlm. 10.

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hlm. 156-158.

¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Akanleema, 2009), hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Hassanudin



Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu suka: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.* (Q.S. al-Nisa' 4:3)

Makna yang terkandung pada ayat tersebut pada dasarnya menjelaskan tentang seseorang yang merawat anak yatim (menjadi walinya), dan menikahinya kemudian ditakutkan akan adanya ketidakadilan terhadap hak-hak yang dimiliki anak yatim tersebut, seorang wali atau orang yang menikahi anak yatim disuruh untuk menikahi orang lain (berpoligami), dengan harapan harta anak yatim yang sudah dinikahi tersebut tidak diselewengkan. Hal ini sesuai dengan beberapa sebab-sebab turunnya ayat tersebut, ayat tersebut turun dikarenakan ada beberapa sahabat yang menikahi anak yatim akan tetapi dalam hal nafkah dan kontribusi harta milik anak yatim tersebut suami tidak berlaku adil.¹³

Selain alasan di atas, Syaikh al-Zamakhshari dalam karyanya menjelaskan bahwa ayat tersebut turun dikarenakan untuk membatasi jumlah istri. Pembatasan ini bertujuan untuk menanggulangi adanya ketidakadilan terhadap istri, apabila istri seseorang terlalu banyak.¹⁴ Senada dengan itu, Muhammad Rasyid Rida sepakat bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan kebiasaan orang Arab yang berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang dalam asuhannya, mereka menguasai harta anak yatim tersebut sepenuhnya dan tidak mengembalikannya setelah ia baligh, juga kadang kala mereka menikahi anak yatim perempuan tanpa memberikan mahar dan harta milik anak yatim tersebut.

¹³ Muh}ammad 'Ali al-Sabuni, *Rawai'u al-Bayan*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1999), vol. I, hlm. 298

¹⁴ Mamud bin 'Umar bin Muh}ammad al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kashshaf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), Vol. I, hlm. 457

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi konteks historis ayat ini berkenaan dengan perbuatan wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.¹⁵

Begitu juga dengan al-Tabari, ia menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa orang yang takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang ia senangi, agar tidak mengawini mereka walaupun hanya satu orang. jika secara biologis ia berhasrat untuk menyalurkan hawa nafsu seksual, solusinya bersenang-senanglah dengan budak yang dimilikinya, karena yang demikian itu lebih terpelihara dari perbuatan dosa kepada kaum perempuan.¹⁶

Demikianlah ketentuan poligami dalam Islam, guna menjaga hak dan martabat perempuan. Lebih rinci menurut Tahir Mahmood setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam, pertama; menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan di dalam Alquran, kedua; memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan, ketiga; harus memperoleh izin lembaga peradilan, keempat; hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami, kelima; benar-benar melarang poligami, dan keenam; memberikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan poligami.¹⁷

Semua bentuk kontrol atau ketentuan tersebut demi menegakkan keadilan dalam poligami, penekanannya agar suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam

¹⁵ Muh}ammad Rasyid Rid}a, *Tafsir al-Mannar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), vol.4, hlm. 344-355.

¹⁶ al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, (Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, tt.) vol 3, hlm. 577.

¹⁷ Tahir Mahmood, *Family Law in the Muslim World* (New Dehli: The Indian Law Institute, 1982), hlm. 272-275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap istri-istrinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama mengartikan adil dalam Poligami hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal *immateri* (kualitatif), tetapi ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan *immateri* (kuantitatif dan kualitatif).

Seiring dengan persoalan makna adil dalam poligami, ada masalah lain yang juga membutuhkan kepastian jawaban yaitu, siapakah yang berhak untuk menentukan adil atau tidak adilnya suami yang akan berpoligami. Apakah pengakuan dari suami itu sendiri, atau istrinya yang berhak menentukan, dan atau hakim yang akan memutuskan bahwa suami itu sudah cukup syarat untuk adil dalam berpoligami. Menyikapi persoalan demikian, hukum keluarga di negara muslim juga belum memiliki kesepakatan yang sama, walaupun hukum keluarga Islam terus diperbaharui namun tentang siapa yang berhak menetapkan adilnya seorang suami belum tersentuh pembaharuan.

Pembaharuan hukum keluarga mulai tersentuh pada tahun 1915, sebagaimana ditegaskan Akhmad Minhaji, ditujukan untuk menyentuh persoalan metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*).¹⁸ Tahir Mahmood menyatakan, ada tiga belas aspek dalam hukum keluarga di dunia Islam yang mengalami pembaruan, yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 187-188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris, wasiyat wajibah, dan pengelolaan wakaf.¹⁹

Salah satu aspek yang tersentuh pembaharuan dalam hukum keluarga adalah poligami. Aspek ini menarik dan penting untuk dikaji, karena sampai sekarang masalah poligami masih menimbulkan polemik. Meski begitu, baik aturan poligami yang terumus dalam hukum keluarga di dunia Islam, tidaklah sama. Dalam aturan poligami misalnya, ada negara yang melarang secara tegas, ada juga melarang dengan syarat, sementara yang lain mencantumkan dalam taklik talak. Dalam penelitian ini akan dikemukakan aturan tentang poligami di beberapa negara muslim seperti Turki, Syria, Tunisia, Mesir, Somalia, Aljazair, Maroko, Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya (dalam tulisan ini ada 15), serta bagaimana singkronisasinya dengan pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami.

Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menarik untuk dikaji. Karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang makna dan konsep adil dalam poligami, khusus dalam pembahasan ini, penulis titik beratkan menurut pemikiran salah seorang ulama fikih yaitu Ibn Hazm.²⁰ Pemikirannya akan dilihat relevansinya dengan hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim. Menetapkan pilihan tokoh kepada Ibn Hazm, karena ia termasuk ahli fikih yang cukup cemerlang dan banyak memberikan kontribusi keilmuan

¹⁹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Dehli: Tri Parthi, 1987), hlm. 12.

²⁰ Ibn H}azm dilahirkan di sebelah timur Cordova, pada hari Rabu pagi menjelang terbit matahari, akhir bulan Ramadhan 384 H (7 November 994 M). Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ahli sejarah mengenai tempat dan tanggal lahirnya ini. Hal ini disebabkan adanya sumber data yang berasal dari Ibn H}azm sendiri sebagai yang ia sebutkan dalam surat yang dikirimkan kepada teman sejawatnya, Sha'id ibn Ahmad (w. 462 H). Lihat: Muh}ammad Abu Zahrah, *Ibn H}azm, Hayatuhu wa 'Ashruhu, Arauhu wa Fiquhu*, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), hlm. 22. Baca: Muh}ammad Farid Wajdi, *Dairat al-Ma'arif al-Qran al-Rabi'a 'Asyar al-Isyrin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1971), hlm. 430; H A. R. Gibb & J H. Krammer (ed), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (London: Luzac & CO, 1961), Juz III, hlm. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dalam dunia Islam. Khusus dalam masalah poligami ia juga memiliki pemikiran sendiri yang sangat tegas dan dapat dijadikan pedoman bagi umat.

Posisi pemikiran Ibn Hazm tentang poligami jelas berada di antara dua gelombang berfikir ulama. Mayoritas ulama klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas ulama kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami sudah tidak diragukan lagi, sebab ia seorang tokoh yang telah diakui keilmuannya. T.M. Hasbi al-Shiddieqy mengatakan bahwa Ibn Hazm adalah seorang mujtahid mutlak, ia bukan pengikut Dawud al-Zahiri, hanya saja karena kebetulan *manhaj* (metode) yang ditempuhnya ada titik-titik persamaan dengan mazhab Zahiri. Malah Ibn Hazm sedikit lebih maju sebab langsung mengambil dari Nur Muhammad atau pancaran sinar yang dilimpahkan kepada Nabi saw.²¹ Kematangan pemikirannya dan kemandiriannya dalam *berijtihad* melahirkan corak baru yang dikenal dengan mazhab al-Hazmiyah.²²

Ibn Hazm dikenal sebagai ulama zahiri yang mempunyai reputasi di bidang fikih. Penghormatan ini diberikan lewat karya monumental fikihnya semisal *al-Muhalla* dan *Ibtal qiyas*,²³ dan juga dalam bidang Ilmu Perbandingan Agama.²⁴ Ia dikenal karena kedalaman ilmunya, sebab hampir seluruh hidupnya “diwakafkan” dan hanya diabdikan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan bukan untuk mengumpulkan harta serta kedudukan, banyak buku yang

²¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Jilid I.Cet.I, hlm 87

²² Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, XII, (Beirut: Dar Shadir, 1965), hlm. 61.

²³ Ignaz Goldziher, *The Zahiri's Their Doctrine and Their History*, (Leiden: E.J. Brill, 1971), hlm 110-112

²⁴ A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), hlm. 16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditulisnya baik dalam bidang fiqh, usul fiqh, hadis, filsafat, tafsir, logika dan lain-lain.²⁵

Dilihat dari perjalanan hidupnya, ia kerap berpindah-pindah mazhab dari Maliki kemudian Syafi'i dan akhirnya Zahiri.²⁶ Ini menarik, mengapa pada akhirnya Ibn Hazm lebih memilih mazhab zahiri yang corak pemikirannya lebih tekstual. Padahal lazimnya seseorang yang mempunyai landasan horizon keilmuan yang luas, dalam corak pemikirannya selain berpegangan pada makna tekstual juga akan melihat sisi kontekstualnya. Sebab dari makna ini akan lebih mudah memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh nash dan mudah pula diterima di setiap masa. Dari sisi tekstualisnya ini akan dikaji pemikirannya tentang adil dalam poligami dan bagaimana sinkronisasinya dengan hukum keluarga negara muslim.

Di samping itu, Ibn Hazm al-Andalusi al-Zahiri, merupakan tokoh yang telah berjasa mengembangkan mazhab yang dibangun oleh Daud al-Zahiri sehingga jika pada mulanya mazhab ini hanya sekedar reaksi kritis terhadap perkembangan pemikiran rasional yang menjurus kepada *takwil* yang melampaui batas, maka Ibn Hazm membangun metodologi *ijtihad* mazhab ini. Kenyataan tersebut menempatkan Ibn Hazm²⁷ dan karya-karyanya pada posisi sentral untuk dapat memahami dan mengaktualisir pemikiran mazhab Zahiri. Hal ini sebenarnya tidak berlebih-lebihan, sebab ia memang mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting dalam sejarah dan perkembangan

²⁵ Muh}ammad Abu Zahrah, *Ibn H}azm: H}ayatuhu wa 'Ashruhu Arahu wa Fiqhuhu*. (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954), hlm. 145

²⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 83

²⁷ Yaqut al-Hamawi, *Murjam al-'Ubada'*, (Beirut: Dar Ih}ya' al-Turas} al-'Arabi, t.th.), Jilid XI, hlm. 235-240. Lihat pula: Al-Z}ahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1990), Jilid XVIII, hlm. 184-185, Lihat pula: Muh}ammad Abu Zahrah, *Ibn H}azm H}ayatuhu wa 'Ashruhu: 'Arahu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), hlm. 22-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maz|hab ini. Ia dikenal sebagai tokoh yang paling menonjol dalam maz|hab ini setelah Daud al-Asbihani. Bahkan ia lebih radikal dibanding pendahulunya itu dan disebut sebagai pendiri kedua maz|hab ini.²⁸ oleh karena itu, ia juga mendapat julukan al-Zahiri.²⁹

Pola pikir Ibn Hazm yang mempunyai kecenderungan kuat pada pemahaman pengertian yang tersurat, sehingga *istinbat* hukumnya kelihatan tekstualis. Ia menolak sebagian besar penalaran hukum (*ra'y*)³⁰ dalam upaya pengembangan hukum Islam, kecuali apa yang ia sebut *istidlal* dengan dalil.³¹

Di antara penalaran hukum yang ia tolak keras ialah *qiyas*,³² *istihsan*,³³ *maslahah al-mursalah*,³⁴ *saz/ al-zarai'*³⁵

²⁸ Muh}ammad Abu Zahrah , *Muhadharat fi Tarikh al-Maz|ahib, al-Fiqhiyyat*, (Kairo: al-Matba'at al-Madani, t.th.), hlm. 443.

²⁹ Penisbahan tersebut banyak menghiasi sampul halaman karya-karyanya seperti *al-Muh}alla fi al-As}ar, al-Ih}kam fi Us}ul al-Ah}kam, al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, dan lainnya. Agaknya keZ}ahiriannya merupakan sesuatu yang telah masyhur dan diterima oleh ulama dan para pakar. Lihat, Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Udaba'* (Beirut: Dar Ih}ya' al-Turas} al-'Arabi, t.th.), jilid II XII, hlm. 427. Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*, (Beirut: Dar Shadir, t.th.), jilid III, hlm. 325. Al-Z}ahabi, *Taz}kirat al-Huffaz*, (Heiderabad: Matba'at Ma}lis Dairat al-Ma'arif al-'Utsmaniyyat, 1376), jilid III, hlm. 1146. Lihat: Golz}iher, *The Z}ahiris: Their Doctrine and Their History*, (Leiden: EJ Brill , 1971), hlm. 109-110. Lihat: pula Philip K Hitti, *History of the Arabs*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), hlm. 558.

³⁰ Ibn H}azm mendefinisikannya sebagai "suatu yang dikhayalkan kebenarannya oleh seseorang tanpa dalil." *op. cit.*, hlm. 45. Pengertian seperti ini jelas berbeda dengan pengertian *ra'y* yang banyak dipegangi sebagai metode ijtihad. Berkenaan dengan ini Fatih al-Duraini menegaskan, *ra'y* merupakan penalaran dan pemikiran dengan mempergunakan salah satu sarana yang ditunjukkan oleh syara' untuk diikuti dalam *istinbat* hukum ketika tidak ada nas}nya. *Manahij al-'Adillat fi al-Ijtihad fi al-Ra'y fi al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), hlm.13.

³¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai *istidlal* dengan dalil menurut mazhab Z}ahiri akan dikemukakan pada bab IV.

³² *Qiyas* ialah menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada nas}nya berdasarkan hukum sesuatu yang ada nas}nya, karena adanya kesamaan antara keduanya. Ibn H}azm, *op. cit.*, hlm . 44.

³³ *Istih}sa{n* diartikan Ibn H}azm sebagai sesuatu yang disukai dan dicocoki oleh seseorang, benar atau salah. *Ibid*, hlm. 45. Pengertian ini juga tidak sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh para pendukung *istih}sa{n*. yang mengartikannya sebagai pengalihan satu hukum kepada hukum lain karena tuntutan dalil atau penalarannya, atau kemaslahatannya. Lihat: 'Abdul Aziz, *'Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ih}tijaj biha*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1979), hlm. 161

³⁴ *Mashlahat mursalat* ialah: kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh nas} dan tidak pula ditolakny. *Ibid*, hlm. 219.

³⁵ *Saz/ al-Z}arai'* dimaksudkan sebagai menutup jalan yang membawa kepada sesuatu yang haram. Lihat: Mus}t}afa Adib *al-Bugha al-'Adillat al-Mukhtalaf fiha*, (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, t.th.), hlm. 573-574.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan *ta'lil al-ahkam*.³⁶ Hal inilah yang menjadi point menarik untuk diteliti, yakni tentang bagaimana ia menetapkan hukum dan ketentuan poligami dengan menolak beberapa metode *istinbat* hukum yang telah digunakan oleh imam mazhab sebelumnya.

Di sisi lain, realitas perbedaan dalam menerapkan hukum Islam dalam konteks perundang-undangan hukum perkawinan di negara muslim modern tak terbantahkan. Tunisia dan Turki misalnya, telah mempraktikkan hukum Islam bernuansa liberal. Berbeda halnya dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masih memakai aplikasi hukum Islam sebagaimana yang ada dalam kitab fikih anutan mereka. Di antara dua arus itu muncul banyak negara yang mencoba melakukan aplikasi hukum di negara masing-masing dengan mencoba menjembatani antara kebutuhan baru yang mendesak dan kearifan lokal. Hal ini banyak dianut oleh negara muslim modern pada umumnya. Tulisan ini mengkaji pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami dan bagaimana sinkronisasinya dengan keberagaman (heterogeneous) perundang-undangan hukum keluarga negara-negara muslim modern. Atas dasar itulah penulis melakukan penelitian dengan Judul: “**Pemikiran Ibn Hazm tentang Adil dalam Poligami dan Sinkronisasinya dengan Hukum Keluarga Dunia Islam**”.

B Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penelitian dalam disertasi ini adalah:

³⁶ Maksudnya ialah: menetapkan alasan suatu hukum. Berdasarkan alasan tersebut, maka dapat diketahui hukum sesuatu yang lain. Kaidah yang biasa digunakan ialah: (الحكم يدور مع علته وجودا ونفوا) “hukum berlaku berdasarkan alasannya, ada atau tidaknya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami di dalam kitab *al-Muhalla*
2. Bagaimana sinkronisasi pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami dengan hukum keluarga Dunia Islam.

C Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami. Dengan demikian praktek poligami dapat berjalan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam dan orang-orang yang berkeinginan untuk berpoligami dapat mengukur diri apakah dia bisa berlaku adil atau tidak.

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberi sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang berkompeten dalam bidang tugas penyelenggara pernikahan. Setidaknya penelitian ini bisa jadi rujukkan untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang melakukan poligami.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi para intelektual muslim untuk terus menggali dan mengkaji tentang ketentuan poligami seiring perkembangan zaman, sehingga aturan syari'at Islam yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi zaman. Penelitian ini sebagai khazanah ilmu keislaman, tentu dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

D Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau kualifikasi lainnya.



Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menghasilkan perhitungan dalam bentuk apapun, akan tetapi merupakan kata-kata tertulis.³⁷

Karena penelitian ini lebih mengedepankan pencarian data, seorang peneliti harus memilih metode yang sesuai dengan karakteristik obyek studi dan konseptualisasi teoritiknya.³⁸

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.³⁹ Atau penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, Koran, majalah dan dokumen lainnya.⁴⁰

Ada empat ciri utama penelitian kepustakaan, yaitu *pertama*; peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*; data pustaka bersifat siap pakai. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.⁴¹

Karena bersinggungan dengan hukum, penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Rosdakarya, 2006), hlm. 6

³⁸ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000), hlm. 14

³⁹ Mohlm. Nazir, Phlm.D., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm., 112

⁴⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 3



hukum maupun asas-asas hukum pada umumnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum, baik primer maupun sekunder.⁴² Kajian hukum normatif melihat hukum dalam karakternya yang normatif yang berisi kaidah atau penormaanan.

2. Sumber Data

Data merupakan hal penting dalam penelitian dan data sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilaksanakan. Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang tokoh, data-data yang dipergunakan merupakan data pustaka dengan teknik dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, diadakanlah penelaahan terhadap. Adapun data yang dipergunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.⁴³ Sumber data primer yang dimaksud adalah buku karya Ibn Hazm *Al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Asar*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya buku, artikel, yang berkaitan dengan pokok penelitian.

c. Data Tertier

Yang dimaksud data tertier adalah data-data tambahan sebagai

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Pamuji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm., 15

⁴³ C.E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2001), hlm. 71

pelengkap pembahasan guna memperluas dan memperdalam pembahasan seperti data-data ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan pembahasan adil dalam poligami, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul, penulis memakai metode Deskriptif Analitik.⁴⁴ Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.⁴⁵ Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Ibn Hazm. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisis pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴⁴ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai hal-hal itu. Lihat: Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 47-59

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1992, hlm. 51

Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis*⁴⁶ (analisis isi) juga penulis gunakan. *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti.⁴⁷

E Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara sistematis, maka penulisan ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, signifikansi penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas biografi Ibn Hazm yang berisikan tentang riwayat kelahiran dan nama, kondisi sosial politik di masa Ibn Hazm, kondisi budaya dan ilmiah, kondisi sosial keagamaan pendidikan, guru dan murid-muridnya, karya-karya Ibn Hazm, mazhab Zahiri sebelum Ibn Hazm, kecenderungan Ibn Hazm kepada mazhab Zahiri, peranan Ibn Hazm dalam mazhab Zahiri dan pujian ulama terhadap Ibn Hazm.

Bab III merupakan identifikasi tentang adil dalam poligami yang berisikan pengertian, sejarah dan sebab terjadi poligami, dasar hukum poligami, hukum poligami, batasan poligami, syarat poligami, poligami dalam hukum perkawinan Indonesia, berlaku adil dalam poligami, pengertian adil, teori keadilan perspektif barat, teori keadilan perspektif Islam, dan keadilan merupakan perintah Allah.

⁴⁶ *Content analysis* merupakan upaya menganalisis isi suatu teks mencakup upaya klasifikasi, menentukan suatu kriteria, dan membuat prediksi kandungan suatu teks. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi*, (Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000), hlm. 68-69.

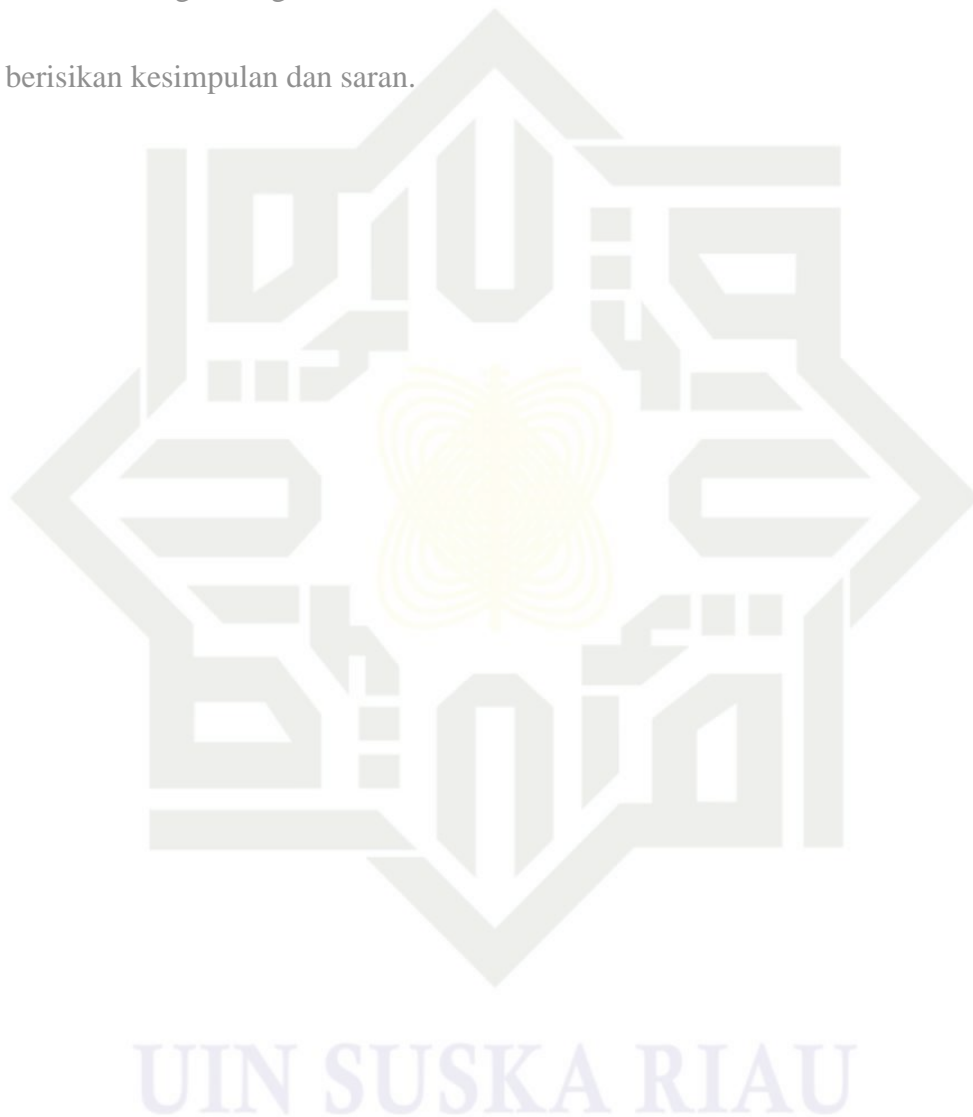
⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.

Bab IV merupakan bab inti berupa hasil temuan penelitian pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami yaitu: pemikiran hukum Ibn Hazm tentang adil dalam poligami, adil dalam nafkah, adil dalam pembagian giliran, adil atas tempat tinggal, adil atas biaya hidup dan pakaian, posisi pemikiran Ibn Hazm di antara pendapat ulama. sinkronisasi pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami dengan hukum keluarga Islam di dunia. Analisis pemikiran Ibn Hazm dikalangan ulama dan negara-negara muslim.

Bab VI berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Biografi Ibn Hazm

1. Kelahiran dan Nama

Nama lengkap Ibn Hazm ada beberapa versi, yaitu: Dalam *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, nama lengkap Ibn Hazm disebutkan: Imam Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm.⁴⁸ Dalam *al-Muhalla bil Asar* disebutkan Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm.⁴⁹ Dalam *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* disebutkan al-Faqih al-Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad.⁵⁰

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa nama Ibn Hazm adalah Ali, nama kunyah-nya adalah Abu Muhammad. Nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, tetapi dia lebih terkenal dengan nama Ibn Hazm dengan menisbatkan dirinya pada kakek keduanya bernama Hazm.⁵¹

Silsilah lengkapnya adalah 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Galib bin Salih bin Khalaf bin Ma'dan bin Suffin bin Yazid al-Farisi.⁵² Ibn Hazm lahir pada tanggal 7 November 994 M/384 H,⁵³ bertepatan dengan hari akhir bulan

⁴⁸ Ibn H}azm, *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1317 H), hlm. 2

⁴⁹ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, *op. cit.*, hlm. 21

⁵⁰ Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 3

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1977), hlm. 19

⁵² Yaqut, *Mu'jam, al-Udaba*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Jilid 12, hlm. 237; Lihat: Muhammad 'Abdullah Abu Su'aila, *al-Imam Ibn Hazm al-Zahiriyy: Imam Ahli al-Andalusi*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1995), hlm. 16

⁵³ A. Hafi Ansori, et.al., *Ensiklopedi Islam, Jilid II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998, hlm 148. Muhammad Abu Zahrah mengatakan "sangat jarang sekali terjadi dalam biografi seorang alim besar yang dapat diketahui tempat dan tanggal lahirnya secara jelas, baik dalam bentuk tahun, bulan, tanggal maupun harinya dengan jelas". Ibn Hazm yang waktu lahir maupun wafatnya dapat diketahui dengan jelas, karena Ibn Hazm mencatat waktu dan tanggal lahirnya sendiri dengan detail dan dilaporkan kepada Qadhi Sa'id bin Ahmad al-Andalusy. Ibn Hazm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpendang dan mulia. Lihat: Muhammad Abu Zahra. *op. cit.*, hlm. 19

Ramadan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi 'Idul Fitri di Cordova Spanyol. Ia meninggal dunia pada tanggal 20 Sya'ban 456 H atau 15 Agustus 1064 M.⁵⁴ dalam usia 71 tahun 10 bulan 29 hari di Padang Lablah, sebuah desa di bagian barat Andalusia di Selat Laut Besar.⁵⁵ Ada juga yang mengatakan bahwa ia meninggal di desa kelahirannya Manta Lisam.⁵⁶

Ibn Hazm sendiri memanggil dirinya dengan 'Ali atau Abu Muhammad, panggilan ini ditemukan dalam karya-karya tulisnya.⁵⁷ Penulis klasik maupun kontemporer memakai nama singkatnya yang populer yaitu Ibn Hazm,⁵⁸ dan terkadang dihubungkan dengan panggilan al-Qurtubi atau al-Andalusi sebagai menisbatkannya kepada tempat kelahirannya Cordova dan Andalusia.⁵⁹ Sebagaimana sering pula dikaitkan dengan sebutan al-Zahiri,⁶⁰ sehubungan dengan aliran fikih dan pola pikir al-Zahiri yang dianutnya.

⁵⁴ H.A.R. Gibb & J.H. Kramer, et al., (ed), "*Ibn Hazm*", *Sorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1951), Jilid 3, hlm. 149; Lihat juga: Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab al-Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), cet. Ke-1, hlm. 29

⁵⁵ Muhammad al-Muntasir al-Kittani, *Mu'jam Fiqh al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1996), jilid: 12, hlm. 9

⁵⁶ Mahmud 'Ali Himayah, *Ibn Hazm: Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, terj: Halid al-Kaf (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 75

⁵⁷ Rahman Alwi, *Ibid.*, hlm. 30

⁵⁸ Hasbi al-Siddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Rizki Putra, 1997), cet. I, hlm. 545

⁵⁹ Andalusia adalah nama Arab untuk jazirah Iberia yang pada masa sekarang dikenal sebagai Spanyol dan Portugis. Sebelum ditaklukkan oleh Islam, Andalusia adalah sebuah negeri yang dipimpin di bawah system feodal yang disponsori oleh gereja resmi Katolik Roma. Islam datang pertama kali ke Andalusia pada tahun 711 M (92 H) sebagai juru selamat bagi segenap lapisan masyarakat Eropa yang telah berabad-abad hidup dalam kegelapan. Andalusia ditaklukkan dan dibebaskan dari raja Roderick yang memimpin dengan despotik oleh seorang panglima perang bernama Tariq bin Ziyad atas perintah gubernur Qayrawan yang bernama Musa bin Nusair. Lihat: Ahmad Tompson dan 'Aaur Rahim, *Islam Andalusia: Sejarah Kebangkitan dari Keruntuhan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 15

⁶⁰ Mazhab Zahiriyy yang secara bahasa artinya literal adalah mazhab yang dibangun oleh Abu Dawud al-Zahiriyy (w. 883 M/ 270 H) yang berasal dari Asfahan, salah satu propinsi di Iran saat ini. Abu Zahrah (w.1974 M/ 1394 H) menyebutkan bahwa pada awalnya mazhab Zahiriyy bersama Mazhab Hanafiyy, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i adalah empat mazhab besar di bagian timur Dunia Islam. Sedangkan Mazhab Hanbali yang dikemudian hari menjadi mazhab besar di dunia Islam, sebelum abad kelima belum begitu populer dan tidak banyak diikuti oleh kaum muslimin. Namun berkat pengaruh Ibn Abi Ya'la (w. 1065 M/ 458 H), seorang ulama besar Mazhab Hanbali, pengaruh Mazhab Hanbali mulai berkembang dan menggeser posisi Mazhab Zahiriyy di dunia Timur. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 262

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Ya'qub Khan Riau



Ayahnya yang bernama Ahmad Ibn Sa'id, termasuk golongan orang yang cerdas berpendidikan cukup tinggi, sehingga ia dapat diangkat mejadi pejabat di lingkungan kerajaan Khalifah Abu 'Amir Muhammad Ibn Abi 'Amir (al-Mansur) dan kemudian menjadi wazir (menteri) al-Mansur pada tahun 381 H/ 991 M, lalu ia tinggal bersama keluarganya di Muniyyah al-Mughirat pemukiman pejabat istana di bagian timur Cordova dekat istana al-Zahirat, pusat kerajaan al-Mansur. Ia sempat pula menjabat wazir di masa pemerintahan al-Muzaffar dan meninggal pada tahun 399 H/ 1009 M.⁶¹

Kakek Ibn Hazm yang bernama Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk Islam setelah ia menjalin hubungan dan melakukan sumpah setia kepada Yazid Ibn Abu Sufyan; saudara kandung Mu'awiyah Khalifah pertama Bani Umayyah.⁶² Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan keluarganya (Bani Hazm) dimasukkan ke dalam suku Quraisy, sedangkan nenek moyangnya berbangsa Persia. Kakeknya beserta keluarga Bani Umayyah bersama-sama pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan disana, keluarga Bani Hazm lalu tinggal di Manta Lisam, suatu kota kecil yang merupakan pemukiman orang Arab di Andalus, disana mereka hidup dengan kemewahan dan kedudukan yang amat terhormat. Karena itulah Ibn Hazm dan keluarganya memihak kepada Bani Umayyah.⁶³

Ibn Hazm sejak kecil hidup dan dibesarkan dalam lingkungan kerajaan dan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya, ia didik oleh wanita-wanita istana, ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru wanita

⁶¹ Yaqut, *Mu'jamal-Udaba'*, *op. cit.*, hlm. 237; Lihat Juga: Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 257-258

⁶² Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 358

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 24. Lihat Juga: Hasby as-Siddieqy, *op. cit.*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengajarkannya membaca dan menghafal Alquran, sya'ir dan melatihnya pandai menulis.⁶⁴ Meskipun demikian, ayahnya tetap ikut memantau perkembangan dan bakatnya.⁶⁵ Agaknya pendidikan privat merupakan tradisi pendidikan bagi anak-anak keluarga istana dan pembesar di masa itu. Akibatnya, ia nyaris terisolasi dalam istana dan tidak begitu dunia luar mengenal lingkungan masyarakat Cordoba sebagai salah satu kota metropolis kala itu.⁶⁶

Kedaaan dan suasana kelimuan pada waktu itu mendukung kemajuan intelektual Ibn Hazm. Ketika itu perpustakaan dan universitas di Cordoba berkembang dengan pesat.⁶⁷ Sedangkan Toledo (Spanyol) menjadi pusat kegiatan penterjemahan ilmu-ilmu Yunani, baik filsafat, matematika atau kedokteran. Kondisi ini memungkinkan Ibn Hazm untuk memperdalam pengetahuannya di berbagai disiplin ilmu dan membentuk kerangka berfikir yang komprehensif.

Pada mulanya ia mempelajari fikih Mazhab Maliki karena penduduk Spanyol dan Afrika utara pada waktu itu menganut Mazhab Maliki.⁶⁸ dengan mempelajari kitab karangan Imam Malik yang terkenal yaitu *al-Muwatta'* kepada Ahmad bin Duhun (mufti Cordoba). Setelah mempelajari Mazhab Maliki ia mempelajari pula mazhab Syafi'i dan kemudian mazhab

⁶⁴ Ibn Hazm, *Tauq al-Hamamah fi al-Ulfah wa al-Alaf*, (Al-Muassasah al-'Arabiyyah, 1987), Cet. Ke-2, hlm. 166. Lihat juga: Muhammad 'Abdullah Abu Su'ailaik, *Op. cit.*, hlm. 18

⁶⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Ilham Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 677

⁶⁶ Ibn Hazm, hlm. 272-273

⁶⁷ Menurut Atho' Mudzhar, di Cordoba waktu itu terdapat lebih dari tujuh puluh ribu perpustakaan yang dapat menjadi tempat rujukan dalam penelitian adanya dukungan penguasa saat itu yaitu Abdurrahman al-Nasir dengan mendatangkan ulama-ulama dan kitab-kitab dari timur sehingga dunia keilmuan menjadi lebih hidup. Dan Cordoba banyak melahirkan pemikir-pemikir besar seperti Ibn Rusyd, Ibn Abd al-Barr, Ibn Bajah, Dawud al-Asbahani, Ibn Hazm, Muhyiddin Ibn al-'Arabi. Muhammad Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91-92

⁶⁸ Ulama-ulama besar penganut Mazhab Maliki yang lahir di Andalusia, diantaranya yaitu al-Bajiy (1081 M/474 H), Ibn al-'Arabi (w. 1148 M/ 543 H), Ibn al-Rusyd (w. 1198 M/595 H) dan Imam al-Syatibiy (w. 1388 M/790H) yang merupakan bapak *maqdsid al-syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Jamil Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi. Di antara mazhab fikih yang ada, ia paling mengagumi mazhab Syafi'i karena menurut penilaiannya mazhab Syafi'i paling teguh berpegang pada nas-nas Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Akan tetapi, mazhab Syafi'i pun ditinggalkan olehnya karena menurutnya mazhab Syafi'i juga banyak menggunakan *ra'yu*, khususnya dalam persoalan *qiyas*. Akhirnya Ibn Hazm berpindah mazhab dan lebih condong kepada mazhab Zahririyah dengan Imamnya Daud bin 'Ali bin Khalaf al-Asbahani (202-270 H).⁶⁹

2. Kondisi Sosial Politik di Masa Ibn Hazm

Karakter, kepribadian dan pemikiran tidak akan lepas dari pengaruh latar belakang keluarga, masyarakat, kondisi politik dan pendidikan yang didapat oleh seseorang itu.⁷⁰ Demikian pula dalam mengkaji Ibn Hazm, kondisi sosial-politik pada masa itu menjadi bagian kajian sejarah sosial yang akan menghasilkan corak pemikiran yang khas Ibn Hazm.

⁶⁹ Keputusan Ibn Hazm untuk memilih Mazhab Zahir (alur tekstual) dalam memahami syariat Islam adalah sebagai bentuk revolusi bermazhab, sebagai implikasi ketidakpuasan terhadap Mazhab Maliki yang menjadi mainterm saat itu, yang menurutnya, mazhab yang berpengaruh saat itu telah mempolitisir hakikat ajaran Islam, secara *continue* ia pun mensosialisasikan pandangannya melalui forum kajian dan media tulisan. Dalam hal dakwahnya ini, ia sering menggunakan ungkapan provokatif, hal ini bisa kita lihat dalam beberapa bukunya seperti; *al-Muhalla*, *al-Nubzah al-Kafiyah*, *al-Fisal fi al-Milal wa al-Nihal* dan *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* bukan karena motif *taqlid* (mengikuti) kepada Mazhab Zahir, hal ini sebagaimana yang ditegaskannya dalam ketidakbolehan *taqlid* kepada para pemimpin Mazhab (*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*; jilid. I, hlm. 99). Secara umum, identitas Mazhab Zahir (kaum tekstual) bisa terbaca dalam tiga point berikut: Pertama: Membatasi dalil agama hanya pada Alquran dan Sunnah, Islam adalah *dzahir al-Nusus* (sisi lahir teks), selain itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kedua: Menolak penggunaan dalil *qiyas* (Analogi), Dawud bin 'Ali menegaskan: "yang pertama kali menggunakan dalil analogi adalah Iblis, saya menemukan argumen untuk membatalkan *istihsan*, ternyata ia juga dapat dijadikan sebagai dalil untuk membatalkan *qiyas*". Lihat: *Tarikh Baghdad*, jilid 8, hlm. 374). Senada dengan statemennya, Ibn Hazm menguatkan: "dalam memecahkan masalah agama tidak boleh menggunakan *qiyas* dan *ra'yu* sebab perselisihan pendapat dalam Islam harus dikembalikan pada Alquran dan Sunnah" Lihat: *al-Muhalla*, jilid I, hlm. 56). Ketiga: Bahwa dalam syariat tidak ada istilah *ta'il* atau *'illat* (alasan atau motif), Allah bebas melakukan dan tidak melakukan apa saja tanpa harus disertai alasan. Lihat: Abu Toyib al-Mauludi, *Masadir al-Tasyri' al-Islami 'Inda Ibn Hazm*: hlm. 11

⁷⁰ J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-4, hlm. 86-88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Ibn Hazm hidup pada waktu umat Islam Spanyol mengalami puncak krisis yang paling tragis.⁷¹ Dimulai dengan naiknya Hisyam II al-Muayad kesinggasa kekuasaan dalam usia 12 tahun, yang mengakibatkan roda pemerintahan yang didominasi Muhammad Ibn Abi 'Amir al-Mansur yang telah bertindak sebagai pelaksana kekuasaan sejak masa Hakam II.⁷² Bahkan setelah Hisyam II dewasa, ia mengokohkan kekuasaan al-Mansur dengan gelar “*Mulk al-Mansur*” Sejak saat itu Khalifah hanya sekedar sebagai simbol formal belaka, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Di kemudian hari Al-Mansur berhasil mengokohkan kekuasaannya dengan mewariskan kepada anak-anaknya.⁷³

Kekacauan politik yang berpuncak pada naiknya Hisyam II ke tampuk kekuasaan pada 400 H/1010 M, berpengaruh besar pada kehidupan Ibn Hazm dan keluarganya karena setelah itu orang tuanya tidak lagi menjabat sebagai menteri. Apalagi setelah orang tuanya meninggal pada bulan Zulhijjah 402 H/1012 M, serta tempat tinggal keluarganya yang megah di Balad al-Muqhits dirusak orang-orang Barbar. Serentetan musibah mendorong Ibn Hazm meninggalkan Cordoba pada bulan Muharram 404 H/ 1014 M, menuju Almeria.⁷⁴

Pada suatu saat, ‘Ali ibn Hamud yang menyatakan dirinya sebagai penguasa Almeria, menjatuhkan Sulaiman, Amir Bani Umayyah di sana yang merupakan pelindung Ibn Hazm. Hal ini terjadi pada tahun 407 H/ 1017 M” Peristiwa itu dilatar belakangi oleh kecurigaan ‘Ali bahwa Ibn Hazm bersekongkol dengan Sulaiman untuk menegakkan dinasti Umayyah. Ibn Hazm

⁷¹ Philip K. Hitti, *History of Te Arabs*, Terj. Walid Khalidi, (London, Mac Millan Press Ltd., 1974), hlm. 531-532

⁷² *Ibid.*, hlm. 532

⁷³ Abdul Hakim Uwais, *Analisa Runtuhnya Daulah-daulah Islam*, Terj. Yudian Wahyudi, (Solo: Pustaka Mantiq, 1990), hlm. 31

⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sempat dipenjara beberapa bulan lamanya. Kemudian Ibn Hazm melarikan diri ke Hisn al-Qasr.⁷⁵

Ketika Ibn Hazm mendengar informasi bahwa ‘Abdurahman IV al-Murtada memproklamirkan diri sebagai Khalifah Umawiyah di Valencia, segera ia meninggalkan Hisn al-Qasr menuju kesana melalui jalan laut. Di Valencia ia bergabung dengan teman-temannya. Ia bahkan menjabat sebagai menteri al-Murtada dan bergabung dengan tentaranya untuk menyerang Granada. Pasukan al-Murtada mengalami kekalahan dan Ibn Hazm ikut tertawan, tidak lama kemudian ia dilepaskan kembali.⁷⁶

Ibn Hazm kembali ke Cordova pada bulan Syawal 409 H, ketika al-Qasim ibn Hamud menjabat sebagai Khalifah, setelah meninggalkan kota itu selama lebih kurang 6 tahun. al-Qasim digantikan ‘Abdurahman V al-Mustazhir, sahabat Ibn Hazm yang kemudian mengangkatnya sebagai menteri. Setelah lebih kurang 2 bulan al-Mustazhir berkuasa ia digulingkan pada bulan Zulqa’dah 414H/Januari 1024 M. Karena terlibat dalam pemerintahan al-Mustazhir, Ibn Hazm sempat ditahan. Sejak saat itu Ibn Hazm meninggalkan kegiatan politik dan lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Rasa fanatiknya terhadap keluarga Umawiyah sempat pula menyeret Ibn Hazm ke kancah politik lagi. Peristiwa ini diungkapkan oleh al-Jayani, ia pernah menjabat menteri lagi pada masa Hisyam al-Mu’tadid Billah, Khalifah terakhir Daulah Bani Umayyah di Spanyol sampai dengan munculnya *Mulk al-Tawaif* pada tahun 422 H. Sejak saat itu Spanyol terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang lemah, kondisi kekuatan politik Islam Spanyol dengan demikian menuju ke titik kehancuran.⁷⁷

Ibn Hazm menyaksikan dengan mata kepala sendiri tragedi yang menimpa umat Islam Spanyol. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kepribadiannya. Ia melihat dan menyaksikan kepahlawanan serta kebesaran umat kristiani di saat umat Islam mulai lemah dan terpecah belah. Faktor inilah yang mendorong Ibn Hazm sebagai ulama pemikir besar, untuk mendalami ajaran Kristen.⁷⁸

Sebagai orang yang berasal dari keluarga pejabat tinggi, logislah ia merasa sedih dan sakit hati menyaksikan Spanyol Islam yang semula damai, makmur dan sejahtera, kemudian terpecah belah. Tidak mengherankan apabila ia merasa bekewajiban dan berusaha mengembalikan suasana seperti semula. Untuk itu ia membantu al-Murtada baik sewaktu di Valencia maupun di Cordoba dan menjadi menteri pada masa al-Mustazhir dan al-Mu'tadid Billah berkuasa meskipun usaha itu boleh dikatakan gagal. Akhirnya melalui diplomasi ilmiahlah satu-satunya cara ia tempuh dalam mengabdikan dirinya bagi kebesaran Islam.⁷⁹

3. Kondisi Budaya dan Ilmiah

Ibn Hazm lahir di mana kebudayaan sedang bangkit, bendera keilmuan sedang berkibar, dan banyak ulama besar yang berhasil menghimpun beragam kebudayaan dan menyusun buku-buku berharga, seperti Imam Abu 'Amr bin

⁷⁷ Moh. Bahrudin, *Mazhab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibn Hazm* (Jurnal: Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011), hlm. 187

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Mahmud 'Ali Himayah, *Ibn Hazm*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1983), cet. Ke-1, hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Abdul Barr,⁸⁰ Abu al-Walid al-Baji,⁸¹ dan tokoh-tokoh yang terkenal luas wawasan keilmuannya. Gambaran dinamika keilmuan di Andalusia⁸² ini sebagaimana gerakan terjemahan (*harakah tarjamah*) yang berkembang pada masa khalifah al-Ma’mun. Ketika membaca karya Ibn Hazm di bidang logika (*mantiq*),⁸³ akan diperoleh gambaran seperti itu dengan jelas seperti argumentasinya terhadap sekte-sekte keagamaan dalam karyanya *al-Fasl* yang menggambarkan adanya terjemahan di masanya dan masa sebelumnya dari buku-buku Yunani.⁸⁴

Perpustakaan al-Hakam II berjumlah sampai dengan 40.000 buah buku dan memenuhi ruangan istana khalifah. Ibn Hazm dalam karyanya *Jamharah Ansab al-‘Arab*, dengan mengutip dari *taqlid al-Fata*, mengatakan bahwa daftar isi bukunya (*fihris*) sebanyak 44, dalam masing-masing *fihris* terdapat 50 *waraqahi*. al-Hakam menyuruh para pembuat buku untuk memilih karangan-karangan asing dan menyuruh para ahli untuk mengkaji sebuah kitab. Untuk pekerjaan ini ia membayar mahal sehingga rumah dan lemarinya penuh sesak dengan buku. Ia berhasil mengumpulkan semua yang sebelumnya tidak pernah dilakukan seorangpun.⁸⁵

⁸⁰ Ia adalah Yusuf bin ‘Abdullah bin ‘Abdil Barr, seorang ahli fiqh, hafiz, ahli dalam *qira’at*, *khalafah fiqhiyyah*, ilmu hadis dan tokoh-tokohnya. Ia memang tidak pernah keluar dari Cordoba namun banyak tokoh ahli hadis di Cordoba dan lainnya yang menimba ilmu darinya.

⁸¹ Ia adalah adalah Sulaiman bin Khalaf al-Baji al-Maliki al-Hafi, dikenal sebagai ahli fiqh, hadis dan ilmu kalam. Al-Baji lahir pada bulan Zulqa’idah 403 H dan meninggal pada 474 H di Misyah

⁸² Untuk mengetahui betapa produktifnya Andalusia melahirkan ilmuwan saat itu, bisa dibaca melalui informasi yang dibawa oleh Ibn al-Faradhi (w. 1013 M/962 H), tepat tiga abad setelah Islam menginjakkan kaki di Andalusia. Tercatat ada 1651 ulama (dari berbagai disiplin ilmu keislaman) yang biografinya dimuat oleh al-Faradhi dalam kitabnya *Tarikh Ulama Andalus*

⁸³ Yaitu: *al-Taqrir li-hadd al-Mantiq wa al-Madkhal ilaih bi al-alfaz al-‘Amiyah wa Amsalah al-Fiqhiyah*

⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 101

⁸⁵ Ihsan ‘Abbas, *Tarikh al-‘Adab al-Andalusi*, (Beirut: Dar al-S’aqafah, t.th..), Cet. Ke-1, hlm.



Oleh karena itu, tidak ragu lagi bahwa pandangan Ibn Hazm juga mengalir dari khazanah kepustakaan al-Hakam. Ia membaca dan memahami dengan penuh kesadaran menelaahnya dengan cermat, warisan intelektual dan karya-karya besarnya berhasil diciptakan. Di antara respek Ibn Hazm yang kuat dan terpeliharanya kepustakaan ini sampai masa bergolaknya Cordoba dari 399 H sampai 403 H. Dalam hubungan ini Ibn Khaldun menyebutkan bahwa buku-buku tersebut masih ada di Cordoba sampai kemudian dijual di masa kepungan bangsa Barbar. al-Hajib adalah salah satu gubernur yang memerintahkan untuk mengeluarkan buku-buku itu dan sisa-sisa yang ada dirampas dan diejek oleh kaum Barbar.⁸⁶

Pada masa Ibn Hazm terdapat juga beberapa perpustakaan khusus di luar milik al-Hakam II. Misalnya perpustakaan Qadi al-Jama'ah di Cordoba, perpustakaan milik Abu al-Matraf bernama 'Abd al-Rahmin bin Qutais yang banyak menghimpun beragam buku dengan macam-macam disiplin ilmu dan memiliki 6 pegawai pencetak kertas atau buku yang berfungsi menyalin dan menyusunnya. Bila ada sebuah buku berharga di tangan seseorang, ia (Abu al-Matraf) mencari dan membelinya dengan harga mahal. Apabila ia tidak mampu membelinya, ia menyalinnya dan kemudian mengembalikannya lagi kepada pemiliknya lagi.⁸⁷

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Di zaman Ibn Hazm hidup, golongan Yahudi dan Nasrani memperoleh posisi terhormat dengan penuh toleransi dan keadilan di bawah bendera Islam.

⁸⁶ Al-Muqri, *Nafh al-Tib*, (Mesir: al-Matba'ah al-Azhariyyah, 1390 H), Cet. Ke- 1, Jilid 1, hlm. 242

⁸⁷ Al-Tahir Makki, *op. cit.*, hlm. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan beragam golongan keagamaan yang berbaur dengan umat Islam di Andalusia ini, mendatangkan suatu pergolakan pemikiran dan argumentasi keagamaan. Kondisi sosial di Andalusia yang multikultural telah menjadi faktor penting lahirnya perhatian Ibn Hazm terhadap perbandingan agama.

Andalusia saat itu adalah negeri yang didiami oleh berbagai macam suku budaya, ras, dan agama. Negeri ini dihuni oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Komunitas Yahudi relatif tidak memberikan gangguan politik karena mereka merasa bahwa Islam telah berjasa dengan menyelamatkan mereka dari persekusi kaum Kristen sebelum umat Islam datang. Penganut agama Kristenlah yang memberikan ancaman politik bagi umat Islam di Andalusia karena kekuasaan direbut dari tangan mereka. Secara teologis, pertemuan tiga agama ini tak pelak lagi telah melahirkan banyak benturan pemikiran. Ibn Hazm mengambil langkah cerdas dengan menyusun kitab yang menjelaskan tentang seluk-beluk agama-agama di Andalusia. di antaranya adalah kitab *al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal* dan *Izhar Tabdil al-Yahud wa al-Nasara li al-Taurat wa al-Injil wa Bayanu Tanaqud ma Biyadihim min huma min ma la Yahtamilu al-Ta'wil*.

Perhatian Ibn Hazm di bidang ini mendapatkan pengakuan tersendiri di dunia Islam dan di kalangan ilmuwan Barat. Migul Asin Palacios menyebutkan bahwa Ibn Hazm adalah tokoh pertama yang melakukan studi kritis terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru. Ibn Hazm dianggap berjasa besar karena telah menjadi pioner dalam sejarah studi terhadap Bibel, yang sampai beberapa abad karyanya belum mampu disamai oleh karya-karya lainnya. Munculnya gerakan Protestan pada abad 18 di Eropa disinyalir pula oleh Asin juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpengaruh oleh Ibn Hazm. Ia memastikan bahwa tokoh Kristen abad 13 M, Tomas Aquinas, benar-benar berhutang besar terhadap proyek pemikiran Ibn Hazm, terutama mengenai kompromi antara akal dan wahyu.⁸⁸

Para pemimpin Islam Andalusia mengikuti Mazhab Imam Malik dan enggan untuk memakai Mazhab lain atau pindah ke Mazhab selain Maliki. Para ahli fikih Andalusia lebih memilih mengikuti Mazhab Malik dari pada Mazhab lainnya. Antara Ibn Hazm dan Sulaiman bin Khalaf al-Baji, pemimpin Mazhab ini pernah terjadi polemik panjang. Ada dua kemungkinan yang menjadikan posisi dan penyebaran Mazhab ini berkembang di Andalusia:

- a. Al-Muqarri menyebut dalam karyanya *Nafh al-Tib* bahwa al-Amir Hisyam bin ‘Abdurahman sangat mengagumi keluasan ilmu dan kebesaran Imam Malik dan menganjurkan manusia untuk mengikutinya.
- b. Apa yang diriwayatkan al-Humaidi dari gurunya, Ibn Hazm, dari posisi Yahya bin Yahya di sisi Khalifah al-Hakam bin Hisyam yang menjadikan hukum hanya terbatas pada pendapat para pengikut Mazhab Maliki, berupa anjuran pada masyarakat untuk memahami Mazhab Maliki sebagai tuntutan bagi kehidupan dunia dan untuk mendapat kesenangan di sisi sang raja. Orang-orang, seperti dikatakan Ibn Hazm, sangat antusias pada masalah duniawi dan kepemimpinan. Mereka akan menerima apa saja yang akan mewujudkan keinginan-keinginan mereka di dunia.

Sulit menentukan siapa yang pertama kali membawa Mazhab Maliki ke Andalusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang pertama kali membawanya adalah Ziyad bin ‘Abdurahman yang dikenal dengan sebutan

⁸⁸ Ahmad al-Kataniy, *al-ijtihad wa al-Mujtahidun fi al-Maghrib wa al-Andalus*, (t.tp, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 35-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syabtun dengan alasan yang pertama kali membawa kitab *al-Muwatta'* ke negara Andalusia. Sebagian berpendapat bahwa yang pertama kali membawa kitab *al-Muwatta'* pada masa Khalifah 'Abdurahman ke negeri Andalusia adalah al-Ghazi bin Qais. Ia juga *mentadwin* (membukukan) *al-Muwatta'* untuk penduduk Qairuwan dan menjadi salah satu kitab pertama yang diajarkan dan diperbanyak untuk para ulama Maliki.⁸⁹

Pada pertengahan abad ke-9 M, datanglah Qasim bin Muhammad bin Sayyar dengan membawa mazhab Syafi'i dari negeri timur. Ia menyebarkan mazhab ini dengan memberi pelajaran dan penyusunan buku yang dilakukannya di masjid *Jami'*. Ia mendapat pengayoman dari pemerintah seperti halnya terhadap ulama Malikiyah. mazhab Syafi'i berkembang pada masa pemerintahan 'Abdurahman al-Nasir, karena puteranya, 'Abdullah, menganut mazhab Syafi'i dan bersepakat untuk meninggalkan ayahnya (al-Nasir), karena al-Nasir mengangkat puteranya yang lain, al-Hakam bin Hisyam yang menganut mazhab Maliki. Upaya 'Abdullah ini gagal dan terbunuh di tangan ayahnya. Peristiwa ini mengakibatkan terhentinya penyebaran mazhab Syafi'i sampai kemudian datang pemerintahan al-Hakam al- Mustansir yang menghargai para ahli sastra dan budaya negeri timur yang datang ke Andalusia. Sebagian dari pendatang itu terdapat para ulama bermazhab Syafi'i . Dalam waktu cepat mazhab Syafi'i berkembang dengan pesat. Pada masa Khalifah al-Mansur bin 'Amir, mazhab Syafi'i mengalami penyusutan. al-Mansur yang dikenal sebagai ahli hukum lebih banyak mendukung para ulama Mazhab Maliki. Sebagian dari ulama itu adalah Ibn Hazm sebelum kemudian berpindah ke Mazhab Zahiriy.

⁸⁹ Mustafa al-Harusi, *al-Madrasah al-Malikiyyah al-Andalusiyyah ila Nihayat al-Qarni al-Syams al-Hijriy Nasyatan wa Khasaisa*, (al-Mamlakat al-Maghribiyyah: Wizarat al-Awqaf wa al-Syayn al-Islamiyyah, 1418 X11-1997 M), hlm. 36



Mazhab Zahiriy masuk ke Andalusia dibawa oleh 'Abdullah bin Muhammad bin Qasim Hilal yang w. 272 H, Selain dia juga terdapat beberapa ulama yang berangkat ke negeri timur dan mengikuti Mazhab Zahiriy setelah kembali ke Andalusia dan menyebarkan apa yang ada dalam hadis Rasulullah serta tidak mau menukil beberapa berita (akhbar) dari mazhab dan para ulama. Sebagian dari para ulama Zahiriy yang terkenal adalah Baqi' bin Mukhallad. Abu 'Abdullah bin Wahdah Bazbazi dan Qasim bin Asbagh bin Muhammad bin Yusuf. Mereka kemudian mengumumkan pilihan mazhab Zahiriy yang di pimpin oleh Munzir bin Sa'ad al-Balaluti yang dikenal sebagai khatib dan hakim masyarakat Andalusia. Ibn Hazm juga ikut menyebarkan mazhab ini dan bertemu dengan putera Munzir, Sa'id bin Munzir yang meninggal pada 403 H dalam usia yang sangat lanjut.

5. Pendidikan, Guru dan Murid-Muridnya

Guru pertama Ibn Hazm adalah Abu 'Umar Ahmad bin Muhammad bin al- Jaswar.⁹⁰ Di bidang logika adalah Muhammad bin al-Hasan al-Mazhaji yang dikenal dengan sebutan "Ibn al-Kattani" yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H. Ketika diperlihatkan padanya karya gurunya ini tentang keutamaan ulama Andalusia ia menyebut beberapa karya gurunya di bidang kedokteran yang dipandang sebagai karya bernilai tinggi atau di bidang filsafat yang dipandang sebagai karya yang bernilai tinggi dan bermanfaat.

Pengarang Mu'jam al-Udaba, Yaqut al-Hamawi menyebut bahwa Ibn Hazm pertama kali belajar ilmu fikih dari 'Ali Muhammad Ibn Dahun yang

⁹⁰ Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*, (Dar al-Sadir, t.th..), Jilid III, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



fatwa-fatwanya dijadikan rujukan di Cordova. Ia juga belajar ilmu fikih dan hadis dari 'Ali 'Abdillah al-Azdi yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Fardi. Di Cordova gurunya yang satu ini tidak tertandingi di bidang keluasan periwayatan dan hafalan hadis. pengetahuan tokoh-tokoh hadis, kecenderungan pada ilmu pengetahuan dan sastra dan kefasihan. Sedikit sekali mengeluarkan argumentasi tanpa diperkuat dengan menghadirkan seorang saksi atau teman, seperti yang dikatakan Ibn Hayyan.

Guru-guru Ibn Hazm lainnya adalah Abu Muhammad al-Rahuni dan 'Abdullah bin Yusuf bin Nami yang dikenal sebagai tokoh yang santun dan utama, tidak pernah berhenti mengumandangkan Alquran di rumah seseorang, berakhlak baik, khusyu', banyak menangis, dapat diterima apa yang diriwayatkan darinya dan memelihara agamanya. Keadaan dan suasana keilmuan pada masa Ibn Hazm mendukung kemajuan intelektual Ibn Hazm. Ketika itu perpustakaan dan universitas di 'Abdullah al-Qadi, Muhammad bin Sa'id, 'Abdullah bin al-Rabi' al-Tamimi, 'Abdullah bin Yusuf bin Nami.⁹¹

Di antara murid-murid Ibn Hazm yang menyebarkan paham-paham Ibn Hazm adalah Abu 'Abdullah Muhammad ibn Abi Nasr yang dikenal dengan nama al-Humaidi (420-488 H)⁹², pengarang kitab al-Jam'u baina al-Sahihaini, yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhariy dan Muslim.

Dapat dikatakan bahwa murid-murid Ibn Hazm telah berhasil menyebarkan dan membela Mazhab al-Zahiriyy di Andalusia sehingga pengaruhnya terus ada dan bertahan dari generasi ke generasi berikutnya,

⁹¹ <http://ighanie-np-blogspot.com>, *Biografi dan Pemikiran Ibn Hazm dan Gagasan Usul Fiqh dalam Kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, diakses pada tanggal 05-12-2018

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Mazhab al-Islamiyyah*, (Dar al-Fikr al-'Arabiyy), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahkan menurut Abu Zahrah, saat itu pasti ada seorang faqih Zahiriyyah di setiap generasi.⁹³

Seruan Ibn Hazm untuk menolak *taqtid* kepada Mazhab yang digemakan oleh murid-muridnya cukup memberikan pengaruh yang signifikan bagi pengembangan keilmuan pada masa-masa sesudahnya. Semangat *ijtihad* dan kembali kepada Alquran dan Sunnah seperti diserukan Ibn Hazm akhirnya kembali bangkit dengan munculnya ulama-ulama yang mendukung seruannya seperti Ibn Taimiyah.

Ibn Taimiyah bahkan pernah membaca dan mengkritik karya kitab-kitab Ibn Hazm, sehingga gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya dalam kitab-kitabnya hampir serupa dengan gaya bahasa Ibn Hazm yang tegas, tajam dan menusuk.⁹⁴

Di samping itu, fikih Ibn Hazm juga diikuti dan dianuti oleh tokoh-tokoh sufi kenamaan, Muhyiddin Ibn 'Arabi (560 H-638 H), ketika berada di Sevilla Spanyol, ia pernah belajar Alquran, hadis dan fikih kepada salah seorang murid Ibn Hazm,⁹⁵ ia pun pernah bermimpi bahwa ia melihat Nabi Muhammad SAW memeluk Ibn Hazm hingga Ibn Hazm hilang menyatu dalam diri Nabi.⁹⁶ Ibn 'Arabi meyakini bahwa mimpinya itu menunjukkan bahwa orang yang mengikuti fikih Ibn Hazm berarti ia telah mengikuti fikih Rasulullah SAW.⁹⁷

⁹³ *Ibid.*, hlm. 415

⁹⁴ 'Abdul Halim 'Uwais, *Ibn Hazm al-Andalusi*, (Cairo: al-Zahra li al-I'lam al-'Arabi, 1988), Lihat juga: Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 32

⁹⁵ 'Abdul Halim 'Uwais, *Ibid.*

⁹⁶ Sadiq Ibn Hasan al-Qanuji, *Abjad al-'Ulum*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978), Juz 3, hlm. 148

⁹⁷ 'Abdul Halim 'Uwais, *op. cit.*, hlm. 350

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam perkembangan selanjutnya, Mazhab Ibn Hazm mengalami masa kejayaannya pada akhir abad ke-enam Hijriyah yaitu pada masa pemerintahan Ya'qub ibn Yusuf ibn 'Abdul Mu'min ibn 'Ali (berkuasa dari tahun 580 H-595 H). Khalifah Ya'qub menyerukan pengamalan Alquran dan Sunnah di wilayah kekuasaannya, Maroko Afrika Utara, meninggalkan Mazhab Maliki serta Ibn Hazm dijadikan figur terhormat oleh penguasa di saat itu.⁹⁸

Di beberapa wilayah seperti Baghdad Irak, Mazhab Ibn Hazm dibela dan dikembangkan oleh Muhammad ibn Nasr Futuh ibn 'Abdullah al-Azdi al-Humaidi (420 H - 488 H) dan Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi (488 H - 507 H), di Mesir diperjuangkan oleh Muhammad ibn al-Walid al-Fahri (wafat 520 H) dan di Suriah Mazhab Zahiriy dijadikan sebagai kendaraan politik untuk melawan penguasa Mamluk oleh Syihabuddin Abu Hasyim Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail ibn 'Abdurrahman ibn Yusuf (704 H - 792 H), ia ditangkap namun ada beberapa tokoh Mazhab Zahiriy lainnya yang selamat yaitu Musa ibn 'Amir Syarafuddin al-Zanji (wafat 788 H) dan Ahmad ibn Muhammad ibn Mansur ibn 'Abdullah Syihabuddin al-Asmuni (wafat 809 H).⁹⁹

Menurut 'Abdul Halim 'Uwais, pengaruh Ibn Hazm masih terus berlangsung dari semenjak wafatnya hingga beberapa abad berikutnya meskipun dalam catatan sejarah Mazhab Zahiriy yang diperjuangkannya lenyap di dunia Islam pada akhir abad keenam hijriyah. Pemikiran-pemikiran dan karya-karyanya terus menerus dikaji dan dibicarakan oleh ulama-ulama

⁹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm...* hlm. 519-522

⁹⁹ Abdul Aziz Dahlan. et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1986), Jilid 6, hlm.1978

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan para peneliti hingga sekarang ini. Daerah-daerah selain Spanyol yang sempat di jangkau oleh murid-murid Ibn Hazm dalam rangka menyebarkan dan mengembangkan Mazhab Zahiriy antara lain adalah: 1) Maroko (Maghribi). Di daerah ini yang berperan dalam menyebarkan dan mengembangkan Mazhab Zahiriy ialah Muhammad bin Syuraih (392 - 476 H).

Di Maroko pada waktu itu di kenal adanya kelompok al-Hazmiyah, yaitu sekelompok ulama fikih yang menganut secara sungguh-sungguh ajaran Ibn Hazm. Mazhab Zahiriy pernah menjadi Mazhab resmi rakyat Maroko, yaitu pada masa pemerintahan Abu Yasuf Ya'qub al-Mansur (seorang sultan Dinasti Muwahhidun, yang memerintah pada tahun 580-595 H). 2). di Baghdad. Di sini Mazhab Zahiriy tumbuh dan dikembangkan oleh Muhammad bin Nasr Futh bin 'Abdullah al-Azdi al-Humaidi (420-488 H), ahli dalam biang sejarah dan periwayatan hadis, dan diteruskan oleh Abu al-Fadal Muhammad bin Tahir al-Magdisi (488-507 H). 3). Iskandariyah (Mesir). Di daerah ini Mazhab Zahiriy dilanjutkan dan dikembangkan oleh Muhammad bin al-Walid al-Fihri (w. 520 H). sementara itu, di Spanyol sendiri, sepeninggal Ibn Hazm, Mazhab Zahiriy diteruskan dan dikembangkan oleh Abu Rafi' bin Fadal bin 'Ali bin Sa'id bin Hazm. salah seorang putra Ibn Hazm yang tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya) dan 'Abdul Baqi bin Muhammad bin Sa'id bin Biry al-Ansari (416-502 H).

Perkembangan Mazhab Zahiriy di Suriah tidak hanya terbatas pada sisi ajaran keagamaan saja, tetapi juga dalam masalah politik praktis. Pada tahun 788 H sebagian dari tokoh Mazhab ini, di bawah pimpinan Syihabuddin Abu Hasyim Ahmad bin Muhammad bin Isma'il bin 'Abd al-Rahman bin Yusuf (704-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



792 1-1), melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Mamlak yang berkuasa pada saat itu. Pemberontakan tersebut dapat digagalkan dan pelaku pemberontakan dapat ditangkap, akan tetapi, tidak semua tokoh Mazhab al-Zahiriyy ikut dalam pemberontakan tersebut, sehingga mereka terhindar dari penangkapan. Diantara tokoh yang tidak ikut adalah Musa bin 'Amir Syarafuddin al-Zanji (w. 788 dan Ahmad bin Muhammad bin Mansur bin 'Abdullah Syihabuddin al-Asymuni (w. 809 H).

Pada akhir abad kedelapan, awal abad kesembilan Hijriah. Mazhab - Zahiriyy mengalami kemerosotan jumlah pengikut. Penyebab kemerosotan ini antara lain disebabkan oleh munculnya buku *al-khutat* (catatan-catatan sejarah) yang memuat informasi negatif mengenai Mazhab Zahiriyy. Buku tersebut ditulis oleh Ahmad bin 'Ali bin 'Abdul Qadir Abu al-'Abbas al-Husain al-Ubaidi Taqiyuddin al-Magrizi (w. 845 H), ahli sejarah klasik dari Persia.

Inti ajaran dan paham yang berkembang dalam mazhab Zahiriyy berkisar pada persoalan sumber hukum Islam dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami sumber tersebut. Konsekuensi logis dari perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan pendapat dalam masalah fikihnya. mazhab Zahiriyy hanya mengenal tiga sumber hukum, yakni Alquran dan Sunnah sudah cukup untuk menjawab semua tantangan dan masalah. Pendirian tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah *al-Nahl* (16):89 yang berbunyi:

.... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ - ٨٩ -

Artinya "...dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rangka memahami sumber-sumber utama tersebut pengikut mazhab Zahiriy menolah intervensi rasio (*al-ra'yu*) dengan segala bentuknya. Dengan demikian, konsep *istihsan*, *istishab*, dan *takwil* mereka tolak. Akan tetapi, untuk mengatasi persoalan yang belum tersentuh secara jelas oleh nas, baik. Alquran maupun Sunnah, mereka menggunakan pendekatan yang disebut "*al-dalil dan al-Istishab*". *Al-dalil* adalah suatu metode pemahaman suatu nas (*al-Istidal al-Fiqhiy*) yang, menurut mazhab Zahiriy, pada hakikatnya tidak keluar dari nas dan atau *ijma'* itu sendiri. Dengan pendekatan *al-dalil* dilakukan pengembangan suatu nas atau *ijmak* melalui dilalah (petunjuk)-nya secara langsung tanpa harus mengeluarkan '*ilat*'nya terlebih dahulu. Dengan demikian, konsep *al-dalil* tidak sama dengan *qiyas*, sebab untuk melakukan proses *qiyas* diperlukan adanya kesamaan '*ilat*' antara kasus asal dan kasus baru, sedangkan pada *al-dalil* tidak perlu mengetahui '*ilat*' tersebut.

6. Karya-karya Ibn Hazm.

Diantara keistimewaan Ibn Hazm adalah karyanya yang banyak dan beragam yang mempengaruhi pemikiran manusia, banyak pencari ilmu yang belajar dari karya-karya itu. Menurut pengakuan putranya Abu Rafi' al-Fadl bin 'Ali, sepanjang masa hidupnya Ibn Hazm sempat menulis lebih dari 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman.¹⁰⁰ Buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu, tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang di bakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibn Hazm.¹⁰¹ Ibn Hayyan menyebutkan beberapa karya Ibn Hazm yang

¹⁰⁰ al-Z[ahabiy, *Siyar A'lam al-Nubala*, vol. 3, hlm. 325

¹⁰¹ Tragedi pembakaran atas tulisan atau kitab karyanya oleh pihak-pihak yang kurang setuju dengan cara berMazhab dan ijtihadnya, sebagaimana yang dilukiskan olehnya sendiri dalam bait syair: "kalian mampu membakar kertas (kitab) tetapi kalian tidak akan bisa membakar orang yang memiliki kertas (kitab) itu, karena ia ada dalam diriku" Lihat. al-Asqalani, *Lisan al-Mizan*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jilid 4, hlm. 241

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinilainya sangat berharga, meliputi bidang-bidang keilmuan yang beraneka ragam seperti yang berikut:¹⁰²

- a. Di bidang *ilmu jadal* (ilmu debat terhadap paham-paham agama) yaitu: *al-Fasl baina ahl al Ara'i wa al-Nihal, al-Sadi wa al-Raddi* 'ala man kaffara ahl al-Ta'wil min firaq al-Muslim, *Izhhar Tabdil al Yahud wa al-Nasara wa Bayanu Tanaqud ma Biaydihim min huma min ma la Yahtamilut Ta'wil* dan *al-Tawfiq baina al-'Aql wa al-wahyu*.¹⁰³
- b. Di bidang ilmu hadis dan fikih yakni *Syarh Hadis al-Muwatta'*, *Muntaqa al-Ijma'*, *al-Isal ila Fahmi Kitab al-Khisal, Kasyf al-ilbas baina Ashab al-Zhahir wa Ashab al-Qiyas*.
- c. Di bidang politik, *al-Imamat wa al-Siyasah*
- d. Di bidang jiwa, *Akhlaq al-Nafs*.

Adapun daftar buku-buku tulisan Ibn Hazm yang pernah dikumpulkan oleh Ahmad Ibn Nasir Ahmad dengan pengelompokan yang sederhana adalah sebagai berikut:¹⁰⁴ Yang penulis ambil beberapa judul buku saja dengan pengelompokan sederhana sebagai berikut:

Tabel: 1
Di antara Judul Buku Karya Ibn Hazm

BIDANG ILMU	NO	NAMA KITAB
Ilmu Syari'ah (22 Judul)	1	<i>Mulakhkhas Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil</i>
	2	<i>Al-Ijma' wa Masailuh 'ala Abwab al-Fiqh,</i>
	3	<i>Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam</i> . ¹⁰⁵
	4	<i>Al-Nubdat al-Kafiyat fi Usul al-Din.</i>
	5	<i>Ikhtilaf al-Fuqaha al-Khamsat; Malik wa Abi Hanifah wa al-Syafi'i wa Ahmad wa Dawud.</i>

¹⁰² Rahman Alwi, *op. cit.*, hlm. 51

¹⁰³ Munculnya gerakan Protestan pada abad 18 di Eropa disinyalir pula oleh Asin juga terpengaruh oleh Ibn Hazm. Ia memastikan bahwa tokoh Kristen abad 13 M, Tomas Aquinas, benar-benar berhutang besar terhadap proyek pemikiran Ibn Hazm melalui karya Ibn Hazm *al-Tawfiq baina al-'Aql wa al-wahyu*, terutama mengenai kompromi antara akal dan wahyu). Lihat al-Katani, *al-ijthad wa al-Mujtahidun fi al-Maghrib wa al-Andalus*. hlm. 35-50

¹⁰⁴ Rahman Alwi, *op. cit.*, hlm. 33-38

¹⁰⁵ Kitab ini berisikan tentang ilmu *usul fiqh*, dalam kitab ini dijelaskan tentang ia menetapkan dalil hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Ka'im Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu Sejarah
dan politik
(16 Judul)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 6 *al-Izhar lima Syana'a bih 'ala al-Zhahiriyah.*
- 7 *Al-I'rab 'an al-Hiyrat wa al-Iltibas al-Waqi' ina fi Mazhabih Ahl al-ra'yi wa al-Qiyas*
- 8 *Al-Imlau fi Qawa'id al-Fiqh,*
- 9 *Al-Insaf*
- 10 *Al-Isal ila Fahm Kitab al-Khisal al-Jami'ah li Jumal Syarai' al-Islam fi al-Wajib wa al-Sunnah wa al-Ijma'*
- 11 *Kitab fi Man Taraka al-Salat 'Amdan Hatta Kharaja Waqtuha.*
- 12 *Al-Tasaffuh fi al-Fiqh.*
- 13 *Al-Talkhis li Wujuh al-Takhlis.*¹⁰⁶
- 14 *Hajjat al-Wada.*
- 15 *al-Ghina al-Malha al-Mubah Huwa 'am Mahzur.*
- 16 *Majmu' Fatawa Abdullah ibn 'Abbas.*
- 17 *Kitab al-Faraid*
- 18 *Qasr al-Salat.*
- 19 *Al-Muhalla bi al-Atar*
- 20 *Maratib al-Ijma'*
- 21 *Masa'il Usul al-Fiqh*
- 22 *Mas'alat al-Qalb*
- 1 *Asma' al-Khulafa al-Mahdiyyin wa al-A'immat wa al-'Umara' al-Mu'minin wa Asma' al-Wulat min Quraysi wa min Bani Hasyim.*
- 2 *Al-Imamat wa al-Siyasat fi qism Sayr al-Khulafa wa Maratibiha*
- 3 *Ummahat al-Khulafa.*
- 4 *Awqat al-'Umara'*
- 5 *al-Tabyin fi Hal al-Mustafa A'yan al-Munafiqin*
- 6 *Tasmiyat Syuyukh Malik.*
- 7 *Jumal Futuh al-Islam Ba'da Rasu<ullah saw.*
- 8 *Jamharat Ansab al-'Arab.*¹⁰⁷
- 9 *Jawami' al-Sirah.*
- 10 *al-Risalat al-Lazimat li Uli al-'Amr*
- 11 *al-Siyasah.*
- 12 *al-Sirat al-Nabawiyah.*

¹⁰⁶ Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada keentuannya dari nas Alquran maupun hadis]

¹⁰⁷ Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu Kalam
atau Akidah
Tauhid
(18 Judul)

Ilmu Jiwa,
Kesehatan
Mental Dan
Akhlak
(10 Judul)

- 13 *Tarikh al-Adab al-Andalus.*
- 14 *Fahrasat Syuyukh Ibn Hazm,*
- 15 *Nasab al-Barbar.*
- 16 *Muraqabat Ahwal al-Imam.*
- 1 *Asma' Allah al-Husna*
- 2 *Al-'Itiqad*
- 3 *Al-Usul wa al-Furu'*
- 4 *Izhhar Tabdil al-Yahud wa al-Nasara li al-Tawrat wa al-Injil wa Bayan Tanaqud ma bi Aydihim*
- 5 *Al-Iman fi al-Radd 'ala 'itaf Ibn Dunas al-Qayruwani.*
- 6 *Al-Bayan 'an Haqa'iq al-Iman*
- 7 *Hukm Man Qala Inna Arwah Ahl al-Syaqa' Mu'addabat ila Yaum al-Din*
- 8 *Al-Durrat fi Ma Yalzam al-Insan 'Itiqaduh.*
- 9 *Al-Radd 'ala Ibn al-Naghrihlah.*
- 10 *Al-Radd 'ala Anajil al-Nasara.*
- 11 *Al-Radd 'ala man Kaffara al-Muta'awwilin al-Muslimin.*
- 12 *Al-Samadahiyyat fi al-Wa'd wa al-Wa'id*
- 13 *Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal.¹⁰⁸*
- 14 *Mas'alat al-Iman*
- 15 *Mas'alat fi al-Ruh,*
- 16 *Hal li al-Mawi 'Alam am La.*
- 17 *Al-Yaqin fi Naqd Tamwih al-Mu'tazirina 'an iblis wa Sair al-Musyrikina*
- 18 *Al-Nasa'ih al-Munjiyat min Fadail al-Mu'jizat wa al-Qabaih al-Maraddiyat min Aqwal Ahl al-Bida' min al-Firaq al-Arba' al-Mu'taz'ilat wa al-Murji'at wa al-Khawarij wa al-Syi'ah.*
- 1 *Ikhtisar kalam Jalinus fi al-'Arad al-Haddah*
- 2 *Al-Akhlaq wa al-Sayru fi Mudawatal-Nufus.¹⁰⁹*
- 3 *Akhlaq al-Nafs.*
- 4 *Risalat fi Mudawat al-Nufus wa Tahdib al-Akhlaq wa al-Zuhd fi al-Rada'i*
- 5 *Al-Adawiyat al-Mufradah*

¹⁰⁸ Kitab ini berisikan tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitab ini diungkapkan pandangan Ibn Hazm dalam bidang aqidah dan bagaimana cara mengambil dalil atau nas

¹⁰⁹ Kitab ini berisikan tentang sastra Arab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|----|--|
| 6 | <i>Syifa al-Didd bi al-didd</i> |
| 7 | <i>Al-Sa'adat fi al-Tibb</i> |
| 8 | <i>Al-Tibb al-Nabawiy</i> |
| 9 | <i>Tawq al-Hamamat fi al-Ulfat wa al-Ullaf</i> ¹¹⁰ |
| 10 | <i>Ma'rifat al-Nafs bi Ghayriha wa Jahliha bi Zatiha</i> |
| 1 | <i>'Ann al-Qur'an Laysa min Naw'i Balaghat al-Nas</i> |
| 2 | <i>Balaghat al-Hakim.</i> |
| 3 | <i>Bayan al-Fasahat wa al-Balaghat.</i> |
| 4 | <i>Tasmiyat al-Syu'arat al-Wafidina 'ala ibn Abi 'Amir,</i> |
| 5 | <i>Qasidah fi al-Hija Raddan 'ala Qasidah Nafqur</i> |
| 6 | <i>Diwan Syi'rih</i> |
| 1 | <i>al-Taqrif li Hadd al-Mantiq wa al-Madkhal Ilaihi</i> |
| 2 | <i>al-Hadd wa al-Rasm</i> |
| 3 | <i>Mas'alah Hal al-Sawad Lawn Am La.</i> |
| 1 | <i>Risalat fi Ayat "Fa in Kunta fi Syakk Mimma Anzalna</i> |
| 2 | <i>Ilayk." (Surah Yunus: 94)</i> |
| 3 | <i>Al-Qira'at al-Masyhurat fi al-Amsar al-Atiyat Majia al-</i> |
| 4 | <i>Tawatur</i> |
| 5 | <i>Tafsir Surat Yusuf al-Ayat 110.</i> |
| 6 | <i>Ajwibah 'Ala al-Masa'il al-Mustaghrabat min al-</i> |
| 7 | <i>Bukhari li Ibn 'Abd al-Barr</i> |
| 8 | <i>Asma al-Sahabat al-Ruwat wa Ma Likullin min al-'Adad</i> |
| 9 | <i>Ashab al-Fatya min al-Sahabat wa Man ba'dahum 'ala</i> |
| 10 | <i>Maratibihim fi Katsratihim al-Fatya</i> |
| 11 | <i>Awham al-Sahihain</i> |
| 12 | <i>Bayan Ghalat 'Utsman ibn Sa'id al-A'war fi al-Musnad</i> |
| 13 | <i>wa al-Mursal</i> |
| 14 | <i>Al-Jami' fi Sahih al-Hadis bi al-Ikhtisar al-Asanid</i> |
| 15 | <i>'Adad li Kulli Sahih fi Musnad Baqi Ibn Mukhallad</i> |
| 16 | <i>Mukhtasar Kitab fi al-Rijal</i> |
| 17 | <i>Al-atar Allati Zahiruha al-Ta'arud wa Nafy al-Tanaqud</i> |
| 18 | <i>'anha</i> |
| 19 | <i>Muhim al-sunnah</i> |
| 20 | <i>Al-Nasikh wa al-Mansukh</i> |

¹¹⁰ Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jafativa, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis oleh Ibn Hazm, isinya mengenai otobiografinya, meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.

Beberapa kitab karya Ibn Hazm yang sangat bernilai dan banyak menjadi rujukan para cendekiawan kontemporer antara lain:¹¹¹

- a. *Tauq al-Hamamah fi al-Ulfat wa Ullaf*, kitab ini ditulis pada tahun 418 H di Jativa, merupakan kitab yang pertama yang ditulis oleh Ibn Hazm. Semacam otobiografi, meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Kitab ini ditulis dengan bahasa sastra yang indah dan tinggi banyak memuat sya'ir-sya'ir tentang cinta.
- b. *Nagt al-'Urus fi al-Nawadir*, merupakan kitab sejarah para Khalifah dan pembesar di Spanyol di masa Ibn Hazm hidup.
- c. *al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal*, dalam kitab ini Ibn Hazm mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang agama-agama dan aliran-aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab perbandingan pertama yang sangat komprehensif.¹¹²
- d. *Al-Muhalla bi al-Atsar Syarh al-Mujalla bi al-Ikhtisar*, kitab ini terdiri dari 11 jilid dan merupakan kitab yang menghimpun masalah-masalah fikih dari berbagai Mazhab disertai kritik dan komentar Ibn Hazm. Dalam kitab ini terlihat begitu kuatnya Ibn Hazm berpegang kepada arti zahir nas dengan mengemukakan dalil-dalil baik dari Alquran maupun hadis yang diriwayatkan melalui jalur-jalur gurunya. Kitab ini adalah karya monumental Ibn Hazm di bidang fikih dan juga merupakan representasi dari fikih Mazhab Zahiri, juga menghimpun pendapat-pendapat fikih dari kalangan sahabat dan *tabi'in*.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 52-53

¹¹² Migul Asin Palacios menyebutkan bahwa Ibn Hazm adalah tokoh pertama yang melakukan studi kritis terhadap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ibn Hazm dianggap berjasa besar karena telah menjadi pioner dalam sejarah studi terhadap Bibel, yang sampai beberapa abad ka'nya belum mampu disamai oleh karya-karya lainnya. Lihat: [http://www.tastAbigu.com/2015/05/biografi Ibn Hazm](http://www.tastAbigu.com/2015/05/biografi%20Ibn%20Hazm), diunduh 5 Desember 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, kitab ini terdiri atas 8 jilid yang merupakan kitab usul fikih Mazhab Zahiriy, Dalam kitab ini Ibn Hazm mengungkapkan metode *ijtihad-nya* yang mengandalkan kepada kemampuan memahami bahasa serta banyak mengkritik metode *ijtihad bi al-ra'yi* seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istislah* yang digunakan ulama Mazhab lainnya dalam *istinbat* hukum.

Melalui karya-karyanya yang demikian banyak, nama Ibn Hazm menjadi terkenal, banyak orang yang datang belajar padanya, sekalipun banyak ulama yang merasa tidak senang kepadanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ibn Hazm adalah seorang mujtahid dan pengembang Mazhab Zahiriy di Spanyol dan sekaligus juga sebagai tokoh pemikir dan ilmuwan yang terkemuka yang pernah ada di dunia Islam.

Karya-karyanya itu merupakan kontribusi berharga bagi khazanah pemikiran Islam, karena memberi pengaruh sangat besar bagi penyebaran ide serta paham-paham pemikirannya di dunia Islam pada masa sesudahnya. Sesungguhnya perjalanan Ibn Hazm banyak menghadapi kesusahan dan fitnah dari orang-orang sezamannya. Hal ini dikarenakan kebanyakan ulama dan ahli hukum (*fuqaha*) sering menghina. Sedikit sekali dari mereka yang menyadari dan mengetahui posisi dan keilmuannya. Keadaan ini sering dialaminya sampai ia meninggal dunia. Ada beberapa alasan mengapa para ulama dan musuhnya senantiasa berbuat demikian:

- a. Keras kata-katanya dan kritiknya pada para Imam, karena pendapatnya membuat lawannya sangat terpukul dan tidak senang. Mereka, para tokoh, menghina dan menganggapnya kafir serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperingatkan para penguasa dan masyarakat agar berhati-hati terhadap pendapatnya, sehingga akhirnya mereka mengusir Ibn Hazm dari negeri mereka.¹¹³

b. Ketidak patuhan Ibn Hazm terhadap pemerintah dan ahli hukum (*fuqaha*) serta penolakannya menerima petunjuk-petunjuk mereka seperti halnya sebagian ulama. Penolakan ini dilakukan karena menjunjung tinggi ilmu dan akhlaknya serta menolak cara-cara penyelewengan sebagian mereka yang bersekongkol dengan kaum Kristen, mereka melakukan perbuatan dan akhlak yang bertentangan dengan syari'at Islam. Allah telah memberi keteguhan hati kepada Ibn Hazm yang mampu menyuarakan kebenaran dan tidak mengikuti (kesalahan) seorang pun dari manusia. Sebagai sejarawan, Ibn Hazm mencatat beberapa kelemahan para pemimpin pada masanya yaitu penghancuran terhadap agama dan pemerintahan demi kepentingan dunia. Tidak diragukan lagi sikap Ibn Hazm ini mendatangkan pertentangan yang tajam antara ia dan para ahli hukum dan ini juga menjadi sebab permusuhan mereka terhadap Ibn Hazm. Mereka menghina, meremehkan dan mempersempit ruang gerak Ibn Hazm.

c. Karena Ibn Ham meninggalkan Mazhab Imam Malik yang merupakan mazhab penduduk negeri Andalusia pada masanya, dan berpindah (pada mulanya) ke mazhab Imam Syafi'i sebelum kemudian ia menganut mazhab Zahiriyy secara mandiri tanpa bergantung pada Imam-Imam mazhab. Inilah salah satu penyebab terciptanya pertentangan keras antara Ibn Hazm dan masyarakat sehingga ia tidak tenang sampai kemudian meninggalkan

¹¹³ Yaqut, *Mu'jam al-Udaba'* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), jilid XII, hlm. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan dan dunia.

- d. Sikapnya yang keras menolak keyakinan agama Yahudi dan menyingkap adanya pemalsuan pada beberapa kitab agama lain untuk menegaskan bahwa kitab-kitab dan agama-agama itu adalah buatan manusia, tidak mungkin berasal dari Tuhan.¹¹⁴

Pada masanya, Para pembesar Yahudi menempati posisi penting dalam pemerintahan dan dimanfaatkan untuk memfitnah umat Islam dengan cara mengejek pemikiran kitab suci mereka serta membuat tuduhan atau prasangka buruk atas orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Tipu daya kaum Yahudi ini sudah tidak asing lagi dalam setiap waktu dan tempat. Sebagian dari tokoh yang memiliki perbedaan pendapat sangat tajam dengan Ibn Hazm adalah Imam Abu Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji yang mengembara ke negeri timur dan bertemu dengan beberapa ulama di sana. Dalam pengembaraannya itu, ia menetap selama 13 tahun antara negeri Irak dan Hijaz, dan setelah kembali, ia menjumpai Ibn Hazm yang dipandang memiliki penguasaan yang bagus atas ilmu kalam. Dalam berdebat dan beradu argumen, al-Baji mampu mengalahkan tokoh Maliki. Ia lalu pergi ke negeri Mayorca seraya dibantu masyarakat dan tokoh disana untuk mengalahkan Ibn Hazm, sampai kemudian mereka berhasil mengeluarkan Ibn Hazm dari negeri tersebut.¹¹⁵

Allah mengasihi Ibn Hazm sehingga permusuhan yang terjadi dengan al-Baji, tidak mencegahnya untuk mengakui al-Baji. Bahkan tentang al-Baji Ibn

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Dalam sebuah penggalan yang sangat populer dikisahkan bahwa al-Baji berujar: "Derajuku lebih tinggi dari derajatmu dalam menuntut ilmu. Karena saat engkau menuntut ilmu, engkau memiliki seluruh yang engkau butuhkan untuk belajar. Engkau belajar pada malam hari di istana dengan lampu yang terbuat dari emas, sementara aku hanya mengandalkan lampu pasar". Ibn Hazm menjawab: "Perkataanmu justru bisa menyerangmu. Engkau menuntut ilmu dalam kondisi di mana engkau mengharapkan bisa berada pada kondisiku. Sementara aku belajar dalam keadaan mapan tidak untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah". Lihat. Ibn Khalikan, Wafayatu al-A'yan, vol. 3, hlm.325. "Debat publik" antara Ibn Hazm dan al-Baji ini mendapat perhatian khusus dari Abd. Majid Turki guru besar kajian Islam dari universitas Sorbone Perancis, dia berhasil merangkum data-data perdebatan antara Ibn Hazm dan Abu al-Walid al-Baji - tokoh Mazhab Maliki yang saat itu disegani - dalam sebuah buku yang diberi title *al-Munadzarat fi Usul al-Syari'ah baina Ibn Hazm wa al-Baji* (Perdebatan seputar dasar syari'at antara Ibn Hazm dan al Baji).



Hazm mengakui bahwa seandainya tidak ada pengikut Mazhab Maliki, setelah ‘Abdul Wahab, selain al-Baji, niscaya sudah cukup bagi mereka.

Sebagian dari tokoh yang berlaku tidak fair dan curang terhadap Ibn Hazm adalah al-Imam Abu Bakar Ibn al-'Arabi (bukan tokoh sufi) penyusun kitab *al-'Awasiim min al-Qawasim*. Ia banyak menghujat Ibn Hazm dan menyatakan dengan gambaran-gambaran dan ungkapan-ungkapan yang tidak akan dikatakan oleh orang-orang berakal, apalagi oleh ulama-ulama yang bersih.

Perselisihan ini memberi pengaruh besar terhadap karya-karya Ibn Hazm yang telah menghasilkan warisan intelektual dan tradisi ilmiah yang besar yang memperindah sejarah dan juga melestarikan akidah dan warisan intelektual umat Islam.

B. Mazhab Zahiri sebelum Ibn Hazm

Sebagaimana disebutkan, pendiri mazhab Zahiri adalah Dawud bin ‘Ali bin Khalaf al-Asbihani (w. 270 H). Penamaan mazhab Zahiri, sebagai dikemukakan al-Syatibi, bertalian erat dengan pembatasan mazhab ini terhadap acuan untuk mengetahui *magashid al-Syari*’ pada penjelasan *nas* sesuai dengan pendekatan kebahasaan. Adapun makna substansial yang dihasilkan oleh penelitian terhadap *nas* Alquran dan Sunnah, tapi tidak dikehendaki lalaz berdasarkan penciptaan kebakasaannya, sama sekali ditolak. Alasannya, tujuan *Syari*’ tidak dapat diketahui sama sekali atau tidak dapat diketahui seutuhnya, sehingga ada pemberitahuan dari-Nya. Pemberitahuan tersebut berbentuk *tashrih kalami* (penjelasan kewahyuan).¹¹⁶

¹¹⁶ Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz II, *loc. cit.*, hlm. 273-275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dawud memiliki komitmen yang kuat kepada Sunnah. Sebelum memunculkan mazhabnya, Dawud adalah pengagum dan pengikut mazhab Syafi'i. Ia mempelajari pemikiran al-Syafi'i melalui murid ashabnya, seperti Abu Tsaur, dan melalui kitab-kitab peninggalannya. Kekagumannya itu disebabkan komitmen al-Syafi'i yang amat kuat terhadap Sunnah. Fikih menurutnya identik dengan *nas* atau *haml 'ala al-nas* (mempersamakan sesuatu dengan hukum dalam *nas*). Akan tetapi keSyafi'iyahannya hanya bagian dari proses ke arah pembentukan dan kemandiriannya dalam berfikir dan *ijtihad*. Dalam perkembangannya setelah menguasai hadis, ia memunculkan aliran Zahiri.

Dalam *ijtihad* Dawud hanya bersandar pada *nas* dan *ijma'* dan menolak *qiyas*. Sebagaimana dikutip oleh al-Syahrastani, Dawud menyatakan bahwa keumuman Alquran dan Sunnah telah mencakup keseluruhan hukum. Apa yang tidak dinyatakan *nas* Allah memaafkannya. Kemudian Dawud tidak membolehkan *qiyas*, karena sumber hukum menurutnya hanyalah Alquran, Sunnah dan *ijma'*. *Qiyas* pertama kali dilakukan oleh Iblis, demikian kata Dawud.¹¹⁷ Selanjutnya Dawud menolak penggunaan *istihsan*. Menetapkan hukum berdasarkan *qiyas*, katanya, tidak wajib dan berdasarkan *istihsan* tidak boleh. Tidak seorangpun boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Nabi saw. dengan alasan ia menyerupai apa yang diharamkannya, kecuali apabila ia menegaskan keharamannya. Misalnya, Nabi mengatakan bahwa gandum haram dijual dengan sesama gandum karena ia ditakar. Cucilah baju ini, karena ada noda darah padanya. Bunuhlah ini, karena hitam. Dari kalimat tersebut diketahui alasan hukumnya adalah hitam. Mengikutinya secara

¹¹⁷ Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), hlm. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'abbudi (patuh apa yang dinyatakan *nas*) cukup jelas. Selebihnya termasuk yang didiamkan dan dimaafkan.¹¹⁸

Dawud pernah ditanya: “Bagaimana anda membatalkan *qiyas*, sedang al-Syafi’i berpegang padanya? Ia menjawab: “Saya mengambil dalil dan argumen al-Syafi’i dalam membatalkan *istihsan*, maka saya mendapati dalil tersebut dapat membatalkan kehujjahan *qiyas*. Berdasarkan itu, saya membatalkan *qiyas* sebagaimana al-Syafi’i membatalkan *istihsan*.¹¹⁹ Dengan penolakan tersebut, ia tidak menjadikan ‘*illat* hukum sebagai dasar *ijtihad*nya. Akan tetapi ia memperlakukan keumuman makna suatu *nas* pada segala sesuatu yang terbukti mempunyai ‘*illat* yang sama dengan ‘*illat* yang disebutkan di dalam *nas*. Atas dasar itu, tak heran kalau sebagian ulama menilainya tak sepenuhnya menolak *qiyas*. Ia hanya menolak *qiyas* yang tak jelas ‘*illat* hukumnya dan tetap menerima *qiyas* yang jelas ‘*illatnya*.¹²⁰ Dengan beberapa kecenderungan tersebut, Dawud banyak berbeda pendapat dengan empat mazhab sunni (*mazahib al-arba’at*). Akibatnya, ia banyak

¹¹⁸ Al-Subki, *Tabaqat al-Syafi’iyyat al-Kubra*, (Kairo: Matba’at ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakauhu, 1964), Jilid II, hlm. 290.

¹¹⁹ Abu Zahrah, Ibn Hazm, *op. cit.*, hlm. 265. Al-Subki, *loc. cit.*

¹²⁰ Ibn al-Subki mengutip pendapat ashab al-Syafi’iyyah yang tidak mengakui pendapat golongan Zahiri yang berbeda dengan jumhur fukaha dalam persoalan *furu’* secara mutlak. Menurut Abu Ishaq al-Isfihani, penolakan tersebut merupakan pendapat jumhur. Mereka mengatakan, orang-orang yang menafikan *qiyas* tidak mencapai peringkat mujtahid dan tidak boleh diberikan kewenangan menjadi qadi. Imam al-Haramain memilih dan menisbahkan pendapat ini kepada ahli *tafiq*. Katanya: “Para *muhaqqiq* dari ulama Syafi’iyyah sama sekali tidak memperhitungkan golongan Zahiri” Qadi Abu Bakar mengatakan: “Saya tidak mengakuinya sebagai ulama umat dan tidak memperdulikan pendapat mereka yang berbeda maupun yang sama” *Ibid*, hlm. 45. Mazhab Zahiri juga dituduh menyerupai golongan Khawarij yang menyerukan untuk mengikuti zahir Alquran tanpa penalaran dan perenungan maksudnya. Oleh karena itu, kata Syatibi, sebagian ulama mencela pemikiran Dawud Zahiri dan menyebutnya sebagai bid’ah yang muncul setelah tahun 200 H. Lihat: Al-Syailibi, *al-Muwafaqat*, IV, *op. cit.*, hlm. 19. Sementara itu, sebelum mereka, Najm al-Din al-Tuff menganggapnya sebagai jumud (beku). Katanya: Ulama telah berijma’ tentang penetapan ‘*illat* suatu hukum (ta’lil ahkam) berdasarkan kemaslahatan dan menghindari kenisakan, kecuali golongan Zahiri yang jumud dan tidak diakui pendapatnya. Lihat: ‘Abd al-Wahab al-Khallaf, *Masadir al-Tasyri’ fi ma’ala Nassha fih*, (Kuweit: Dar al-Qalam, tth.), hlm. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapat tantangan dan tentangan dari *fuqaha* keempat mazhab itu.¹²¹ oleh karena itu, mazhabnya kurang begitu berkembang, palagi ia muncul jauh di belakang mereka. Akibat kezahiriannya, ia juga banyak mengemukakan pemikiran dan pendapat yang ganjil, kontroversial dan menyalahi pendapat jumur ulama, Misalnya, ia berpendapat Alquran adalah makhluk,¹²² orang yang junub dan perempuan yang haid boleh menyentuh mushaf Alquran,¹²³ dan lainnya oleh karena itu, pendapat-pendapatnya kurang diterima masyarakat, dan ulama tidak banyak meriwayatkan hadis darinya.

Betapapun demikian, tidak semua orang menilainya negatif. Keteguhan komitmennya kepada Sunnah menjadi daya tarik tersendiri bagi sementara orang di tengah merebaknya penalaran hukum yang cenderung berlebih-lebihan dan mengabaikan *nas*. Tidak heran, ia juga memiliki banyak murid yang kemudian meneruskan doktrinnya. Bahkan pada abad III dan IV H., mazhabnya lebih populer dan lebih banyak pengikutnya dibanding mazhab Hanbali yang muncul lebih dulu. Mazhabnya menempati peringkat, keempat sesudah mazhab Hanifah, Syafi'i, dan Maliki. Mazhab Hanbali mengalami kemajuan pesat setelah kemunculan Qadi Abu Ya'la pada abad V H. yang berjuang keras untuk menghidupkan dan menaikkan pamor mazhab ini sehingga mampu menggeser mazhab Zahiri ke urutan kelima.¹²⁴

Perkembangan mazhab Zahiri tersebut tidak lepas dari kegigihan Dawud dalam menyebarkan doktrinnya kepada para muridnya dan pembukuan karya-karyanya yang lebih cocok disebut sebagai fikih Sunnah,

¹²¹ Al-Bagdadi *Tarikh*, juz VIII, *op. cit.*, hlm. 373-374.

¹²² *Ibid.*, hlm. 373-374.

¹²³ *Ibid.* Lihat juga: Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar*, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), hlm. 94.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 268. Pendapat ini dikutip Abu Zahrah dari al-Kautsari dalam *Muqaddimah al-Nabz*. Penilaian positif, terhadap Dawud Zahiri dan mazhabnya banyak dikemukakan oleh ulama Hanabilah. Lihat. Arif Khalil Muhammad, Abu 'Ubaid, *al-Imam Dawud al-Zahiri wa Asaruhu fi al-Fiqh al-Islami*, (Kuweit: Dar al-Arqam,) 1984, hlm. 144. Penilaian positif mereka itu wajar, karena mereka sama-sama punya komitmen yang kuat pada Sunnah sehingga fikih kedua mazhab itu berdekatan.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kepadatan muatan Sunnah di dalamnya.¹²⁵ Buku-buku tersebut telah hilang dan tak tersisa lagi, baik dalam bentuk cetakan maupun manuskrip.¹²⁶

Dawud mempunyai murid yang cukup banyak. Dinyatakan bahwa pada majelisnya terdapat lebih kurang empat ratus orang murid yang berserban hijau.¹²⁷ Di antara murid-muridnya itu ada yang menjadi ulama yang cukup menonjol, seperti: Ibrahim bin Muhammad Naftawaih, seorang ahli nahwu di samping ahli fikih,¹²⁸ Zakaria bin Yahya al-Saji,¹²⁹ ‘Abbas bin Muhammad Muzakkar,¹³⁰ Muhammad bin Dawud,¹³¹ dan Yusuf bin Ya’qub serta ‘Abdullah bin al-Muglis,¹³² Banyaknya murid Dawud yang berpengetahuan luas turut memberikan andil bagi penyebaran doktrin mazhab ini, baik kepada murid mereka maupun masyarakat di sekitarnya. oleh karena itu,

¹²⁵ Ibn Khalikan, *Wafayat*, IV, *op. cit.*, hlm. 256.

¹²⁶ Ibn Hazm juga menyebutkan beberapa nama muridnya, antara lain yang menetap di Bagdad ialah: Muhammad bin Dawud, puteranya; ‘Abdullah bin Muhammad bin al-Mughlis, ‘Abdullah bin Muhammad bin Ruwaim, ‘Abdullah bin Muhammad al-Radi; Abu Tayyib Muhammad bin Ahmad al-Dayyaji, Abu Bakar bin Najjar, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Awani, dan al-Khallal. Lihat Ibn Hazm, *al-Ihkam*, V, *op. cit.*, hlm. 96.

¹²⁷ Ia digelar Naftawaih karena kemahirannya dalam ilmu nahwu. Ia lahir di Wasit tahun 244 H. dan wafat tahun 323 H. di Bagdad. Ia dikenal sebagai seorang fakih yang menguasai mazhab Zahiri, pembela dan pemukanya, Lihat: al-Zahabi, *Mizan al-I’tidal*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), hlm. 64. Lihat pula: al-Bagdadi, *Tarikh*, VI, *op. cit.*, hlm. 158.

¹²⁸ Ibn al-‘Imad mengatakan bahwa Zakaria adalah seorang pemimpin fukaha. Nama lengkapnya adalah Abu Yahya Zakaria bin Yahya bin ‘Abd al-Rahman bin Adi al-Dabi al-Bashri al-Saji, wafat tahun 307 H. Syazarat, II, *op. cit.*, hlm. 250.

¹²⁹ Ia dikenal dengan nama Abu al-Fadl al-Muzakkar. Ia meriwayatkan hadis dan Dawud Zahiri. Lihat: Al-Bagdadi, *Tarikh*, XII, *op. cit.*, hlm. 156.

¹³⁰ Ia adalah putera dari Dawud Zahiri, dikenal dengan panggilan Abu Bakar. Ia lahir pada tahun 255 H. dan wafat tahun 297 H. dalam usia 42 tahun. Ia didik ayahnya dalam mendalami mazhab Zahiri dan menjadi penerusnya sepeninggal ayahnya. Ia mempunyai sejumlah karya. Di antaranya adalah al-Zahraf, sebuah kitab kumpulan puisi. Kemudian *al-Wshul li Ma’rifat al-Usul*, dan *al-Ikhtisar ‘ala Muhammad Ibn Jarir wa ‘Abdullah Ibn Syarsair, wa Isa Ibn Ibrahim al-Jarir*, dan lainnya. Demikian dinyatakan oleh Ibn Khatikan, *Wafayaf*, III, *op. cit.*, hlm. 261. Sementara itu al-Shafdi menyebutkan beberapa judul buku lainnya, yaitu *Makhtar al-Asyraf*, *al-Ijaz fi al-Fiqh*, *Ikhtilaf Masail Sahabat*, *al-Faraid*, *al-Manasik*, dan *al-Intisahar li Abihi min al-Nasyi’ al-Munakallimin*. Lihat: Al-Shafdi, al-Wafi bi al-Watayaf, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), jilid III, hlm. 58-59.

¹³¹ Al-Bagdadi, *Tarikh*, *op. cit.*, hlm. 319.

¹³² Ia seorang pemimpin mazhab Zahiri pada masanya dan wafat pada tahun 320 H. Ia mempunyai sejumlah karya ilmiah, di antaranya ialah *al-Muwaddat*, *al-Munjih*, *al-Mufshah*, *Alkam Al-Qur’an*, dan kitab *al-Talaq*. Al-Bagdadi, *Tarikh*, XII, hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sampai batas tertentu mazhab ini mampu berkembang baik, meskipun tidak sepesat mazhab Hanifah, Maliki, dan Syafi'i.

Sepeninggal mereka masih cukup banyak yang mendukung dan membela mazhabnya. Di antaranya ialah: Ahmad bin Muhammad al-Qadi al-Mansuri,¹³³ 'Abd Allah bin 'Ali bin Husain bin Muhammad al-Nakhai,¹³⁴ dan 'Abd al-Aziz Ahmad al-Jazri al-Asfihani.¹³⁵ Di samping nama-nama tersebut, Ibn al-Nadim juga menyebut-nyebut nama 'Abd al-Mun'im bin Tulail al-Tamimi al-Nasafi (w. 346 H.), seorang yang terkenal ketaatannya dan disebut-sebut sebagai pengikut Dawud.¹³⁶ Abu al-Mahasin sebagai dikutip oleh Ignas Golziher menyebut nama Basran 'Abdullah bin 'Ali al-Wardiri, seorang hakim kepala (w. 375 H.) sebagai syaikh *ahl al-Zahir*.¹³⁷

Secara geografis, dari Irak mazhab ini disebarkan oleh para murid Dawud ke bagian lain dari dunia Islam. Mazhab ini antara lain mendapat sambutan baik di Asia Tengah dan meluas ke Iran, di mana Syiraz khususnya, menjadi pusat mazhab. Pada fase awal sejumlah penganut teosofi Islam bergabung dengan fikih Dawud dalam bidang ibadah. Beberapa orang sufi Zahiri ialah: Al-Baghdadi Ruwaim bin Ahmad Abu Muhammad (w. 303 H.). Kemudian dari muridnya ditemukan al-Syirazi Muhammad bin Khafif bin Isfiksad ad.-Dabbi (w. 371 H.

¹³³ Dodge Bayard, *op. cit.*, hlm. 532.

¹³⁴ Ia seorang fakih mazhab Zahiri pada masanya di Khurasan. dan wafat di Bukhara pada bulan Jumadi al-Ula tahun 371 H. Lihat: *al-Lubab fi Tahzib al-Ansab*, (Beirut: Maktabat al-Quds, tth.), Jilid II, hlm. 215.

¹³⁵ Ia seorang ulama Zahiri pada masanya dan juru bicara dalam mazhabnya. Abu 'Abdullah al-Shairani mengatakan: "Aku tidak melihat seorang ahli fikih yang lebih pandai dalam diskusi dan pada al-Asfihani dan Abu Hamid al-Isfiryani. Ibn Nadim, *al-Fihrisit*, *op. cit.*, hlm. 320.

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 266-219.

¹³⁷ Ignas Golziher, *The Zahiris: Their Dactrine and Their History*, Leiden: E.J Brill, 1971, hlm. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam usia lebih dari seratus tahun). Ia adalah syaikh al-Shufiyah di berbagai kota di Persia pada masanya.¹³⁸

Al-Maqdisi, seorang penulis geografi terkenal yang mempunyai perhatian mendalam terhadap ilmu *Usul* fikih, sebagai dikutip Golziher, menginformasikan perluasan dan pengaruh mazhab Zahiri pada abad keempat Hijriah. Dalam uraiannya ditemukan bahwa pendukung mazhab ini bukan hanya orang terpelajar atau ulama, akan tetapi juga masyarakat awam. Mazhab ini membentuk suatu masyarakat yang tertutup dan membuat propaganda guna menyebarkan ajaran-ajarannya. Mereka berkembang pesat dan berpengaruh di Iran. Sejumlah pengikutnya menduduki jabatan penting di bidang administrasi dan peradilan. Di antara mereka, misalnya ialah Qadi Abu al-Qasim ‘Ubaidillah bin ‘Ali al-Nakha’i (w. 376 H.) yang bertugas di Khurasan, murid al-Mahamili yang dikenal tidak sependapat dengan mazhab Zahiri, ia mengakuinya sebagai salah satu ekspresi yang benar dari semangat keislaman.¹³⁹ Kata al-Maqdisi, mazhab ini berkembang ke Sind dan Oman. Di Sind Qadi Abu Muhammad al-Mansuri¹⁴⁰ disebut-sebut sebagai contoh yang representatif dari tokoh mazhab ini. Hanya saja sejauh ini tidak ditemukan bekas mazhab ini di Syria dan Magribi yang didominasi oleh mazhab Hanifah dan Maliki. Mazhab ini baru dikenal di Magribi setelah kehadiran Ibn Hazm ke kawasan ini pada masa perantauannya setelah kehancuran dinasti Umayyah di Andalusia. Pengikutnya sempat berkembang banyak dan mereka menamakan kelompok mereka sebagai

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 105.

¹³⁹ Golziher, *op. cit.*, hlm. 107.

¹⁴⁰ Ia mengembangkan mazhab Zahiri ini melalui pengajaran lisan dan sejumlah karya tulisnya, *Ibid*, Lihat pula: Dodge Bayard, *loc. cit.* hal, 532-533.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

al-Hazmiyyah atau pendukung atau pengikut garis pemikiran atau mazhab Ibn Hazm.

Mazhab Zahiri masuk ke Andalusia melalui ulama negeri ini yang kembali dari menuntut ilmu ke dunia Timur Islam. Pada abad ketiga Hijriah ada sekelompok besar ulama Cordova yang mengadakan rihlah ilmiah ke Dunia timur Islam, khususnya kawasan Irak, untuk menuntut ilmu. Di antara mereka ada yang sempat bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, Dawud Zahiri dan lainnya. Tradisi rihlah ilmiah ini berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan sebaliknya, sesudah generasi awal tersebut tidak kurang pula ulama dari kawasan Timur yang bermigrasi ke Barat atau Andalusia. Melalui cara tersebut, mazhab selain Maliki mulai dikenal di Andalusia, termasuk mazhab Zahiri. Di antara para perantau awal itu terdapat tiga ulama kenamaan, yaitu: Baqi' bin Mukhallad (w. 276 H.)¹⁴¹ Muhammad bin Waddah (w. 286 H.),¹⁴² dan Qasim bin Asbag (w. 330 H.)¹⁴³ Akan tetapi Tahir Ahmad Makki menulis, bahwa masuknya mazhab Zahiri ke Andalusia bersamaan dengan masuknya mazhab Syafi'i ke sana, yakni melalui 'Abdullah bin Muhammad bin Qasim bin Sayyar (w. 272 H./885 M.) pada pertengahan abad

¹⁴¹ Baqi bin Mukhallad adalah seorang ulama yang amat dikagumi oleh Ibn Hazm dan mempunyai karya yang melebihi Ibn Jarir. Ia pernah merantau ke Dunia Timur Islam dan bertemu dengan Imam Ahmad dan lainnya. Baqi' lahir pada tahun 200 H. Ia kembali ke Andalusia dan memasukkan warna baru dalam kajian fikih di sana, yang selama ini didominasi taklid pada mazhab Maliki dan tidak mengenal mazhab lainnya. Kajian hadis berkembang dan kajian fikih tidak lagi terbatas pada mazhab Maliki saja, tetapi juga mazhab-mazhab lainnya. Baqi adalah sosok seorang mujtahid, tidak bertaklid dan wafat tahun 276 H. Lihat biografinya dalam: *Al-Maqarri Naf al-Tib fi Gushn al-Andalus wa Zikr Wazirih*, (Beirut: al-Rifa'i, tth.), jilid VI, hlm. 113.

¹⁴² Ia semasa dengan Baqi bin Mukhallad dan pernah menuntut ilmu ke dunia Timur Islam dan menetap di Cordova sekembalinya dari perantauannya. Ia seorang muhaddis terkenal dan dengan penyebarannya terhadap hadis, maka ia termasuk orang yang memberikan jalan bagi fikih mazhab Zahiri yang bersandar kepada nas. Ia wafat tahun 286 H. Lihat biografinya di Hamisy (catatan pinggir) *al-Maqarri*, IV, *op. cit.*, hlm. 13.

¹⁴³ Ia murid Baqi bin Mukhallad dan Ibn Waddah. Ia juga mengembangkan ilmu hadis dan menetap di Andalusia. Dengan langkahnya itu, kata Abu Zahrah, ia telah memberi jalan bagi fikih mazhab Zahiri. Ia pernah merantau ke dunia Timur Islam dan wafat pada tahun 330 H. Lihat: Abu Zahrah, *Tarikh*, *op. cit.*, hlm. 271-272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IX Masehi atau pertengahan abad ketiga Hijriah. Walaupun ia seorang Syafi'iyah, ia juga turut memperkenalkan mazhab Zahlri.¹⁴⁴ Perbedaan tersebut sebenarnya tidak begitu prinsipil, karena masa hidup mereka yang berdekatan dalam generasi yang sama. Kesemuanya dapat diterima sebagai para perintis masuknya mazhab selain Maliki ke Andalusia, termasuk mashab Zahiri.

Pada abad IV Hijriah muncul seorang ulama yang menyerukan mazhab ini, Munzir bin Sa'id al-Baluti (w. 355 H.).¹⁴⁵ Ia seorang orator dan Qadi di Cordova. Hanya saja dalam memutuskan perkara ia berdasarkan mazhab Maliki sesuai dengan kemauan penguasa. Ibn Hazm sendiri sempat bertemu dengan putranya, Sa'id bin Munzir yang telah amat tua pada tahun 403 H. menjelang ia wafat.¹⁴⁶ Setelahnya muncul pula seorang ulama Zahiri lainnya, yaitu Mas'ud bin Sulaiman bin Muflit (w. 426 H.),¹⁴⁷ guru Ibn Hazm yang banyak mempengaruhinya.

C. Kecenderungan Ibn Hazm Kepada Mazhab Zahiri

Ibn Hazm adalah putra pejabat dinasti Umayyah di Andalusia pada masa Khalifah Hisyam bin al-Hakam al-Mu'ayyad (366-399 H.). Di bawah pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu Amir al-Qahtani (w. 392 H.) dan Hajib 'Abd al-Malik al-Muzaffar (w. 399 H./ 1009 M.), Sa'id bin Ahmad (w. 402 H.), ayah Ibn Hazm menjabat sebagai wazir.¹⁴⁸

¹⁴⁴ Lihat: Tahir Ahmad Makki, *Dirasat 'an Ibn Hazm wa Kitabuhu Tauq alHamamat*, (Kairo: Maktabat Wahbat 1976), hlm. 56.

¹⁴⁵ 'Abu Zahrah, Ibn Hazm, *op. cit.*, hlm. 272-273

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Lihat: Ibn Hazm, *Tauq al-Hamamat fi al-Ulfati wa al-Allaf*, (Kairo: Dar alMa'arif, 1977), hlm. 140.

¹⁴⁸ Ibn Khalikan, *Wafayat*, III, *op. cit.*, hlm. 328.

Ibn Hazm tumbuh dalam asuhan para inang pengasuh yang terdiri dari kaum wanita terpelajar. Ibunya meninggal dunia ketika ia masih sangat kecil. Dari mereka ia mengenyam pendidikan awalnya pada masa kanak-kanak. Mereka mengajarkan kepadanya baca tulis, membaca dan memahami maksud Alquran serta syair-syair Arab.¹⁴⁹ Setelah itu Ibn Hazm diserahkan kepada Abu ‘Ali al-Husain bin ‘Ali al-Fasi, seorang ulama yang mengesankan hatinya, baik dari segi ilmu, amaliah dan kewartakannya. Di bawah bimbingannya ia mulai menuntut ilmu secara intensif dengan menghadiri berbagai Majelis ilmiah, baik bidang agama maupun umum, seperti majelis Abu al-Qasim ‘Abd al-Rahman bin Yazid al-Azdi¹⁵⁰ dan lainnya. Ia pertama kali mendengarkan kajian hadis dari Abu Amir bin al-Jasur sekitar tahun 400 H. dalam usia 16 tahun.¹⁵¹ Perlu ditegaskan, bahwa hadis dan fikih pada era itu merupakan dua bidang yang berkaitan, pada saat itu sama ia juga mempelajari fikih¹⁵²

Di samping ulama tersebut, Ibn Hazm juga mempelajari ilmu dari sejumlah ulama lainnya,¹⁵³ baik selama ia menetap di Cordova maupun selama pengembaraannya dari kota ke kota sampai ke Marokko, sebelum menetap di tanah air nenek moyangnya, Multijatmo, Lavla. Dari guru-gurunya itu, Ibn Hazm menyerap berbagai bidang ilmu, baik agama maupun umum seperti tafsir dan hadis, serta ilmu yang terkait dengan kedua bidang itu, fikih, Usul fikih, teologi, perbandingan agama, ilmu kebahasaan, sastra, sejarah, filsafat dan lainnya. Hal ini tergambar dari sekian banyak karyanya yang meliputi bidang-bidang tersebut, sehingga dikenal sebagai seorang ilmuwan yang generalis dan

¹⁴⁹ Lihat ‘Abd al-Karim Uwais, *op. cit.*, hlm. 26.

¹⁵⁰ Ibn Hazm, *Risalat Naqt al-‘Arus fi Tawarikh al-Khuiafa*, (Beirut: Muassasat al-‘Arabiyyat, 1987), hlm. 97.

¹⁵¹ ‘Abd al-Karim Uwais, *op. cit.*, hlm. 88.

¹⁵² Al-Magarri, *Nafh*, VI, *op. cit.*, hlm. 176.

¹⁵³ Abu Zahrah, Ibn Hazm, *op. cit.*, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



amat produktif. Karya-karyanya itu banyak dijadikan rujukan oleh ulama sesudahnya.¹⁵⁴

Keberhasilan Ibn Hazm di atas tidak terlepas dari arahan orang tuanya yang menyukai ilmu pengetahuan, di samping ketekunan dan kesungguhannya sendiri, serta kecerdasannya yang luar biasa. Kedudukan sosialnya yang tinggi, karir politik, musibah dan rintangan yang dihadapinya tidak menyurutkan kemauannya untuk menuntut dan memperdalam ilmu. Berbagai cobaan dan gangguan muncul silih berganti, ia tetap tegar menghadapinya. Ketika ia berusia 18 tahun ayahnya jatuh dari jabatannya dan meninggal. Setahun kemudian istrinya pun meninggal. Peristiwa ini nyaris membuatnya kehilangan gairah hidup untuk beberapa bulan lamanya. Selanjutnya ia menjadi buronan politik, ditangkap, dipenjarakan dan diasingkan karena oposisinya terhadap kekuasaan Baru Hammud yang menggulingkan Bani Umayyah. Ia terlibat langsung di dalam kegiatan politik praktis dalam rangka menumbangkan Bani Hammud dan mengembalikan kekhalifahan kepada Bani Umayyah di Andalusia,¹⁵⁵ selama dua dekade menjelang keruntuhannya pada tahun 422 H. Tumbangnya dinasti Umayyah dan kegagalannya di bidang politik tersebut menyadarkannya untuk kembali menekuni dunia keilmuan secara lebih serius dan intensif, yang akhirnya membawanya ke puncak keilmuan dan mengukirkan diri di dalam sejarah perkembangan intelektual Islam.

¹⁵⁴ Tentang produktivitasnya dinyatakan bahwa totalitas karyanya mencapai 400 jilid yang menghimpun 80.000 halaman. Jumlah tersebut hanya bisa ditandingi oleh Imam Tabari, hanya saja karya Ibn Hazm mempunyai variasi pada bidangbidang yang lebih beragam. Yaqut al-Hamawi, *op.cit.* hlm. 238 dan 347 - 348.

¹⁵⁵ Lihat: 'Abd al-Halim Uwais, *Ibri Hazm wa Juhuduhu fi al-Bahts al-Tarikhi wa al-Hadari*, (Kairo: Dar al-I'tisham, tth.), hlm. 64-66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Tidak diragukan, Ibn Hazm mulanya penganut mazhab Maliki.¹⁵⁶ Sebab

mazhab inilah yang mendominasi kehidupan beragama di Andalusia dan kawasan Magribi umumnya. Mazhab ini bukan saja menjadi anutan masyarakat dan ulama setempat, akan tetapi juga menjadi mazhab penguasa dan mazhab resmi negara sebagai tergambar dalam pemegang jabatan Qadi dan landasan putusan yang harus berdasarkan mazhab itu. Ia juga menerima pelajaran awalnya dari ulama Maliki seperti ‘Abdullah bin Dahun dan Ahmad bin Jasur dan mempelajari kitab *Muwatta*’nya Imam Malik. Dengan mempelajari kitab itu, ia sekaligus mempelajari hadis dan fikih mazhab ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, Ibn Hazm berpindah ke mazhab Syafi’i. perpindahan ini agaknya merupakan bagian dari proses pembentukan dan masa transisi kearah pencarian dan pematangan dirinya dan kemandirian pemikirannya. Perpindahan itu memperlihatkan ketidakpuasannya kepada mazhab Maliki, sikap ulama dan masyarakat dalam bertaklid kepada mazhab ini secara fanatik. Hal ini tergambar dalam reaksi mereka, ketika berdiskusi dengan Ibn Hazm di Valensia, ia membantah mereka dengan pendapat yang berbeda. Mereka bereaksi keras dengan menyatakan : “Ini bukanlah mazhabmu.”¹⁵⁷

Obsesinya untuk mencari kebenaran suatu pemikiran di tengah maraknya perbedaan pendapat ulama merupakan motivasi baginya untuk beralih ke mazhab Syafi’i. ini tergambar dalam pernyataannya dalam diskusi

¹⁵⁶ Al-Zahabi menyatakan, bahwa Ibn Hazm tumbuh dalam mazhab Syafi’i, kemudian beralih ke mazhab Dawud. *Siyar al-A’lam*, XVIII, *op. cit.*, hlm. 189, namun agaknya pendapat ini kurang beralasan.

¹⁵⁷ Al-Zahabi, *Tazkirat*’ *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang diikutinya di Valensia “Aku mengikuti kebenaran.”¹⁵⁸ Hanya saja tidak begitu jelas, siapakah gurunya dalam mempelajari mazhab ini. Sebab mazhab ini tidak begitu dikenal di Andalusia dan tidak ada informasi mengenai siapa diantara gurunya yang menganut mazhab ini.¹⁵⁹ Hanya saja, dapat diduga bahwa kitab-kitab yang beredar tidak terbatas pada mazhab Maliki saja, tetapi juga mencakup mazhab lainnya. Dari kitab-kitab yang ia baca dan pengajian pada majelis ulama yang tidak terikat mazhab Ibn Hazm mendalami mazhab Syafi’i dan fikih perbandingan mazhab.¹⁶⁰

Dengan mempelajari fikih mazhab Syafi’i, Ibn Hazm agaknya telah membaca kritik al-Syafi’i terhadap mazhab Imam Malik, seperti kitab *Ikhtilaf Malik-nya* al-Syafi’i yang di dalamnya disebutkan bahwa Imam Malik menjadikan *furu’* (cabang) sebagai *asl* (pokok) dan menjadikan *asl* sebagai *furu’* dalam *qiyas*, dan berdasarkan kajian kritiknya itu, al-Syafi’i menyempurnakan dalil *qiyas*. Kritik tersebut agaknya sesuai dengan kecenderungan pemikirannya dalam mencari kebenaran. Peralihannya ke mazhab tersebut ternyata hanya bersifat sementara. Peralihan itu hanyalah bagian dari masa transisi ke arah pembentukan jati dirinya sebagai seorang mujtahid yang mandiri. Sayangnya, penulis tidak menemukan informasi yang lebih rinci kapan ia mulai menganut mazhab Syafi’i dan kapan pula beralih ke mazhab Zahiri.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Berdasarkan penelitian Tahir Ahmad Makky, mazhab Syafi’i masuk ke Andalus pada pertengahan abad kesembilan Masehi atau pertengahan abad ketiga Hijriah melalui kedatangan Qasim bin Muhammad bin Sayyar. Ia menyebarkan mazhab ini melalui karya tulisnya dan mengajar di Masjid Jami’. Ia mendapat perlindungan dari Amir Muhammad I. Mazhab Syafi’i ini hidup selama masa ‘Abd al-Rahman al-Nasir. Puteranya, ‘Abdullah adalah pengikut mazhab ini. Namun mazhab ini akhirnya tidak berkembang setelah ‘Abdullah gagal mengudeta ayahnya, karena ketidak setujuannya terhadap pengangkatan al-Hakam sebagai putera mahkota. Lihat: Tahir Ahmad Makky, *op. cit.*, hlm. 59.

¹⁶⁰ Abu Zahrah, *lbn Hazm, op. cit.*, hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Masim Riau

Dengan mendalami fikih Syafi'i otomatis Ibn Hazm juga mengenal fikih mazhab Irak dimana pernah terlibat diskusi panjang dengan pemuka mazhab ini, khususnya Muhammad bin al-Hasan, murid Abu Hanifah. Baik melalui ulama yang pernah belajar ke Dunia Timur Islam maupun melalui buku-buku mereka yang banyak beredar di Dunia Barat Islam. Ia juga mempelajari kitab fikih mazhab Ahmad ibn Hanbal, mazhab Dawud Zahiri dan lainnya. Dengan mempelajari mazhab-mazhab itu, ia dapat membandingkan satu sama lain dan memberikan penilaian pendapat mana yang paling mendekati kebenaran. Sebagaimana Dawud kecenderungan Ibn Hazm pada mazhab Syafi'i disebabkan kuatnya komitmen al-Syafi'i pada *nas*, yaitu: Alquran dan Sunnah. Ia juga sependapat dengan kritiknya terhadap Imam Malik yang berfatwa berdasarkan *istihsan*. Argumen al-Syafi'i dalam menolak kehujjahannya ia nilai kuat.

Pembatalan kehujjahan *istihsan* ini tetap dipegang Ibn Hazm, meskipun ia tidak lagi mengikuti mazhabnya. Bahkan akhirnya ia juga berpendapat dalil al-Syafi'i untuk membatalkan *istihsan* dapat dipergunakan untuk membatalkan kehujjahan dalil *qiyas*.¹⁶¹ Dengan pembatalan ini, Ibn Hazm mendasarkan hukum Islam hanya kepada *nas* saja. Sumber hukum hanyalah Alquran, Sunnah dan *ijma'* sebab Syari'at berasal dari Allah dan hanya dapat diketahui melalui

¹⁶¹ Pembatalan Ibn Hazm terhadap *Istihsan*, *Masalih Mursalat*, *qiyas*, dan *ta'lil al-Ahkam* diuraikan didalam kitab *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* pada bab tiga puluh lima yang membahas *istihsan* dan *istinbat* dengan *ra'y* dan pembatalannya (termasuk *istihsab* adalah *mashalih mursalat*) bab tiga puluh delapan tentang pembatalan *qiyas* dalam hukum agama. Bab tiga puluh sembilan yang membahas tentang pembatalan pendapat yang berdasarkan *talil* dalam seluruh hukum agama. Di samping itu pembahasan tersebut juga dibahasnya dalam kitab yang lain, berjudul: *Mulakhkhash Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan* (Beirut: Dar al-Fikr, 1969). Dalam kedua kitab tersebut di atas Ibn Hazm mengemukakan secara panjang lebar argumentasi kebatilan penggunaan *istihsan*, *qiyas* dan *ta'lil al-ahkam* baik berdasarkan *nas* maupun penalaran akal yang rasional. Meskipun demikian argument-argumen tersebut tentu masih dapat ditinjau kembali. Peninjauan dan diskusi mengenai dalil-dalil yang ia kemukakan telah banyak dilakukan oleh para ulama baik masa lampau maupun ulama kontemporer. Sebagaimana Ibn Hazm menghabiskan ratusan halaman kertas untuk membatalkan kehujjahannya, ulama yang menantang pendapatnya juga demikian. Bahkan diantaranya ada yang menulis dengan topic yang terbatas mengenai kehujjahannya. 'Abd al-Wahab Khallaf, misalnya, menulis tentang *al-Ra'y* dan *Masadir al-Tasyre Fi Ma La Nassha Fih*. 'Abd al-Hakim 'Abd al-Rahman *As'ad al-Sa'di* menulis *Mabahis al-Iliat di al-Qiyas*. Muhammad Mustafa Syalabi menulis *Ta'lil al-Ahkam*. Shalah Zaidan menulis *Huijiyyat al-Qiyas* dan lainnya. Terlepas dari dalil-dalil dan argumentasi mereka yang setuju dan yang tidak, agaknya seleksi sejarah dan kebutuhan pengembangan hukum Islam dalam perjalanannya kurang mendukung pendapat Ibn Hazm mengenai hal ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Semarang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nas saja, tidak yang lain. Sedangkan *ijma'* menurutnya kembali kepada *tauqif* atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Dengan demikian *ijma'* kembali kepada *nas*.¹⁶²

Pendirian Ibn Hazm tentang landasan *istinbat* hukum di atas sejalan dengan kecenderungan Dawud Zahiri, tetapi ini tidak berarti ia taklid kepadanya. Dalam berbagai masalah ia juga berbeda pendapat dengannya dan juga sependapat dengan dalam banyak hal.¹⁶³ Kesamaan itu tidak disebabkan taklid, akan tetapi lebih banyak disebabkan kesamaan kecenderungan dalam *istinbat* hukum dan kesamaan sumber yang dipergunakan. Perbedaan antara keduanya muncul karena sikap Ibn Hazm yang jauh lebih keras dibanding Dawud Zahiri dalam menolak *qiyas*.¹⁶⁴ Di samping perbedaan sumber *nas* yang dipergunakan, secara metodologis merekapun tidak sepenuhnya sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibn Hazm sendiri: “Aku mengikuti kebenaran, berijtihad dan tidak terikat dengan suatu mazhab tertentu.”¹⁶⁵ Seperti Dawud, Ibn Hazm juga berijtihad secara mandiri tanpa ikatan mazhab.

Ibn Hazm mempelajari mazhab Zahiri dari gurunya, yaitu Abu al-Khayyar Mas'ud bin Sulaiman bin Muflit (w. 426 H),¹⁶⁶ dari berbagai kitab yang ditulis oleh *fuqaha* Zahiri sebelumnya termasuk kitab yang ditulis oleh Munzir bin Sa'id, seorang ahli fikih yang gigih membela Dawud. Betapapun Ibn Hazm telah melalui perjalanan panjang dalam rangka mengkaji hukum Islam, mulai dari *Fiqh al-Hadis*, dimana ia banyak mendalami hadis, sehingga menjadi muhaddis terkenal dimasanya, *asar* para sahabat dan *tabi'in* dari para gurunya

¹⁶² Ibn Hazm, *al-Hikam*, II, juz VII, *op. cit.*, hlm. 370

¹⁶³ Lihat: Abu Zahrah, *Ibn Hazm*, *op. cit.*, hlm. 266

¹⁶⁴ Ibn al-Subki, *op. cit.*,

¹⁶⁵ Al-Zahabi, *Tazkirat*, *loc. cit.*

¹⁶⁶ Tentang gurunya ini Ibn Hazm juga menyebutkan di dalam *Tauq al-Mamarnat*, *op. cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan kitab-kitab yang pernah ia baca, kemudian mempelajari pemikiran para *fuqaha* dari berbagai mazhab termasuk mazhab Zahiri dan akhirnya membentuk dirinya sebagai seorang mujtahid yang mandiri yang mendasarkan *ijtihadnya* pada Alquran, Sunnah dan *ijma'*.

Kecenderungan Ibn Hazm kepada mazhab Zahiri agaknya terkait erat dengan fenomena sosial politik dan keagamaan di Andalusia pada masa hidupnya. Terjadinya krisis politik yang berkepanjangan yang mengakibatkan runtuhnya kekhalifahan, penyelewengan dan kezaliman Muluk al-Tawaif berakar pada ketidaktegasan pelaksanaan Syari'at Islam, bahkan cenderung meninggalkannya. Sebagian *fuqaha* mazhab Maliki di Andalusia yang memegang jabatan penting, umumnya sebagai ketika itu telah menjadi kurang responsif, oportunistik, tunduk kepada kemauan politik dan kebijakan hukum penguasa, meskipun jelas-jelas menyimpang dari Syari'at. Mereka kurang atau tidak lagi menjalankan tugas amar ma'ruf dan *nahi munkar* dalam rangka mengontrol penguasa dan berbagai kekuatan sosial yang bersaing secara tidak sehat. Mereka selalu tampil dalam posisi yang lemah dan defensif dalam menghadapi kebijakan pemerintah dan kekuatan yang lebih dominan yang terkait dengan Syari'at. Mereka berlindung di balik penggunaan *ra'y* dalam rangka mengamankan diri dari tekanan kezaliman penguasa yang menyeleweng itu.

Pengangkatan Hisyam bin al-Hakam sebagai Khalifah ketika ia masih kanak-kanak jelas menyimpang dari Syari'at Islam. Ulama Maliki mentolelir penyimpangan itu dan beramai-ramai membaiainya. Padahal menurut mazhab manapun, termasuk Maliki, seorang anak di bawah umur tidak layak dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi syarat untuk menjadi Khalifah,¹⁶⁷ pemimpin tertinggi umat Islam. Sebab pada dasarnya seorang anak kecil tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dan memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan dirinya. Apalagi mengurus kepentingan dan kemaslahatan umat dan rakyatnya. Ibn Hazm menganggap hal ini sebagai penyimpangan fundamental yang menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan politik di Andalusia pada masa-masa sesudahnya. Khalifah yang tidak cakap dan lemah akan mengundang datangnya pihak-pihak yang bersaing dalam menanamkan pengaruh padanya guna memperoleh legitimasi dalam memegang tampuk kekuasaan politik yang sebenarnya. Khalifah lalu hanya menjadi simbol yang tidak punya peran yang berarti lagi.

Akibat kelemahan struktural itu, penguasa ketiga dari Bani Amir, yaitu ‘Abdul al-Rahman bin al-Mansur,¹⁶⁸ berambisi untuk menduduki jabatan khalifah, padahal ia bukan keturunan Quraisy yang ketika itu masih menjadi salah satu syaratnya. Ia berhasil menekan khalifah Hisyam al-Muayyad untuk membaikinya sebagai calon khalifah sesudahnya. Karuan saja, timbul reaksi keras dan pemberontakan yang mengakibatkan *hajib* itu terbunuh. Kematian ini tidak berarti krisis politik itu berakhir, karena sesudah itu muncul perebutan kekuasaan antara sesama keluarga khalifah. Selain itu, Bat Hammud yang condong kepada mazhab Syi’ah dari Magribi ikut mengeruhkan situasi politik, berusaha merebut kekuasaan dan berhasil menguasai Andalusia selama lebih kurang satu dasawarsa.

¹⁶⁷ Diantara syaratnya ialah: Akil balig dan Mumayyiz. Lihat: Ibn Hazm, *al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahura’ wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Juz IV, hlm. 166.

¹⁶⁸ Philip K. Hitti, *History of The Arab*, London: The Macmillan Press LTD, 1974, hlm. 534.



Di samping itu muncul pula campur tangan kekuatan non muslim yang mengulurkan “bantuan” kekuatan kepada pihak yang menginginkannya.¹⁶⁹ Sudah barang tentu “bantuan” itu disertai persyaratan dan konsensi tertentu yang merugikan umat Islam secara umum. Kerja sama semacam ini dinilai Ibn Hazm bertentangan dengan Syari’at Islam, karena secara polihs memberi peluang kepada musuh untuk meruntuhkan umat Islam. Dalam skala besar umat Islam yang dalam posisi lemah bisa jadi akan lebih mudah tunduk kepada kemauan politik dan pengaruh mereka. Sebagai imbalannya, umat Islam harus membayar mahal dengan jatuhnya kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia.

Selanjutnya, muncul *Muluk al-Tawaif* yang mempergunakan gelar Amir al-Mukminin dan gelar lainnya yang hanya layak bagi khalifah. *Fuqaha* Maliki tersebut cenderung bersikap toleran terhadap penyimpangan mereka. Bahkan diam saja, ketika salah seorang dari mereka mengklaim dirinya sebagai khalifah keturunan Bani Umayyah, padahal sebenarnya is seorang berkulit hitam yang berasal dari benua Afrika. Ia mengaku dirinya sebagai khalifah al-Muayyad Hisyam bin al-Hakam yang telah wafat 22 tahun sebelumnya.¹⁷⁰ Yang lebih mengherankan adalah bahwa *fuqaha* Maliki bersedia membaiaatnya, Dimulai dari Qadi dan diikuti oleh para pembesar dan *fuqaha*. Pertanyaannya, apa dasar mereka membaiaatnya? Lebih jauh lagi, mereka juga diam saja melihat masyarakat menjadi sasaran kezaliman penguasa yang menetapkan pungutan berlebih-lebihan dalam rangka

¹⁶⁹ Lihat ‘Abd al-Karim Uwais, *op. cit.*, hlm. 26.

¹⁷⁰ Ibn Hazm, *Risalat Naqt al-'Arus fi Tawarikh al-Khuiafa*, (Beirut: Muassasat al-‘Aabiyyat, 1987), hlm. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Memang sebagian dari mereka hidupnya adalah dari hadiah dan pemberian penguasa.

Melihat kondisi sosial politik yang demikian parah, dimana *qiyas* dan *istihsan* telah menjadi alat bagi timbulnya kolusi antara sebagian *fuqaha* dan penguasa dalam memberikan fatwa-fatwa hukum yang berkenaan dengan realitas kehidupan yang rusak.¹⁷¹ Untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka Ibn Hazm memilih jalur untuk mengkaji hukum Islam mulai dari awal dengan kebebasan ber*ijtihad* dan menolak taklid. *Ijtihad* menurutnya adalah kembali kepada Alquran dan Sunnah. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa kezahirian Ibn Hazm merupakan reaksinya terhadap fenomena sosial politik yang secara mendasar membutuhkan perbaikan dari sisi landasannya, yaitu pengetatan pemahaman dan penerapan *nas Syari'at*.

Oleh karena itu, aktivitas intelektualnya, terutama dibidang fikih dan *Usul* fikih merupakan upaya untuk mengubah aspek pemikiran yang menjadi dasar berbagai penyelewengan hukum yang terjadi itu, mengembalikan *fuqaha* untuk bersedia mengkaji dari sumbernya, yaitu Alquran dan Sunnah, bukan hanya *furu'*nya saja. Ibn Hazm mampu melakukannya, karena didukung oleh penguasaannya terhadap Sunnah, riwayat-riwayat (*atsar*) sahabat dan ilmu-ilmu lain yang menjadi perangkat *ijtihad*. Hal ini berbeda dengan umumnya *fuqaha* pada zamannya. Oleh karena itu, seruannya juga sulit mereka terapkan.

D. Peranan Ibn Hazm Dalam Mazhab Zahiri

Setelah Ibn Hazm merasa yakin akan jalur *ijtihad* yang ditempuhnya, maka ia mulai menyampaikan pemikirannya kepada masyarakat.

¹⁷¹ 'Abd al-Karim Uwais, *op. cit.*, hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khususnya kepada *fuqaha* dan para pelajar melalui berbagai majelis pengajian dan diskusi ilmiah yang biasa diadakan di masjid-masjid. Dengan dukungan kemampuan retorika dan logika yang matang ia mampu menundukkan lawan-lawan diskusinya dari kalangan *fuqaha* Maliki dan membuat mereka harus mengakui keunggulan dan kebenaran argumentasinya,¹⁷² karena mereka menurut Abu Zahrah hanya berkonsentrasi pada *furu'* fikih saja, sedangkan Ibn Hazm didukung oleh keluasan pengetahuannya dan kemahirannya dalam berargumentasi.¹⁷³

Dalam memasyarakatkan pemikiran-pemikirannya, Ibn Hazm sering berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain di Andalusia, seperti Cordova, Granada, Valensia, Almeria, Jativa, Malaga, Mayorca, dan Lavia. Bahkan ia juga menyeberang ke Magribi dan berada di Kairawan untuk beberapa lama.¹⁷⁴ Sebagaimana umumnya ulama yang melawan arus masyarakat mayoritas, maka respon yang diterimanya pun bermacam-macam. Ada sebagian yang dapat menerima dan mendukung pemikirannya. Sebaliknya adapula yang serta merta menolaknya. Harta saja bila dibandingkan dengan kelompok yang mendukung, kelompok yang menolak jauh lebih banyak. Hal ini wajar, karena masyarakat telah mapan dengan kondisi keberagaman dalam mazhab Maliki. Tidak heran jika para penolaknya adalah *fuqaham* mazhab Maliki yang memiliki akses yang besar pada penguasa dan masyarakat. Sedangkan

¹⁷² Al-Magarri, *Nafh*, VI, *op. cit.*, hlm. 176.

¹⁷³ Abu Zahrah, Ibn Hazm, *op. cit.*, hlm. 48.

¹⁷⁴ Ibn Hazm mengatakan: "Pada suatu hari Abu 'Abdullah bin Kulaib, penduduk Kairawan, bertanya kepadaku ketika aku berada di kota itu." Lihat: Ibn Hazm, *Tauq*, *op. cit.*, hlm. 73.



pendukungnya terdiri dari para pemuda yang sedang bergairah dalam mencari ilmu.¹⁷⁵

Akibat sikapnya yang melawan arus itu, banyak di antara *fuqaha* Maliki membenci dan memusuhinya. Mereka tidak segan-segan mempergunakan berbagai cara untuk meredam kegiatan Ibnu Hazm dalam mengajarkan dan menyebarkan pemikirannya. Diantara salah satu caranya ialah: mengumumkan kekafiran dan kesesatannya. Yang lebih sadis mereka menghasut penguasa agar menyingkirkannya dari wilayah kekuasaannya.¹⁷⁶ Karena itu, adakalanya kepindahannya ke daerah lain merupakan akibat dari tekanan penguasa. Permintaan mereka mendapat sambutan baik, karena dibalik itu ia menghendaki dukungan dan legitimasi terhadap aktivitasnya dari mereka. Paling tidak, mereka tidak peduli jika ia melakukan penyelewengan hukum. Hal ini tidak akan ia dapatkan dari Ibnu Hazm yang keras dan selalu mengkritik penyiripangannya sebagai bagian dari amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dengan sikap seperti itu Ibn Hazm dipandang sebagai tokoh oposan yang dapat mengancam posisi mereka. Ibn Hazm adalah seorang yang fanatik dalam doktrin Imamati dari suku Quraisy dan persyaratan ini dimiliki oleh Bard Umayyah. Penguasa mereka khawatir Ibn Hazm akan berusaha mempengaruhi masyarakat untuk melawannya dan menghidupkan kembali kekhalifahan Bani Umayyah. Yang lebih sadis, kitab-kitab Ibn Hazm dibakar oleh Al-Mu'tahid, penguasa Seville sebelum ia diusir dari wilayahnya.

Peristiwa di atas, menurut Abu Zahrah, disebabkan oleh pengaduan *fuqaha* Maliki yang mengatakan bahwa Ibn Hazm menghujat Imam Malik dan

¹⁷⁵ Abu Zahrah, Ibn Hazm, *op. cit.*, hlm. 54

¹⁷⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga Imam maZa sunni lainnya, serta mengeluarkan fikih yang tidak sesuai dengan keempat mazhab itu.¹⁷⁷ Al-Mu'tadid sendiri juga membenci Ibn Hazm karena kritiknya yang pedas atas klaim dirinya sebagai khalifah Bani Umayyah yang berhak menyandang jabatan tertinggi itu, padahal sebenarnya ia tidak lebih dari seorang Barbar.

Pada kenyataannya tidak semua penguasa dan *fuqaha* memusuhinya, di Kairawan ia mendapat sambutan baik. Ia bebas mengajarkan pemikiran-pemikirannya. Di Mayorka ia juga mempunyai banyak pengikut. Ahmad bin Rasyiq, penguasa setempat yang juga temannya, memberikan keleluasaan untuk memasyarakatkan pemikirannya. Hanya saja setelah Ahmad meninggal, penggantinya bersikap kurang bersahabat dan memenuhi permintaan *fuqaha* untuk menyingkirkannya dari wilayahnya.¹⁷⁸ Akhirnya, ketika tidak ada lagi wilayah yang menerima kehadirannya, Ibn Hazm kembali ke desa asal keluarganya, Multijatmo, Lavla, di pesisir barat Andalusia. Di tempat itu ia mendidik murid-muridnya dan menuliskan pemikirannya dalam berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya. Sebagaimana dikemukakan Ibn Hazm sendiri, kebencian dan permusuhan *fuqaha* dan penguasa terhadap dirinya membuat semangatnya menggebu-gebu untuk menuliskan pemikiran-pemikirannya.¹⁷⁹ Hal itu membuatnya menjadi penulis yang produktif. Agaknya ia menyadari, cara inilah yang tepat untuk memperkenalkan pemikirannya kepada generasi-generasi sesudahnya.

¹⁷⁷ Abu Zahrah, *Ibn Hazm, op. cit.*, hlm 51.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁷⁹ Ibn Hazm mengatakan: "Sesungguhnya aku memperoleh manfaat besar dari kelicikanmu, wahai orang-orang bodoh! Emosiku terbakar, hatiku membara dan pikiranku menjadi panas. Kalau sekiranya mereka tidak mengobarkan ketenanganku dan mencercaku sedemikian rupa, niscaya tidak akan muncul karya-karya itu." *Ibid*, hlm. 76.

Agaknya Ibn Hazm menyadari, bahwa melalui media tulisan, pemikirannya akan dikenal oleh generasi mendatang. Dan ditemukan dalam sebagian besar karyanya yang membahas fikih dan *Usul* fikih ia mempergunakan bahasa yang kasar. Terutama, berkaitan dengan kritiknya terhadap mazhab lain. Kekasaran ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai ketidaktahuannya akan siasat keilmuan.¹⁸⁰ Ini merupakan reaksi yang reflektif dari perlakuan *fuqaha* yang tidak adil terhadapnya. Boleh jadi karena itu Ibn Hazm memandang perlu mempergunakan bahasa semacam itu menghadapi kemapanan kemapanan taklid mereka.

Selanjutnya ada beberapa hal yang penting yang diperankan oleh Ibn Hazm melalui karya-karya, antar lain :

Pertama, Ibn Hazm merumuskan dan memformulasikan *Usul* fikih dan metode *ijtihad* mazhab Zahiri. Kitabnya *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* sarat dengan pandangan-pandangan prinsipil tentang bagaimana cara beristinbat hukum dari Alquran dan Sunnah. Ia bukan hanya menghimpun metode *ijtihad* ulama Zahiri dan membandingkannya dengan metode mazhab lain, tetapi ia juga memasukkan beberapa prinsip dan kaidah baru yang dirumuskannya sendiri, meskipun pandangannya boleh jadi bertentangan dengan pandangan ulama Zahiri umumnya atau mazhab lain.

Kedua, Ibn Hazm menegaskan karakteristik *ijtihad* dan metodenya dalam menggali hukum Islam. Kitabnya tersebut menggambarkan bagaimana langkah yang dia tempuh dalam ber*ijtihad*, yakni berpegang pada pengertian yang tersurat pada *nas* Alquran atau Sunnah berdasarkan pendekatan kebahasaan,

¹⁸⁰ Ketajaman bahasanya digambarkan seorang ulama dengan ungkapan: "Pedang al-Hajjaj dan Lidah Ibn Hazm merupakan saudara kembar." Lihat: Ibn Khalikan, *Wafayat, op. cit.*, Jilid III, hal. 328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengakui *ijma'* sahabat sebagai sumber penetapan hukum, menolak segala macam bentuk *ra'y*, dan menambahkan sumber hukum lain, yaitu dalil karena dalil merupakan *dalalat* dari *nas* atau *ijma'*.

Ketiga, Ibn Hazm membukukan *furu' fiqhiyyat* hasil *ijtihadnya* dan membandingkannya dengan ulama mazhab lainnya dan ulama mazhab Zahiri. Tanpa kitabnya, *al-Muhalla bi al-Asar*, fikih Ibn Hazm dan fikih mazhab Zahiri sulit dilacak kembali. Kitab ini terdiri dari 12 jilid, menghimpun pembahasan 2.312 masalah. Akan tetapi yang asli sebagai tulisannya sebanyak 2.028 masalah. Sisanya ditulis putranya, Abu Rafi' al-Fadl yang meringkaskannya dari kitab *al-Ishal*. Agaknya, Ibn Hazm belum menamatkannya ketika ia dipanggil ke hadirat Ilahi. *Al-Muhalla* menghimpun 12.903 pendapat yang dinisbatkan kepada salaf.¹⁸¹

Keempat, Ibn Hazm mengaplikasikan pendekatan Zahiri dalam mengkaji teologi dan ajaran-ajaran Islam yang dogmatis. Ada anggapan ia gagal menerapkan metode tersebut dalam bidang itu, karena ia banyak menggunakan dalil rasional dan logika. Akan tetapi sebenarnya menurut penulis, dia tidak gagal dalam hal ini. Hanya saja ia memang membedakan antara *ijtihadnya* dalam persoalan *fiqhiyyat* dan persoalan teologis. Ibn Hazm sendiri menegaskan: penginderaan akan akal penalaran merupakan asal segala sesuatu. Dengan kedua sumber itu kita mengetahui kesahihan Alquran, ke-Tuhanan dan kenabian, sehingga untuk membuktikannya kita tidak membutuhkan *nas*. Hanya saja untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang ditemukan oleh indera dan akal diperlukan *nas*.

¹⁸¹ 'Abd al-Halim Uwais, *op. cit.*, hlm. 95-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Pujian Ulama terhadap Ibn Hazm.

Tidak diragukan lagi bahwa Ibn Hazm sekalipun pendapatnya tidak banyak diikuti oleh mayoritas ulama,¹⁸² telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika pemikiran Islam dalam pelbagai disiplin ilmu. Al-Maqari dalam bukunya tentang sejarah Andalusia menuliskan sebuah cerita tentang Ya'qub al-Mansur (595 1190 M) Khalifah Dinasti Muwahidiyah yang berkuasa di Andalus mengantikan Dinasti *Murabitim*. Pada suatu siang sang Khalifah berdiri di hadapan kuburan Ibn Hazm seraya mengatakan: “seluruh ulama berhutang pada Ibn Hazm”.¹⁸³

Al-Humaidi (w.488 H) berkata:¹⁸⁴ “Ibn Hazm adalah seorang yang kuat hafalannya, mengetahui ilmu Hadis, ilmu hukumnya bersumber dari Alquran dan Sunnah, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, seorang yang mengamalkan ilmunya, zuhud terhadap dunia dan jabatan yang pernah disandangnya, rendah hati, memiliki banyak keutamaan, banyak menyusun karya tulis dalam bidang ilmu Hadis baik dalam bentuk musannaf maupun dalam musnad.

Al-Humaidi berkata: Aku tidak melihat orang yang membuat syi'ir indah yang lebih cepat dan lebih banyak dari Ibn Hazm dan aku tidak melihat orang yang berkumpul dalam dirinya kecerdasan, kekuatan hafalan, kemurahan jiwa dan relijius yang bisa menandingi Ibn Hazm.

Abu Hamid al-Ghazali (w, 505) mengatakan: Aku menemukan kitab yang membahas sifat-sifat Allah yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibn

¹⁸² H. A Djazuli menyebutkan bahwa Mazhab Zahiriy dulu pernah berkembang di Andalusia (Spanyol) lalu menyebar ke negeri-negeri Afrika. Lihat H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana,2006), ed.6, hlm.125

¹⁸³ Ahmad Al-Maqari, *op. cit.*, vol.3., hlm. 238

¹⁸⁴ Muhammad al-Humaidi, *Jadwat al-Muqtabis fi Tarikh 'Ulama al-Andalus*, (Tunisia Dar al-Gharb al-Islami, 2008), Jilid. 2, hlm, 489-490

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hazm, Kitab tersebut menunjukkan kuatnya hafalan yang dimiliki penulisnya dan tingginya kecerdasannya.¹⁸⁵

‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam (w.660 H) seorang faqih dari kalangan mazhab Syafi’i yang digelar *sultan al-‘ulama* (pemimpin para ulama) dan diakui telah mencapai derajat mutlak dalam berijtihad, memberi komentar terhadap *al-Muhalla* dengan mengatakan, aku tidak melihat dari buku-buku Islam yang lebih baik dari *al-Muhalla* Ibn Hazm dan *al-Mughni* Ibn Qudamah al-Maqdisiy.¹⁸⁶

Ibn Khalikan (w. 681 H) mengomentari Ibn Hazm sebagai berikut: Ibn Hazm adalah seorang hafiz, menguasai ilmu al-Hadis, menggali hukum dari al-Kitab dan al-Sunnah setelah sebelumnya bermazhab Syafi’i kemudian pindah ke mazhab Zahiriy, dia banyak menguasai pelbagai cabang ilmu, mengamalkan ilmunya, zuhud terhadap jabatan wazir yang pernah disandang oleh dia dan ayahnya. Ia seorang yang memiliki banyak keutamaan dan karya tulis.¹⁸⁷

Abu Marwan bin Hayyan (w. 469 H) berkomentar, dari Ibn Hazm memancar lautan ilmu yang tidak akan kering ketika ditimba. Ibn Hayyan berkata, sungguh sangat mengagumkan tipu daya atas dirinya, ia mengutamakan kebaikan-kebaikannya, ia tidak merasa sia-sia atas apa yang diperbuat, ia termasuk paling zuhudnya manusia di daerahnya.

¹⁸⁵ Al-Dzahabi, *Siyar ‘Alam al-Nubala*, (Libanon: Bairut: al-Afkar al-Dauliyyah, 2004), Jilid 18, hlm. 1879. Lihat juga Ibn Hajar, *Lisan al-Mizan*, (Beirut: Maktabah al-Matbu’ah al-Islamiyyah, 2002), Jilid 4, hlm. 201. Baca: al-Maqarri, *Nafh al Tiib, di-tahqiq* oleh Ihsan ‘Abbas, (t.t.: Dar Sadir, 1968 M /1388H), Jilid 2, hlm,78

¹⁸⁶ Al-Dzahabi, *Tadzkirot al-Huffazh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), Vol.3, hlm. 1150); Ibn Muflih, *op.cit*, hal. 213-214

¹⁸⁷ Ibn Khalikan, *Wafayat al-A’yan*, ditahqiq oleh Ihsan ‘Abbas, (Beirut: Dar Sadir, 1972), Jilid 3, hlm. 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Muflih (w.763 H) berkata, Ibn Hazm merupakan puncak kecerdasan, hafalan dan luasnya keilmuan, dia sangat menguasai beragam ilmu, banyak karya-karya yang brilian dalam berbagai cabang ilmu sampai dengan ilmu *mantiq* dan *syarah al-Mujalla* yang terdiri dari 12 jilid Barang siapa yang meneliti kitab tersebut, akan menemukan di dalamnya, sikap penghormatan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal dan mengikutinya.¹⁸⁸

Jalaluddin al-Suyuti (w.911 H) menyatakan: Ibn Hazm adalah seorang yang menguasai berbagai cabang ilmu, *wara'*, zuhud, pada dirinya puncak kecerdasan, hafalan, luasnya keilmuan, Ibn Hazm adalah penduduk Andalusia yang paling banyak menguasai ilmu keislaman, ilmu bahasa, ilmu sastra, sya'ir, sejarah dan Hadis.¹⁸⁹

Al-Syaukani (1250 H), ulama besar yang hidup pada penggalan abad ke-18 M, menyamakan kapasitas Ibn Hazm dengan kebesaran tokoh pembaharu Islam, Ibn Taimiyyah.¹⁹⁰

Menurut Sa'id Al-Andalusi, penduduk Andalusia sepakat bahwa Ibn Hazm adalah sumber ilmu-ilmu keislaman dan yang paling luas pengetahuannya. Menurut al-Zahabi(w.748 H) pada diri Ibn Hazm berakhir kepintaran dan kejelian berfikir, ilmunya sangat luas tentang Alquran dan Sunnah, mazhab-mazhab fikih dan sekte, bahasa Arab, sastra, logika dan syair dengan kejujuran dan keagamaannya.¹⁹¹

¹⁸⁸ Ibn Muflih, *al-Itlaq Sad al-Arsyad*, (Beirut: Dar al-Fikr,1998), juz 2, halm. 213

¹⁸⁹ Jalaluddin al-Suyuti, *Tabaqat al-Huffadz*, (Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H), cet. ke-1, hlm. 435-436

¹⁹⁰ Anwar Khalid, *al- Zahiriyyah Ibn Hazm Nazhariyyah al-Mari'fah wa Manahiju al-Bahs/* (Aman: Wizarat al-S'laqafah, 1995), hlm. 20

¹⁹¹ Encyclopaedia Britannica, *Ibn Hazm Encyclopxdia Britannica*. 2006. Encyclopaedia Britannica Online; R. Arnaldez, Ibn Hazm. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online, 2013; https://id.wikipedia.org/wiki/fbnu_Hazni; Joseph A. Kechichian, *A mind of his own*, Gulf News: 2030 December 20, 2012 diunduh pada hari Jum'at 08 Desember 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di kalangan ulama *al-Lajnah al-Daimah* disebutkan bahwa Ibn Hazm termasuk ulama yang sangat menonjol dalam bidang *usul, furu'*, al-Kitab dan al-Sunnah, hanya saja Ibn Hazm sering berbeda pendapat dengan mayoritas ulama dalam pelbagai masalah. Hal ini terjadi karena sifat tekstualisnya dan penolakannya terhadap *qiyas* meskipun telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kesalahan Ibn Hazm dalam masalah aqidah karena men-*ta'wil* nas-nas *asma' wa al-Sifat* jauh lebih besar.¹⁹²

Ibn Rusyd (w.595 H) dalam kata pengantar bukunya *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* menggambarkan bahwa ia telah meminjam banyak hal dari Ibn Hazm. Begitu pula dengan salah seorang pembaharu *Usul Fiqh* al-Syatibi (w. 790 H) yang mengarang kitab *al-Muwafaqat*. Proyek *maqasid Syari'ah*-nya sekalipun benar-benar *genuine* merupakan temuannya, tetap masih tidak bisa dikatakan berdiri independen secara *epistemologis*¹⁹³ ketika dihadapkan dengan pemikiran Ibn Hazm.¹⁹⁴ Demikian pula, Ibn 'Arabi (w. 1240 M/638 H) yang sekalipun secara akidah menganut keyakinan *batiniyah*, tetapi secara fikih adalah penganut aliran literal mazhab Zarhiri.¹⁹⁵

¹⁹² <https://islamqa.info/ar/161540> diunduh pada hari Jum'at, 08 Desember 2018

¹⁹³ Epistemologi adalah salah satu dari tiang penyangga yang dikaji dalam filsafat ilmu. Di samping itu, ada juga yang mengkaji tentang hakikat apa yang dikaji atau "science of being qua being"; epistemology, bagaimana cara ilmu pengetahuan melakukan pengkajian dan menyusun tubuh pengetahuannya atau studi filsafat yang membahas ruang lingkup dan Batas-batas pengetahuan dan aksiologi, untuk apa ilmu yang telah tersusun itu digunakan, atau "theory of value". Lihat: Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemology Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1

¹⁹⁴ 'Abid al-Jabiri, *Binyah al-Aql al-'Arabi*, (Libanon: Markaz Dirasah al-Wandah al-Arabiyyah, 2009), cet- ke-2, hlm. 547

¹⁹⁵ Ahmad Al-Maqari al-Tilmasaniy, *Nafhu al-Tiyyb min Gusni al-Andalasiy al-Ratib*, (t.t, Dar al-Sadir, 1388 171/1968 M), vo1.2, hlm. 813

Tabel: 2

Siapakah Ibn Hazm

PRIHAL		KETERANG
No	Nama Lengkap	Nama Lengkap: ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm, ibn Ghalib ibn Salih ibn Khalaf ibn Ma’dan ibn Syufyan ibn Yazid. Nama: Pendek: ‘Ali Nama: Kunyah-nya adalah Abu Muhammad Nama: Populer Ibn Hazm
	Lahir dan Wafat	Lahir pada Rabu Subuh di Akhir bulan Ramadhan tahun 384 H bersamaan dengan 7 November 994 M di Cordoba. Wafat pada 20 Sya’ban 456 H atau 15 Agustus 1064 M, di Mantha Lisha, dekat Sevilla.
3	Usia	71 tahun 10 bulan 29 hari
4	Aliran	<i>Ahlussunnah Wal Jama’ah/Sunni</i>
5	Keahlian	Ahli Fikih/ <i>Faqih</i>
	Status Intelektual	<i>Mujtahid Mutlaq</i>
	Riwayat Mazhab	Malikiyah, Syafi’iyah dan Zahiriyah
	Metode Berfikir	Rasionalis/Literalis/Tekstualis (zahir)
	Metode <i>istinbath</i>	<i>Al-Dalil</i> : (Alquran, Sunnah dan <i>Ijma’</i> Sahabat)
1	Karya monumental	<i>Al-Muhalla</i> dan <i>al-Ihkam fi Usul al-Ahkam</i>
1	Prestasi	Berhasil Menyegarkan Kembali Mazhab Zahiri
1	Kelemahan	Temperamental
1	Julukan	<i>Manjaniq al-Gharbi</i> (Panah dari Barat)

Berdasarkan data tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibn Hazm merupakan ahli fikih beraliran *Sunni*, hal ini ditandai dengan mazhab yang ia anut, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Zahiriyah. Semula ia adalah mujtahid mazhab, kemudian seiring dengan perkembangan dan kemajuan keilmuan yang ia miliki, akhirnya ia tampil sebagai mujtahid mutlaq. Bahkan oleh murid-muridnya ia disebut sebagai pendiri mazhab Hazmiyah, namun sungguhpun demikian ia tetap dikenal sebagai penganut mazhab Zahiri.

Dalam melahirkan fatwa, ia menggunakan metode *istinbat* hukum al-Dalil, dimana sumber hukum Islam pertama adalah Alquran dan Sunnah, dan sumber hukum kedua adalah *ijma'* sahabat. Cara berfikirnya rasional, literalis atau tekstual (zahir teks). Bahkan oleh sebagian ulama ia dikatakan lebih zahiriyah disbanding Abu Daud al-Zahiri, dan tidak ayal di masanya mazhab Zahiriyah tumbuh dan berkembang pesat.

Secara karakter, ia merupakan ulama yang keras dalam mempertahankan prinsip, siap berdebat dengan siapa saja, dan tidak segan-segan mengatakan pendapat ulama sekaliber Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan perkataan "pemikiran yang bodoh, pendapat jahil, dan bahkan ia sebut pendapat sesat yang berasal dari setan. Atas sikapnya itu ia dicap memiliki karakter yang temperamental.

Namun sungguhpun demikian, banyak ulama yang memuji kepintaran dan keluasan ilmunya, sehingga ia di gelari dengan "*Manjaniq al-Gharbi* (Panah dari Barat)". Gelar tersebut layak ia dapat, sebab ia telah berkontribusi besar dalam penyebaran ilmu agama Islam di masanya, dengan bukti 400 buku hasil karyanya yang telah ia persembahkan sebagai khazanah keilmuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI

A Pengertian, Sejarah dan Sebab Terjadi Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *polus* artinya banyak, *gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.¹⁹⁶ Dalam kamus Teologi disebutkan, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.¹⁹⁷ Secara epistemologi dijelaskan dalam UUP dan KHI, poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan dengan batasan maksimal empat orang istri.¹⁹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, poligami mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.¹⁹⁹ WJS. Poerwadarminta mengartikan poligami sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.²⁰⁰ Adapun dalam Kamus Ilmiah Populer, pengertian poligami adalah perkawinan antara seorang

¹⁹⁶ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), hlm. 2736.

¹⁹⁷ Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 259.

¹⁹⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), hlm. 84.

¹⁹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka Depdikbud, 2005), hlm. 885.

²⁰⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1966), hlm. 763



dengan dua orang atau lebih, cenderung juga diartikan dengan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.²⁰¹

Tidak ketinggalan, Siti Musdah Mulia juga turut merumuskan pengertian poligami yaitu ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.²⁰²

Di dalam *Fiqh Munakahat* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.²⁰³

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dengan ketentuan maksimal empat orang dalam waktu yang sama.

2. Sejarah Poligami

Ahli-ahli sejarah dan para ilmuwan antropologi mengemukakan bahwa poligami dalam bentuknya yang beragam telah ada dalam tahap-tahap awal dari sejarah manusia, dan bahwa poligami muncul pertama kali sebagai akibat dari perbudakan perempuan dan sikap kaum yang kuat dan kaya yang menjadikan banyak perempuan untuk bersenang-senang, sebagai pelayan dan sebagai simbol kebesaran dan kemegahan. Pemilikan banyak perempuan

²⁰¹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 606

²⁰² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43

²⁰³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. I, hlm. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

biasanya khusus bagi para raja, para menteri dan pembesar-pembesar dan bagi sebagian mereka hal itu hanya semata sebagai perbudakan kemudian peradaban semakin berkembang dan akhirnya lahirnya penyatuan antara akad menikahi perempuan-perempuan merdeka dengan bersenang-senang dengan budak-budak perempuan yang mereka miliki.²⁰⁴

Poligami sudah dikenal sebelum Islam di setiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang, baik penyembah berhala maupun bukan, seperti pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persi, Yahudi Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Swis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, Norwegia dan lain-lain.²⁰⁵ Dalam Undang-undang Likai di Cina poligami dibolehkan sampai 150 orang istri bahkan salah seorang raja di Cina memiliki 30.000 istri.²⁰⁶

Agama-agama Samawi seperti Yahudi dan Nas}rani juga tidak melarang poligami. Tidak ada catatan bahwa agama-agama terdahulu melarang poligami, sejak zaman Nabi Ibrahim bahkan hal itu dibolehkan secara hukum dan dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan.²⁰⁷

Dalam Agama Yahudi sebagaimana disebutkan dalam Kitab Taurat poligami diperbolehkan tanpa menyebutkan batas jumlah tertentu.²⁰⁸ Taurat

²⁰⁴ Karam Hilmi Farhat, *Ta'addud al-Zawjat Bayn al-Adyan*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, *Poligami dalam Pandangan Islam, Yahudi dan Nas}rani*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 6

²⁰⁵ Musfir A1-Zahrani, *Nazharat fi Ta'addud Al-Zawjat*, (Riyadh: Maktabah al-Taubah, t.th.), hlm. 34

²⁰⁶ Mus}tafa al-Siba'iy, *Al-Mar'ah Bayn al-Fiqh wa Al-Qanun*, (Bairut: Dar al-Warraq, 1999), hlm. 60. Lihat juga 'Abdullah Nas}ih' 'Ulwan, *Ta'addud al-Zawjat fi Al-Islam wa Hikmatu Ta'addud Zawjat al-Nabiy* (ttp, Dar al-Salam, tt), hlm, 7. Lihat Juga D. Amarudin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, (Jakarta: Yayasan Adil, 2007), hlm, 1

²⁰⁷ Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Haqa'iq wa Abat}ilu Khus}umih*, (Bairut: al-Maktabah al-As}riyah, tt), hlm, 237

²⁰⁸ Abd al-Nas}ir Taufiq al-At}tar, *Ta'addud al-Zawjat Diniyah wa al-ljtima'iyah wa al-Qanuniyah*, (Kairo: tp, 1972), hlm, 87



juga menyebutkan tentang para Nabi yang melakukan poligami tanpa menyebutkan batas jumlah tertentu dan juga menyebutkan selain mereka.

Nabi Dawud memiliki 99 Istri dan anaknya Nabi Sulaiman memiliki 700 orang istri dari kalangan wanita merdeka dan 300 orang dari kalangan budak.²⁰⁹ Salah satu ayat dalam Taurat berbunyi “Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup”. Ayat Taurat ini menjelaskan bahwa poligami tidak diharamkan, akan tetapi yang diharamkan adalah seorang laki-laki menikahi saudari istrinya. Artinya ini adalah haramnya dua orang perempuan saudara kandung menikahi seorang laki-laki.²¹⁰

Dalam Injil tidak ditemukan larangan poligami sehingga praktek poligami telah dikenal dan dipraktekkan kalangan Nas}rani. Wester Mark, pakar sejarah perkawinan, menyatakan bahwa gereja mengakui poligami hingga abad XVII Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya kaum Nas}rani memegang teguh konsep monogami namun sebagian sekte seperti Mormon meyakini bahwa poligami adalah aturan Tuhan yang sua dan mereka tetap mempraktekkan poligami.²¹¹

Di Jazirah Arab sebelum Islam sudah mempraktekkan poligami, akan tetapi poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku saat itu mempunyai puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku memiliki istri sampai seratus.²¹² Setelah munculnya Islam para wanita mendapatkan perlakuan yang tidak merendahkan martabat dan harga

²⁰⁹ Mus}tafa al-Siba'iy, *loc. cit*

²¹⁰ Karam Hilmi Farhat, *op. cit.*, hlm. 7

²¹¹ Abbas Mahmud al-Aqqad, *op. cit.*, hlm. 177

²¹² Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2012), hlm, 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diri seorang wanita. Setelah turunnya *al-Nisa'*: 3, Islam membatasi jumlah istri hanya empat itupun dengan ketentuan harus adil.

Ada anggapan dari musuh Islam bahwa Nabi Muh}ammad melakukan poligami dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya.²¹³ Secara objektif dapat dikatakan, pernikahan Nabi Muh}ammad SAW jauh dari anggapan tersebut karena sebelumnya Nabi Muh}ammad menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun dan pada waktu itu Nabi Muh}ammad tidak berpoligami.²¹⁴

Perkawinan Nabi Muh}ammad dengan Khadijah berjalan penuh kebahagiaan dan berlangsung selama 25 tahun. Dua tahun setelah Khadijah wafat, baru Nabi menikah lagi, yaitu dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah merupakan wanita pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat dan ketika itu usia Saudah sudah agak lanjut. Tidak lama setelah pernikahannya dengan Saudah, Nabi menikah lagi dengan 'Aisyah binti Abu Bakar. Pada waktu inilah Nabi memulai kehidupan poligami setelah usianya 54 tahun, yang biasanya pada usia tersebut kemampuan seksual laki-laki mulai menurun.²¹⁵

Setelah 'Aisyah, Nabi berturut-turut mengawini Hafsa binti 'Umar ibn al-Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah binti Haris, Safiyah binti Huyay, Rayhanah binti Zaid, dan yang terakhir Maimunah binti Haris. Istri Nabi Muhammad sebagian besar

²¹³ 'Abdullah Nas}ih 'Ulwan, *op.cit*, hlm. 29

²¹⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), hlm. 21

²¹⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah janda-janda yang kurang menarik dalam hal kekayaan dan kecantikan.²¹⁶

Dari kesekian istri-istri Nabi Muhammad, hanya 'Aisyahlah satu-satunya istri Nabi yang perawan dan berusia muda.

Dalam sejarah kehidupan perkawinan Nabi Muhammad saw., ia pernah menjalani perkawinan poligami dengan sembilan orang istri dalam waktu yang bersamaan, jauh melebihi batas maksimal yang dibolehkan bagi umatnya, yakni empat orang istri. Ada beberapa alasan dan motivasi bagi Nabi Muhammad saw. dalam perkawinan poligaminya yang tentunya dapat diambil pelajaran dan hikmah oleh umatnya. Adapun motivasi dan hikmah Nabi Muhammad diizinkan beristri lebih dari seorang ialah sebagai berikut:

a. Untuk penyempurnaan Syari'at.

Di antara tujuan Nabi Muhammad saw berpoligami adalah untuk penyempurnaan syari'at. Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Zainab janda dari anak angkatnya Zaid bin Harisah adalah untuk membatalkan kebiasaan Jahiliyah dalam hal pengangkatan anak. Masyarakat jahiliyah ketika mengangkat anak, anak angkat tersebut akan diberlakukan hukum seperti anak kandung dalam nasab, waris dan lainnya. Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Zainab membatalkan kebiasaan jahiliyah tersebut.

b. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.

Tujuan pokok poligami menikahi wanita agar mereka mengajarkan hukum syara'.²¹⁷ Terutama mengenai masalah kewanitaan atau kerumahtanggaan seperti mandi junub, haid, nifas dan lainnya.²¹⁸

c. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam.²¹⁹ Poligami Nabi Muhammad untuk kepentingan politis ini terlihat pada perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, puteri al-Haris suku Bani Mustaliq,

²¹⁶ S. "Ali Yasir, *Di Balik Poligami Rasulullah saw.*, (Surabaya: PT, Bina Ilmu, 1982), hlm. 16

²¹⁷ 'Ali Al-S}abuni, *Kekeliruan Pandangan Terhadap Poligami Rasulullah saw*, Terj. Zamuddin, (Bandung: Tragenda Karya, 1993), hlm. 18. Lihat juga Ahmad al-Hufy, *Limadza 'Addada An-Nabiyyu Zawjatihi?*, Terj. Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, *Mengapa Rasulullah Berpoligami*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001, hlm. 100-101

²¹⁸ 'Abdullah Nas}ih 'Ulwan, *op. cit.*, hlm. 34

²¹⁹ 'Ali Al-S}abuni *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.²²⁰

Poligami Nabi Muhammad untuk kepentingan sosial terlihat pada perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya seperti Saudah binti Zum'ah, Hafsa binti 'Umar, Zainab binti Khuzaimah. Mereka memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, dan penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel: 3
Perbedaan poligami pra Islam dan poligami Nabi Muhammad saw⁴¹

No	Poligami pra Islam	Poligami Nabi Muhammad saw
1	Perempuan diposisikan sebagai manusia kelas dua	Perempuan pada hakikatnya setara dengan laki-laki . Hanya ketakwaannya yang membedakan.
2	Perempuan seperti materi, bisa diwarisi ketika suaminya meninggal dunia	Perempuan tidak lagi dipandang sebagai materi, tetapi manusia sempurna. Ia memperoleh hak warisan dari keluarga yang meninggal dunia.
3	Tidak ada pembatasan jumlah perempuan dalam praktek poligami	Ada pembatasan jumlah perempuan yang dinikahi dalam praktek poligami, yaitu empat orang perempuan
4	Tidak ada syarat dalam praktik poligami	Nilai keadilan laki-laki menjadi syarat dalam praktek poligami
5	Kegiatan cultural	Kegiatan yang mempunyai dimensi kemanusiaan dan ilahi
6	Kelebihan material yang dimiliki pihak laki-laki	Situasi tidak normal: perempuan muslim dalam teraniaya karena posisinya sebagai seorang janda dan pilihannya kepada Islam
7	Prestisesosial	Tanggung jawab kemanusiaan
8	Demi dorongan libido seksual	Tidak ada keterlibatan faktor libido, karena Istri-istri Nabi, kecuali Aisyah, semuanya janda tua.

²²⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebab Terjadi Poligami

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang suami melakukan poligami dalam kehidupan rumah tangga, antara lain:

- a. Istri tidak bisa melahirkan keturunan.²²¹ Salah satu penyebab suami berpoligami adalah karena istri tidak bisa melahirkan. Memiliki keturunan merupakan tujuan utama dari pernikahan,²²² ketika tujuan tersebut tak terwujud perkawinan jadi bermasalah. Untuk menghadapi masalah ini hanya ada dua jalan keluar, menceraikan istri yang mandul atau suami menikah lagi dengan wanita lain. Sebab pernikahan adalah mulia dan lebih baik bagi istri tersebut, karena perceraian hanya mengakibatkan kehilangan dan keadaan tidak menentu.²²³
- b. Istri menderita sakit²²⁴ seperti kemandulan, sakit juga akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Untuk mengatasi persoalan ini suami dihadapkan dua permasalahan. *Pertama*, suami menceraikan istrinya, *kedua*, menikah lagi dengan wanita lain (poligami) dan istri yang pertama masih tetap dalam perlindungan dan kasih sayangnya.
- c. Suami mempunyai libido seks yang kuat.²²⁵ Baik itu disebabkan istrinya sudah tua atau kondisi istri lemah atau karena banyaknya hari yang tidak memungkinkannya melakukan hubungan suami istri, yaitu saat haid, hamil, setelah melahirkan, sakit atau sebab-sebab uzur yang lain. Dalam kondisi ini tentu suami akan memilih di antara dua hal yaitu memenuhi keinginan biologisnya dengan cara yang haram atau berzina atau suami menikah lagi

²²¹ ‘Abdullah Nas}ih ‘Ulwan, *op. cit.*, hlm. 15

²²² Baca ‘Abd al-Nas}ir Taufiq al-At}tar, *op. cit.*, h\lm. 24

²²³ ‘Abdullah Nas}ih ‘Ulwan, *loc. cit.*

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Muh}ammad bin Musfir al-T}awil, *Ta’adud al-Zawjat fi al-Islam*, (Iskandariyah: Dar al-Iman, t.th.), hlm, 19.



dengan wanita lain. Dalam hal ini prinsip-prinsip moral dan hukum-hukum syari'at akan memilih pernikahan dibandingkan melakukan perbuatan zina.²²⁶

- d. Suami Sering Bepergian.²²⁷ Banyak laki-laki yang karena pekerjaannya harus selalu bepergian dan dalam perjalanan tersebut tidak bisa membawa istri maka salah satu solusi adalah poligami.²²⁸
- e. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki.²²⁹ Dalam keadaan darurat, terutama dalam keadaan perang atau pasca perang, banyak wanita menjadi janda, anak kehilangan bapak karena banyak pejuang yang gugur di medan perang. Poligami merupakan jalan keluar dan penyelamatan bagi janda-janda dan anak-anak yatim.
- f. Faktor ekonomi. Pada zaman dahulu, tidak seperti di zaman sekarang, mempunyai banyak istri dan banyak anak adalah menguntungkan pria secara ekonomis. Kaum pria biasa menyuruh istri dan anaknya bekerja sebagai budak, dan sekali-sekali menjual anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukanlah perampasan dalam peperangan, ayah merekalah yang telah membawa dan menjual mereka ke pasar.²³⁰
- g. Masa subur wanita terbatas. Sebagian orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia produktif wanita, yakni masa menopause, adalah salah satu penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita mungkin mencapai masa menopause sebelum melahirkan banyak anak. Hasrat pria untuk mempunyai anak, serta ketidaksukaannya menceraikan istri

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ 'Abdullah Nas}ih 'Ulwan, *loc. cit.*

²²⁹ *Ibid*, hlm. 13, Bibit Suprpto, *Op. cit.*, hlm. 99

²³⁰ Murtad}a Mutahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: PT, Lentera Baseitama, 2000), hlm, 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertamanya, menjadi sebab ia mengawini istri yang kedua dan seterusnya.²³¹

- h. Istri telah lanjut usia.²³² Lanjut usia merupakan salah satu faktor penyebab laki-laki berpoligami karena dengan lanjutnya usia seorang perempuan tidak bisa melayani suami dalam hal hubungan suami istri.

4. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (القرآن: النساء: ٣)²³³

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang raja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat di atas, dimulai dengan perintah bertaqwa kepada Allah yang telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan perintah memelihara hubungan silaturrahi antara sesama manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk memberikan kepada anak-anak yatim hartanya, jika mereka sudah baligh, dan larangan menukar yang baik dengan yang buruk atau menguasai harta mereka secara tidak benar.

Pemeliharaan anak yatim (jika ia perempuan) oleh wali laki-laki, dapat dilakukan secara maksimal kalau ia menikahnya. Sebagai ikatan secara sadar,

²³¹ Ibid., hlm. 224. Bandingkan dengan Muh}ammad bin Musafir al-T}awil, *op. cit.*, hlm. 20

²³² A. Rahman I. Doi, *Syari'ah T}e Islamic Law, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Terj. Zainuddin dan Ruysdi Sulaiman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193

²³³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Kanleema, 2009), hlm. 77



tidak bisa dipungkiri kalau si laki-laki memiliki motivasi material untuk menguasai harta anak itu. Hal inilah yang secara tegas diantisipasi oleh ayat di atas, bahwa kalau timbul kekhawatiran tidak akan berlaku amanah terhadap harta mereka, nikahilah perempuan lain yang disukai.

Dengan demikian terlihat bahwa sesungguhnya inti pembicaraan (induk kalimat) ayat 3 itu adalah tentang perlakuan terhadap anak yatim, terutama anak yatim perempuan. Terhadap mereka dituntut perlakuan adil dari walinya yang tidak hanya berarti bersikap sama seperti perlakuan terhadap perempuan lain, apalagi kalau si wali menikahnya. Tuntutan itu sangat logis, karena si wali tersebut memikul dua amanah sekaligus, selain sebagai wali, ia juga menjadi suami si anak yatim itu.

Inti pembicaraan itu disambung (anak kalimat) dengan perintah bersyarat (kalau si wali khawatir tidak berbuat adil terhadap mereka) untuk menikahi perempuan lain yang ia sukai. Artinya, perlakuan tidak adil wali terhadap anak yatim yang dinikahi sebanding beratnya dengan menikahi beberapa orang perempuan yang bukan yatim dan bukan *mawla*-nya.

Harus diakui bahwa dengan sambungan perintah bersyarat itu, dapat disimpulkan bahwa ayat itu memberikan kebolehan menikahi lebih dari seorang perempuan (maksimal empat orang). Kebolehan itu pun semestinya tidak dipahami sampai di situ saja, sebab masih dalam ayat yang sama disebutkan bahwa kalau terhadap perempuan bukan yatim yang dinikahi lebih dari satu orang itu juga seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil, maka ia diperintah hanya menikahi satu orang saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berkaitan dengan ayat 3 yang terdapat dalam surat *al-Al-Nisa'* (4) di atas, 'Aisyah menyampaikan tiga penjelasan tentang sebab turunnya.³⁷

Penjelasan *pertama*, yang diriwayatkan al-Bukhariy (w. 256 H), menceritakan tentang seorang laki-laki yang menjadi wali dan menikahi seorang anak yatim perempuan, *mawla*-nya, yang memiliki harta kekayaan. Setelah menikah, ia menguasai harta itu sendirian. Dalam kaitan inilah ayat tersebut turun.

Penjelasan *kedua*, juga diriwayatkan al-Bukhariy, 'Urwah bin Zubayr bertanya kepada 'Aisyah tentang ayat tersebut. 'Aisyah menjawab bahwa ayat itu berbicara tentang seorang anak yatim perempuan, yang berada dalam kekuasaan walinya, berserikat dengan walinya itu dalam hal harta (dalam riwayat lain disebutkan: walau harta itu hanya ranting. Kemudian si wali merasa tertarik pada harta dan kecantikan anak yatim tersebut dan bermaksud menikahnya tanpa kesediaan berbuat adil dalam nafkahnya, dengan hanya memberinya nafkah sama seperti orang lain (yang bukan walinya) memberinya nafkah. Ia dilarang menikahnya, kecuali kalau ia bisa berbuat adil kepadanya. Sebagai gantinya, ia disuruh menikah dengan perempuan lain yang disukainya.²³⁴

Penjelasan *ketiga* disampaikan 'Aisyah kepada 'Urwah bahwa, setelah ayat itu diturunkan, orang-orang masih minta penjelasan kepada Rasulullah, oleh karena itu turunklah ayat 127 surat *al-Al-Nisa'* (4), yang menjelaskan tentang para wanita yatim yang tidak diberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang walinya ingin mengawini mereka dan tentang

²³⁴ Lihat juga dalam: Muh}ammad al-Alusiyy, *Ruh al-Ma'ainiy fi Tafsir al-Qur'an al-'Az}im wa al-Sab' al-Masaniy*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas} al-'Arabiyy, t.th.), Juz 4, hlm: 189. Lihat Juga Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi Bakar bin Farh al-Qut}ubiy, *al-Ah}kam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syayb, 1372 H), Juz 5, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak-anak yang masih dipandang lemah. Ayat itu juga menegaskan bahwa Allah menyuruh walinya supaya mengurus anak-anak yatim secara adil.

Berdasar hadis yang diriwayatkan Imam Muslim (w. 261 H), ayat itu turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang punya anak yatim dan dia langsung sebagai walinya. Anak itu punya beberapa harta, kata Nabi: Jangan ia nikahi karena mengharapkan hartanya, lalu ia disakiti dan disia-siakan kesehatannya. Jika takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim itu, kawinilah perempuan lain dan diperbolehkan membatalkan niat untuk kawin dengan anak yatim itu.²³⁵

Secara sosiologis, ayat itu turun untuk meresponi kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat, enam dan sepuluh. Mereka berpendirian bahwa tidak satupun yang dapat melarangku menikah, sebagaimana yang dilakukan si fulan (dalam hal jumlah).²³⁶ Dalam budaya seperti itu, mereka tidak merasa terbebani sama sekali untuk berlaku adil terhadap para istri mereka yang banyak itu, baik di antara para istri itu terdapat anak yatim yang dulunya ia asuh atau tidak. Dalam masyarakat Arab pada waktu itu, juga sudah menjadi sesuatu yang dipandang biasa kalau seseorang menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya, sebagai biaya pernikahannya dengan perempuan lain. Tidak dipandang cacat atau hina kalau wali yang mengasuh si anak yatim perempuan, mengambil keuntungan dari anak tersebut dengan menjadikannya sebagai pelacur. Dengan turunnya ayat tersebut, nasib anak yatim diselamatkan dari semua ketidak-adilan yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³⁵ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayriy al-Naysaburiy (Muslim), *S}ah}ih} Muslim*, (Beirut, Dar Ihya' al-Turas} al-'Arabiyy, t.th.), Juz. 4, hlm, 2313

²³⁶ Muh}ammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-T}abariyy, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil 'as al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 4, hlm, 233



diterimanya selama ini. Ayat itu sekaligus, membatasi kebolehan menikah hanya sampai empat orang perempuan dalam satu waktu.²³⁷

Tentang penggunaan huruf *ma* () sebagai kata sambung *mawsul*), kenapa bukan *man* (), sementara kata *ma* itu biasanya digunakan bukan untuk manusia, al-T{abariy (w. 310 H)²³⁸ menjelaskan bahwa makna sesungguhnya dari ayat itu adalah nikahilah dengan nikah yang baik.

Dalam ayat di atas terdapat lafaz *amar* (perintah menikah, yaitu:) Mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz *amar* menunjukkan kewajiban²³⁹ untuk melaksanakan yang diperintah tersebut selama tidak ada *qarinah*²⁴⁰ yang menunjukkan makna lain.²⁴¹

Muhammad 'Ali al-Sayis (w.1976) dalam bukunya *Tafsir Ayat al-Ahkam* menyebutkan bahwa lafaz *amar* (perintah menikah) dalam surat *al-Nisa*' ayat 3 di atas berarti *al-Ibahah* (kebolehan) saja bukan wajib bukan pula sunat, yang berpendapat wajib itu, bermaksud untuk wajib membatasi jumlah istri tersebut empat bukan wajib menikahi lebih dari seorang perempuan.²⁴²

Menurut al-Tabariy (w. 310 H)²⁴³ perintah menikah () yang terdapat dalam ayat tersebut tidak bermakna wajib dan mengikat, akan tetapi bermakna pengajaran dan pemberitahuan. Hal itu disebabkan adanya *qarinah*

²³⁷ 'Abd al-Rahman bin 'Ali bin Muh{ammad al-Jawziy (Ibn al-Jawziy), *Zad al-Masir*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1404 H), Juz 2, hlm. 5

²³⁸ Al-T{abariy, *op. cit.*, hlm. 236-237

²³⁹ Sebagian ulama berpendapat bahwa hakikat *amar* adalah *nadab* (sunnat), pendapat ini diemukakan oleh Abu Hasyim, mayoritas ulama muktazilah dan satu riwayat Dari Imam Syafi'i. Baca Mus{tafa al-Khinn, *Asjar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Us{juliyah fi Ikhtilaf al-Fuqahaq*, (Beirut: Matassasah al-Risalah, 1985), hlm. 300

²⁴⁰ Menurut 'At{a bin Khalil *qarinah* adalah segala sesuatu yang memperjelas jenis tuntutan dan menentukan makna tuntutan itu jika dia digabungkan atau dibarengkan dengan tuntutan tersebut. Baca 'At{a' bin Khalil, *Taysir Wus{ul ila al-Us{ul*, (Beirut: Dar al-Ummah. 2000), hlm. 281

²⁴¹ Wahbah al-Zuh{aili (al-Zuh{aili), *Us{fil al-Fiqh al-Islamy*, (Damsiyq: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 215.

²⁴² Muh{ammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir: Mat{ba'ah Muh{ammad 'Abih, 1953), Juz II, hlm. 24

²⁴³ *Ibid.*, Juz. 4, hlm. 238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Masim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang memaling makna tersebut, yaitu frase “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim*”. Walaupun bentuk katanya adalah perintah, akan tetapi dengan adanya *qarinah* ini ia bermakna larangan terhadap pernikahan poligami yang dikhawatirkan akan mencelakakan para istri, bukan bermakna perintah untuk melakukan poligami. Makna ayat itu adalah “Jika kalian khawatir tidak akan berlaku terhadap Para perempuan yatim dan perempuan bukan yatim, maka janganlah kamu nikahi kecuali pernikahan halal yang kamu merasa yakin tidak akan mencelakai mereka, satu sampai empat orang”.

Di dalam bahasa Arab sendiri, termasuk dalam Alquran, sudah menjadi kebiasaan menggunakan kalimat perintah dengan makna larangan dan ancaman. Dijelaskan oleh al-Tabariy,²⁴⁴ sesungguhnya ayat itu memberikan pemahaman terbalik. Makna ayat itu adalah: apabila engkau khawatir tidak akan berlaku adil dengan menikahi empat orang, maka nikahi tiga orang saja. Apabila engkau khawatir tidak akan berlaku adil dengan menikahi tiga orang, nikahi dua orang saja. Apabila engkau masih merasa khawatir tidak akan berlaku adil dengan menikahi dua orang, nikahi satu orang saja. Akan tetapi, apabila engkau tetap khawatir tidak akan berlaku adil dengan menikahi satu orang perempuan (merdeka), cukuplah bagimu para budak perempuan yang engkau miliki.

State Islamic University of Sultan Syarif Ka'im Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴⁴ Al-T}abariy, *op. cit.*, Juz 4, hlm, 234, Muh}ammad bin ‘Ali bin Muh}ammad al-Syawkaniy (al-Syawkaniy), *Fathu al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz.1 hlm. 242

Makna perintah menikah (setelah syarat) yang terdapat di dalamnya, menurut al-Tabariy (w. 310 H),²⁴⁵ adalah untuk “larangan”. Hingga ayat tersebut berarti kamu khawatir wahai para wali anak yatim, untuk tidak berlaku adil dalam hal nafkah mereka,²⁴⁶ dengan hanya memberikan nafkah yang sama dengan perempuan lain, jangan kamu nikahi mereka, tetapi nikahilah perempuan lain yang telah dihalalkan Allah untukmu satu sampai empat orang. Jika kamu masih khawatir akan berbuat aniaya kepada perempuan lain yang kamu nikahi lebih dari satu orang itu, dengan tidak berbuat adil, maka nikahilah hanya seorang saja atau (nikahi) budak perempuanmu.

Kata *al-'adl* ()²⁴⁷ dan *al-qist* () yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang menganggap sama maknanya²⁴⁸ dan ada yang membedakannya. *Al-'adl* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Adapun *al-qist* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.²⁴⁹

²⁴⁵ Al-T}abariy, *Ibid*, Juz 4, hlm. 231, Penjelasan al-T}abariy ini merupakan salah satu penjelasan yang diberikan oleh 'Aisyah kepada 'Urwah dalam memahami ayat itu. Lihat misalnya dalam: Al-Jas}sas}, *op. cit.*, Juz. 2, hlm, 341

²⁴⁶ Menurut al-Qurt}ubiy, keadilan itu dituntut tidak hanya dalam masalah nafkah, tapi juga dalam hal mahar untuk si anak yatim tersebut. Lihat dalam: Al-Qurt}ubiy, *loc cit.*

²⁴⁷ Kata itu merupakan mas}dar dengan makna *al-'adalah*, yaitu sikap pertengahan dan konsisten dengan kebenaran. Lihat dalam: Zakariya bin Muh}ammad bin Zakariya al-Ans}ariy Abu Ya}y}ya, *al-Hudud al-Aniqah*, (t.tp. Dar al-Fikr al-Mu'as}ir, 1411 H), Juz 1, hlm. 73. Dalam ilmu keislaman sendiri kata ini juga diartikan secara beragam. Misalnya, dalam ilmu *Nahwu*, kata itu diartikan dengan perubahan suatu *isim* Dari bentuk aslinya kepada bentuk lain. Para *fuqaha'*, termasuk juga ulama hadis, sendiri mengartikannya dengan keadaan seseorang yang menjauhi dosa besar, tidak membiasakan diri dengan dosa kecil dengan lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, serta menjauhi perbuatan yang tidak terpuji, seperti makan dan buang air kecil di jalan. Lihat dalam: 'Ali bin Muh}ammad bin 'Ali al-Jurjaniy (disebut: al-Jurjaniy), *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1405 H), hlm. 191

²⁴⁸ Penyamaan makna dua kata ini bisa dirujuk Dari penggunaan bahasa tersebut dalam 'urf bahasa Arab. Misalnya lihat dalam: Yaqut bin 'Abdillah al-Humawiy Abu 'Abudillah, *Mu'jam al-Buldan* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 2, hlm, 410

²⁴⁹ Muh}ammad Qurais} S}ihab, *Tafsir al-Mis}bah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), vol 2, hlm. 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Walau demikian, al-Munawiy²⁵⁰ menegaskan bahwa kata *al-'adl* itu memang lebih banyak digunakan untuk persoalan-persoalan yang bersifat lahiriyah. Ia mengatakan bahwa kata adil biasanya digunakan untuk dua kategori: *Pertama*, untuk persoalan-persoalan yang bisa dinilai dengan penalaran inderawi, seperti persoalan yang berhubungan dengan hukum. *Kedua*, persoalan-persoalan yang dapat diindera, seperti hal-hal yang dapat ditimbang, dibilang, dan ditakar.

Dalam konteks ayat ini, kata *al-qist* itu diartikan secara beragam. Akan tetapi semua pengertian yang dikemukakan ulama tafsir tetap mengacu pada keadilan yang bersifat inderawi (lahiriyah) seperti adil dalam mahar dan nafkah. Al-Nakha'iy (w. 96 H). hal ini disebutkan oleh al-Qurtubiy (w. 671 H),²⁵¹ mengartikan frase “jika kamu khawatir tidak berlaku adil” di atas dengan khawatir akan menyakiti istri.

Ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik dalam perintah Allah untuk menikah yang terdapat di dalam surat *al-Nisa'* [4] ayat 3 di atas. Pertanyaannya adalah: Kenapa Allah memerintahkan untuk menikah, padahal tanpa diperintahkanpun manusia tetap akan menikah? Pertanyaan yang sama juga muncul terhadap surat *al-A'raf* [7] ayat 31, yang berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - ٣١ -

Artinya: “...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

²⁵⁰ Muh}ammad ‘Abd al-Ra’uf al-Munawiy, *al-Tawqif ‘Ala Muhimmat al-Ta’arif*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1410 H), hlm. 506

²⁵¹ Al-Qurtubiy, *op. cit.*, Juz 5, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa menikah sama dengan makan dan minum, keduanya merupakan kebutuhan yang secara naluriah, tanpa diperintahkanpun, akan dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum. Pertanyaannya, kenapa Allah memerintahkan sesuatu yang secara naluriah tetap akan dilakukan manusia? Sementara Allah sendiri mencela pekerjaan (tentu juga perkataan) yang sia-sia.²⁵²

Oleh karena itu, maksud sesungguhnya dari Allah bukanlah menyuruh untuk makan dan minum, akan tetapi muatan pembicaraan sesungguhnya terdapat di belakang perintah makan dan minum itu, yaitu larangan berperilaku boros atau mubazir, karena sikap mubazir itu mendekatkan pelakunya kepada setan. Dengan alur pikir seperti ini, pemahaman yang lebih benar terhadap ayat perintah makan dan minum di atas adalah “selama kalian bisa menahan dari perbuatan mubazir, maka silakan makan dan minum”.

Menggunakan alur pikir yang sama terhadap ayat “perintah menikah” di atas, muatan pembicaraan sesungguhnya dalam ayat itu terdapat pada sikap adil dalam hidup sebagai suami. Pemahaman yang lebih benar terhadap ayat itu “kalau kalian bisa berlaku adil, silahkan menikah lebih dari satu orang, Akan tetapi, kalau kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukup menikahi satu orang istri saja”. Malah, kalau ia masih khawatir tidak bisa berbuat adil dengan hanya menikahi satu orang perempuan itu, diperintah hanya menjadikan budak perempuannya sebagai

²⁵² Lihat misalnya: QS. ‘Ali ‘Imran [3] ayat 191, *al-Tawbah* [9] ayat 17 dan 69, *al-Ra’d* [13] ayat 14, *al-Kahf* [18] ayat 104, *al-Mu’minun* [23] ayat 25, *al-Mu’min* [40] ayat 50, *al-Syura*. 142 ayat 16 dan *Hud* [11] ayat 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“pengganti” istrinya.²⁵³ Pemahaman seperti ini mendapat pengukuhan dengan diturunkannya surat *al-Nisa'* [4] ayat 129, yang menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap para istri mereka (yang lebih dari satu).

Mukhatab (subjek) yang diperintah dalam ayat di atas, menurut Imam Syafi'i (w. 204 H),²⁵⁴ adalah kaum laki-laki yang merdeka. Hal itu dapat dipahami dengan disertakannya frase “atau budak-budak yang kamu miliki”, sementara tidak ada orang lain yang memiliki budak selain orang-orang yang merdeka. Selain itu, juga dapat dipahami dengan penambahan frase “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Sebab yang bisa berbuat aniaya hanyalah orang yang memiliki harta, sementara para budak tidak memiliki harta sama sekali; malah mereka disamakan dengan harta. Karenanya, seperti disebutkan al-Jassas (w. 370 H)²⁵⁵ secara keseluruhan ayat itu memberikan kebolehan bagi laki-laki merdeka untuk menikahi perempuan, maksimal, sebanyak empat orang.

b. Hadis Hadis Riwayat Ahmad

عن عائشة رضي الله عنها قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرَةٌ نِسْوَةٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمْسِكْ أَرْبَعَ أَوْ فَارِقْ سَائِرَ نِّسَائِهِنَّ

²⁵³ Huruf *aw* (ا), sebagai huruf ‘*At/af*’, bermakna pilihan. Abu al-Qasim ‘Abdurrahman bin Isma‘il al-Zujajiy (disebut al-Zujajiy), *Kitab Huruf al-Ma'aniy*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984), hlm. 13. Artinya dengan adanya huruf tersebut, maka si *mukhathab* disuruh memilih antara memihak dengan seorang perempuan merdeka atau dengan budak perempuannya. Imam al-T}abariy menyampaikan pendapat yang dikemukakan oleh Abu. Ja'far, bahwa adil di situ juga bisa berarti “tidak menyakiti”. Hingga kalau terhadap satu orang istri pun si lelaki masih khawatir akan menyakitinya, maka ia juga dilarang untuk menikah. Cukup baginya budak perempuannya. Al-T}abariy, *op. cit.*, Juz 3, hlm. 573

²⁵⁴ Muh}ammad bin Idris al-Syafi'iy Abu ‘Abdillah, *Ahkam al-Qur'an li al-Syafi'i*, (Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H), Juz. 1, hlm. 180. Lihat juga: Muh}ammad bin Idris al-Syafi'i (disebut al-Syafi'i), *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H), Juz. 5, hlm. 41

²⁵⁵ Al-Jas}as}, *op. cit.*, Juz 2, hlm. 347

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

غَيْلَانُ بْنُ سَلَامَةَ الثَّقَفِيُّ اسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَسْرُ نِسْوَةٍ اسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ هُنَّ أَرْبَعًا. (رواه أحمد و الترمذي و ابن ماجه و ابن حبان والبيهقي والحاكم)²⁵⁶

Artinya: “Dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa salam bersabda “Ghaylan bin Salamah al-Tsaqafiy masuk Islam, sementara di masa jahiliyah ia memiliki 10 orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Nabi SAW menyuruhnya memilih empat orang di antara mereka”. (HR. Ahmad bin Hanbal, al-Turmudziy, Ibn Majah, Ibn Hibban, al-Bayhaqiy, al-Daruquthniy, dan al-Hakim).

Hadis di atas, menjelaskan bahwa Rasulullah dengan tegas memerintahkan kepada Ghaylan untuk menceraikan enam orang dari 10 orang istrinya, dan mempertahankan empat orang istri sesuai dengan yang ia kehendaki. Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa seorang suami dalam Islam hanya boleh memiliki empat orang istri.

c. Hadis Riwayat Abu Dawud

الْأَسَدِيُّ قَالَ : أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْتَرِ مِنْ هُنَّ أَرْبَعًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنَا بِهِمْ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ. (رواه ابو داود والبيهقي والدرقطني)²⁵⁷

²⁵⁶ Ah}mad bin Hanbal Abu ‘Abdillah al-Syaybaniy (disebut Ah}mad), *Musnad Ah}mad bin Hanbal*, (Kairo: Mu’assasah al-Qurthuhah, t.th.), Juz 2, hlm, 44 dan 83. Muh}ammad bin ‘Isa Abi ‘Isa al-Turmudziy (disebut: al-Turmudziy), *Sunan al-Turmudziy*, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turas} al-Arabiyy, t.th.), Juz 3, hlm, 435. Muh}ammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwayni (disebut Ibn Majah), *Sunan Ibn M}ajah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 1, hlm. 628. Muh}ammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimiyy (disebut. Ibn Hibban), *S}ahih Ibn Hibban*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), Juz 9, hlm. 466, Ah}mad bin al-Husayn bin ‘Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayh}aqiy (al-Bayh}aqiy), *Sunan al-Bayh}aqiy al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 149, 182, 183 dan 184. ‘Ali bin ‘Umar Abu al-Hasan al-Daruqut}niy (selanjutnya disebut: al-Daruqut}niy), *Sunan al-Daruqut}niy*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966), Juz 3, hlm. 269 dan 271. Muh}ammad bin ‘Abdillah Abu ‘Abdillah al-Hakim al-Naysaburiy (disebut Hakim), *al-Mustadrak ‘ala al-S}ahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 2, hlm., 209 dan 210. Lihat juga: Muh}ammad bin ‘Ali bin Muh}ammad al-Syawkaniy (al-Syawkaniy), *Nay al-Awt}ar min Ah}adis} Sayd al-Akhbar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, (t.tp: Idarah al-T}aba’ah alMinbarah, t.th.), Juz 6, hlm. 302. Muh}ammad bin Abi Bakar Ayyub al-Zar’iy Abu ‘Abdillah (Ibn al-Qayyim), *Hasyiyah Ibn al-Qayyim*, (Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), Juz 6, hlm. 235

²⁵⁷ Sulayman bin al-Asy’as} Abu Dawud al-Sajastaniy (Abu Dawud), *Sunan Abi Dawud*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 2, hlm. 272. al-Bayhaqiy, *op. cit.*, Juz 7, hlm. 149, 183 dan 184. Al-Daruquthniy, *op. cit.*, Juz 3, hlm. 270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Al-Asadi berkata, “Tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang istri. Aku memberitahukan hal itu kepada Nabi salla ‘alaihi wa sallam. ia mengatakan: pilih dari mereka empat orang”. Abu Daud berkata, “Bercerita kepada kami tentang hadis\ tersebut Ahmad bin Ibrahim, bercerita kepada kami Husyaim dengan hadits ini dan ia berkata, “Qais bin al-Haris\ sebagai ganti dari al-Haris\ bin Qais. Ahmad bin Ibrâhîm berkata, “ Inilah yang benar yakni Qais bin al-Haris. (HR. Abu Dawud, al-Bayhaqiy dan al-Daruquthniy)”.

Hadis di atas mengandung pengertian yang sangat jelas, bawah seorang muslim tidak boleh memiliki istri lebih dari empat orang. Buktinya, Rasulullah memerintahkan kepada al-Asadi agar menceraikan empat orang istrinya dari delapan orang istri yang ia miliki semasa ia belum memeluk agama Islam. al-Asadi melaksanakan perintah Rasulullah dengan menikahi empat orang istri saja.

Tentang al-Haris yang disebutkan dalam hadis di atas, seperti dijelaskan al-Syawkaniy (w. 1250 H),²⁵⁸ sebagian ada yang mengatakan ia bernama Qays bin al-Haris, sedang sebagian lagi ada yang mengatakan ia bernama al-Haris bin Qays. Ia tidak termasuk orang yang populer di kalangan ulama hadis, karena hanya satu hadis ini yang riwayatnya melalui al-Haris, dan Abu ‘Umar al-Nimriy menilai hadis tersebut tidak memenuhi kriteria *sahih*. Akan tetapi hadis senada juga diriwayatkan berasal dari Ghaylan al-Saqafiyy yang ketika masuk Islam memiliki 10 orang istri yang juga ikut masuk Islam. Nawfal bin Mu’awiyah, menurut Syafi’i,²⁵⁹ ketika masuk Islam juga memiliki istri yang lebih dari 4 orang, istrinya 5 orang, dan kepadanya

²⁵⁸ Al-Syawkaniy, *op. cit.*, Juz 6, hlm 289. Lihat juga: Muh}ammad Syams al-Haqq al-‘Azhim Abadiy Abu al-Thayyib (al-‘Azhim Abadiy), *‘Awn al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H), Juz 6, hlm. 235-236

²⁵⁹ Dalam sanadnya terdapat orang yang *majhul*, karena dalam periwayatannya al-Syafi’i menyebutkan “sebagian sahabat kami menyampaikan hadis Dari Abi al-Zinad...”, Muh}ammad bin Idnîs Abu ‘Abdillah al-Syafi’i, *Musnad al-Syafi’i* (Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Juz 1, hlm, 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rasulullah juga menyuruh mempertahankan sebanyak empat orang, dan menceraikan sisanya.

Al-Haris, seperti disebutkan al-Azhim Abadiy,²⁶⁰ menjelaskan secara zhahir kata “pilihlah” dalam perintah memilih empat orang di antara para istri dalam hadis di atas (منهن) bermakna menahan istri-istri yang diinginkan sebanyak empat orang dari seluruh istri yang ada, tanpa membedakan apakah akad terhadap mereka dilakukan sekaligus atau berurutan.

Sehubungan dengan cara pemilihan istri-istri sebanyak empat orang dari seluruh istri yang ada, Imam Malik (w. 179 H), Syafi’i (w. 204 H), Ahmad (w. 241 H) dan Ishaq (w. 237 H) berpendapat bahwa hal itu dilakukan semata didasarkan pada keinginan suami, tanpa membedakan apakah akad terhadap mereka dilakukan sekaligus atau berurutan. Sementara Imam Abu Hanifah (w. 150 H) dan al-Sawriy (w. 161 H) berpendapat bahwa apabila pernikahan dengan semua istri itu terjadi sekaligus, suami harus menceraikan semua istrinya itu. Lain halnya apabila pernikahan itu terjadi secara bertahap, suami harus mempertahankan para istri yang dinikahi lebih dulu, dan menceraikan yang belakangan. Imam Abu Hanifah, meneruskan pendapat yang diriwayatkan dari al-Nakha’iy, menegaskan bahwa pernikahan dengan empat orang istri yang pertama adalah sah, sementara pernikahan dengan istri kelima dan seterusnya adalah batal.²⁶¹

²⁶⁰ Al- ‘Azhim Abadiy, *op. cit.*, Juz 6, hlm. 234

²⁶¹ *Ibid.*, Juz 6, hlm. 235, Lihat juga; Muh}ammad ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Rahim al-Mubbar Kafuriy Abu al ‘Ala, *Tuhfah al-Ahwaz/iy Bi Syarh Jami' al-Tur mudziy*, (Beirut: Dar al-Kutub t.), Juz. 4, hlm, 233, dan al-Syawkaniy 1, *op. cit.*, Juz 6, hlm, 289-290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tentang beristri lebih dan satu ini, ulama sepakat (tidak ada perbedaan pendapat)²⁶² mengatakan bahwa hal itu dibolehkan selama tidak “menggabungkan” dua orang bersaudara atau memiliki hubungan nasab. Larangan penggabungan dua orang bersaudara sebagai istri itu didasarkan pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْأُخْتُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَاتِهَا وَلَا الْخَالَاتُ عَلَى بَنَاتِ أَخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Daud bin Abu Hindun, dari 'Amir, dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya (saudari ayah), dan seorang bibi dinikahi sebagai madu anak wanita saudara laki-lakinya, dan tidak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya (saudari ibu) dan seorang bibi sebagai madu bagi anak wanita saudara wanitanya. Dan tidak boleh seorang kakak wanita dinikahi sebagai madu adik wanitanya, dan adik wanita dinikahi sebagai madu kakak wanitanya.".” (HR. Abu Dawud)²⁶³

Sabda Rasulullah di atas menjelaskan, bahwa tidak boleh seorang laki-laki (suami) menghimpun dua orang wanita yang ada hubungan kemahramannya sebagai istri. Yang dilarang itu adalah suami menikahi bibinya (saudari ayah) sebagai madu, dan seorang bibi dinikahi sebagai madu anak wanita saudara laki-lakinya, dan tidak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya (saudari ibu) dan seorang bibi sebagai madu bagi anak wanita saudara wanitanya. Dan

²⁶² Al-Syawkaniiy, *op. cit.*, Juz 6, hlm, 303

²⁶³ Abu Dawud, *op. cit.*, Juz 2, No. 1768, hlm. 272, Lihat juga, Bukhary No. 4716: Ibn Majah, *op. cit.*, Juz I, hlm. 627, Hadis senada juga diriwayatkan oleh al-Turmudziy, al-Bayhaqiy, dan al-Daruquthniy. Lihat dalam: al-Turmudziy, *op. cit.*, Juz 3, hlm. 436. al-Bayhaqiy, *op. cit.*, Juz 7, hlm. 184. Al-Daruquthniy, *op. cit.*, Juz 3, hlm., 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak boleh seorang kakak wanita dinikahi sebagai madu adik wanitanya, dan adik wanita dinikahi sebagai madu kakak wanitanya.

Imam al-Syafi'i, Malik dan Ahmad, seperti disebutkan al-'Azhim Abadiy,²⁶⁴ berpendapat bahwa kalau seseorang masuk Islam, sementara ia memiliki dua orang istri yang bersaudara yang juga ikut masuk Islam, maka ia harus memilih salah satu dari keduanya, terserah apakah yang dinikahi pertama kali atau yang terakhir. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kalau kedua orang istri bersaudara itu dinikahi bersamaan, maka suami tidak boleh sama sekali memilih salah satu dari keduanya. Akan tetapi jika keduanya dinikahi secara berurutan, maka suami harus memilih yang pertama dan menceraikan yang kedua. 'Azim Abadiy sendiri berpendapat bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi yang memberikan hak kepada suami untuk memilih.

Hadis di atas, juga dapat dihubungkan dengan hadis lain yang menceritakan tentang masuk Islamnya al-Haris dan Ghaylan. Hadis tersebut juga memunculkan pemahaman bahwa pernikahan yang dilakukan orang kafir, setelah ia masuk Islam, tetap dipandang sah; ia tidak disuruh untuk memperbaharui nikah itu, apabila dalam pernikahan itu sendiri terdapat hal-hal yang secara substansial dilarang dalam Islam, seperti jumlah istri yang lebih dari empat orang atau di antara para istri itu terdapat orang-orang (perempuan) yang dilarang dinikahi, baik secara perorangan (seperti *muhrim*) ataupun gabungan (seperti dua perempuan bersaudara).²⁶⁵

²⁶⁴ 'Azhim Abadiy, *op. cit.*, Juz 6, hlm, 237

²⁶⁵ Al-Mubar Kafurly, *op. cit.*, Juz 4, hlm, 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masih sejalan dengan persoalan ini, seperti disebutkan al-Bayhaqiy,”

para sahabat juga secara *ijma'* mengatakan bahwa seorang budak tidak boleh menikah lebih dari dua orang istri. Menurut Imam al-Syafi'i, juga disebutkan al-Bayhaqiy,²⁶⁶ pendapat tersebut berasal dari 'Umar bin Khaththab dan 'Ali bin Abi Talib yang tidak dibantah oleh sahabat lain.

5. Hukum Poligami

Hukum nikah lebih dari satu atau poligami sangat berkaitan dengan hukum menikah itu sendiri. Para ulama fikih menyebutkan bahwa hukum menikah meliputi kelima hukum *taklifi*, yaitu wajib, sunnat, mubah, makruh dan haram.²⁶⁷

Nikah hukumnya wajib, bagi orang yang mempunyai hasrat yang tinggi untuk menikah karena syahwatnya bergejolak sedangkan dia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Dia merasa terganggu dengan gejolak syahwatnya, sehingga dikawatirkan akan terjerumus di dalam perzinahan.²⁶⁸

Adapun bagi orang yang mempunyai syahwat, dan mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam inaksiat dan perzinahan maka baginya hukum nikah adalah sunnat.²⁶⁹

Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.²⁷⁰ Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat).²⁷¹ Sedangkan

²⁶⁶ Al-Bayhaqiy, *op. cit.*, Juz 7, hlm, 158

²⁶⁷ Baca Wizarat al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41 (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyah, 2002), hlm. 210

²⁶⁸ *Ibid.*, Baca juga Wahbah al-Zuhaili, *fiqh al-Islam...* hlm. 31 dan Ibn Qudamah, Juz 9, hlm. 341

²⁶⁹ Wahbah, *op.cit*, hlm. 33

²⁷⁰ Wizarat al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyah, *Op. cit.*, hlm. 217

²⁷¹ *Ibid.*, hlm. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi yang merasa dirinya tidak mampu bertanggung jawab dan akan menelantarkan istri dan anak maka baginya haram menikah.²⁷²

Hukum Poligami berdasar kepada al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (القران: النساء: ٣)²⁷³

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Perintah menikah yang terdapat dalam ayat itu tidak bermakna wajib dan mengikat, akan tetapi bermakna pengajaran dan pemberitahuan. Hal itu disebabkan adanya *qarinah* yang memaling makna tersebut, yaitu kalimat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim”.

Walaupun bentuk katanya adalah perintah, akan tetapi dengan adanya *qarinah* ini ia bermakna larangan terhadap pernikahan poligami yang dikhawatirkan akan mencelakakan para istri, bukan bermakna perintah untuk melakukan poligami. Makna ayat itu adalah “Jika kalian khawatir tidak akan berlaku adil terhadap para perempuan yatim dan perempuan bukan yatim, maka janganlah kamu nikahi kecuali pernikahan halal yang kamu merasa yakin tidak akan mencelakai mereka, satu sampai empat orang”.

Berdasarkan ayat di atas pada dasarnya hukum poligami adalah *mubah* dan hukum *mubah* tersebut bisa berbeda pada setiap orang yang akan

²⁷² Ibid.

²⁷³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Asanleema, 2009), hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakannya sesuai kondisi masing-masing, yaitu *masalah* (menolak mafsadah dan mengambil manfaat). Prinsip yang harus diterapkan dalam penerapan masalah adalah *menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada mengambil masalah*. Prinsip ini telah dirumuskan dalam sebuah qaedah:

درء المفساد اولي علي جلب المصالح²⁷⁴

Artinya: “*Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mengambil masalah*”

Secara umum *masalah* yang bisa diperoleh dengan poligami adalah terpeliharanya suami dari perzinahan dan terjaminnya kehidupan perempuan-perempuan yang tidak bersuami. Sedangkan *mafsadah* yang akan muncul jika pintu poligami ditutup adalah perzinahan dan monogami serial. Monogami serial akan berimplikasi pula terhadap penelantaran mantan istri dan anak-anak.²⁷⁵

Adapun persoalan yang seringkali muncul dalam perkawinan poligami yang dapat diasumsikan sebagai sisi negatif (*mafsadah*) dari perkawinan poligami adalah sebagai berikut:

- Poligami mengakibatkan permusuhan di antara para istri sehingga suasana rumah tangga tidak harmonis.
- Perselisihan antara istri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka sehingga kebahagiaan rumah tangga jadi terganggu.
- Adanya tekanan psikologis terhadap istri pertama yang merasa diduakan cintanya, dan tekanan secara sosial, karena asumsi masyarakat yang selalu mempersalahkan pihak perempuan sebagai biang keladi dari praktek

²⁷⁴ Muhamad ‘Ali Ah}mad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 207

²⁷⁵ Baca Achmad Fedyani Saifuddin, *Poligini dalam Perspektif Sosial Budaya; Suatu Catatan Teoritis*, Makalah Dipresentasikan pada Seminar tentang *Poligami dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Budaya*, yang diadakan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 29 Agustus 2007, hlm. 2. Di-download Dari <http://1dfeui.or.id/content/view/full/50&itemid=28>. Hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018

poligami.

- d. Adanya anak-anak yang terlantar jika laki-laki yang berpoligami tidak bertanggung jawab.²⁷⁶

Atas dasar pertimbangan *masalah* di atas hukum poligami bisa meliputi semua hukum *taklifi*, yaitu wajib, sunnat, mubah, haram dan makruh. Poligami menjadi wajib apabila kebutuhannya sangat mendesak, misalnya dalam kondisi suami mempunyai dorongan seks yang luar biasa, kalau tidak poligami, ia pasti akan dapat terjerumus pada perzinahan, suami juga potensial untuk mempunyai keturunan. Dari sisi lain, suami memang saleh, bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, dan aspek materi, suami berkecukupan bisa menafkahi lebih dari dua keluarga.

Poligami menjadi sunnah hukumnya apabila dalam kondisi suami mempunyai dorongan seks yang luar biasa, kalau tidak poligami, ia memungkinkan dapat terjerumus pada perzinahan, suami juga potensial untuk mempunyai keturunan. Dan sisi lain, suami memang saleh, bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, dari aspek materi, suami berkecukupan bisa menafkahi lebih dan dua keluarga.

Poligami dihukum *mubah* apabila dalam sebuah pasangan suami istri, suami memiliki keinginan kuat untuk melakukan poligami, materinya juga mampu untuk dapat membiayai dua keluarga.

Poligami dihukum *makruh*, apabila dalam sebuah pasangan suami istri, suami memiliki keinginan kuat untuk melakukan poligami, materinya

²⁷⁶ Chadijah Nasution, dalam: *Poligami (Tinjauan Historis Sosiologis)*, di-download Dari <http://mukhahaans.blogspot.com/2008/06/poligami-tinjauan-historis-sosiologis.html>. Hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018. Bandingkan dengan 'Abd al-Nas}ir Taufiq al-At}ar, *Ta'addud al-Zaujat min al-Nawahly; Diniyah wa alljima'iyah wa al-Qanuniyah*, (Kairo: tp, 1972), hlm., 87. Al-Att}ar menyebutkan secara umum ada empat eksekusi Dari poligami, yaitu, cemburunya wanita, laki-laki tidak bisaaksana, anak-anak berkelahai dan kesulitan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juga mampu untuk dapat membiayai dua keluarga. Namun, suami merasa khawatir untuk tidak dapat berlaku adil pada istri-istrinya. Atau suami khawatir ia lebih mencintai istri keduanya ketimbang istri pertamanya.

Poligami menjadi haram hukumnya apabila ternyata suami ketika melakukan poligami hanya berorientasi pada pelampiasan syahwat belaka dan tidak memperhatikan kondisi dan kemampuan materi dan mental. Ia tidak yakin bahwa dirinya tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. Ketika seorang suami tahu dirinya tidak akan bisa memenuhi hak-hak istri, apalagi sampai menyakiti dan mencelakakannya, poligami hukumnya haram.

Jadi, ketentuan hukum apakah poligami itu wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram, tidak bertumpu pada adanya nas, melainkan pada situasi dan kondisi. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Yang prinsip adalah keharusan untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah yaitu keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan dan kerusakan.

6. Batasan Poligami

Mengenai batasan jumlah istri yang dibolehkan dalam poligami, Ibn Hazm menegaskan bahwa tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan, baik perempuan itu hamba saya semua, atau perempuan merdeka semuanya, sebagiannya perempuan merdeka dan sebagiannya hamba sahaya. Tidak ada silang pendapat yang perlu didengarkan tentang tidak halal bagi laki menikahi lebih dari empat perempuan.²⁷⁷

²⁷⁷ Ibn H}azm, *al-Muh}alla*, *op. cit.*, hlm. 1588

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan pembatasan maksimal empat orang istri yang boleh dinikahi dalam poligami adalah surat al-Nisa' :3 di atas, juga hadis sahih riwayat Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صَحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah Terkait dengan firman Allah, "wa in khiftum anlaa tuqsimuu fil yataama.." Ia berkata; "Maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim yang terdapat pada seorang laki-laki, yakni walinya. Kemudian sang wali pun menikahnya lantaran ingin mendapatkan hartanya, namun bergaul dengannya dengan tidak baik, dan tidak pula bersikap adil pada hartanya, maka dari itu hendaklah ia menikahi wanita lain dua, tiga atau empat." (HR. Bukhari).²⁷⁸

Sehubungan dengan pendapat Ibn Hazm di atas, Imam al-Sarakhsy (w. 490 H)²⁷⁹ menjelaskan bahwa pada dasarnya semua kaum perempuan halal bagi kaum laki-laki. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan (penciptaan manusia berpasang-pasangan adalah memperoleh) keturunan, dan hal itu baru terwujud dengan terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian diharamkanlah sebagian dari kaum perempuan itu bagi laki-laki tertentu didasarkan pada ketentuan yang disebutkan *syara'*, seperti karena hubungan keibuan atau hubungan persaudaraan dan sebagainya. Berdasarkan hal itu, seorang perempuan tidak memiliki hubungan yang disebutkan *syara'* itu dengan seorang laki-laki, perempuan itu halal untuk dinikahi laki-laki tersebut.

²⁷⁸ Bukhary No. 4708

²⁷⁹ Muh}ammad bin Abi Sahal al-Sarakhsy, *al-Mabsuth*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), J. 5, hlm, 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan perkawinan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu larangan perkawinan untuk selamanya (disebut *mahram muabbad*) dan larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu (*mahram ghair muabbad*).²⁸⁰ Larangan perkawinan yang bersifat selamanya itu dibatasi hanya pada tiga kondisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau nasab, karena hubungan perkawinan (hubungan *musaharah*), dan karena hubungan persusuan. Semua perempuan yang memiliki hubungan seperti itu (biasanya disebut mahram) tercakup dalam surat *al-Nisa'* [4] ayat 22 dan 23.

Sementara kondisi yang menimbulkan keharaman *ghairu muabbad*, secara umum, juga terbatas pada tujuh kondisi, yaitu: Pertama, mengawini dua orang saudara dalam satu masa (tercakup dalam surat *al-Al-Nisa'* [4] ayat 23). Kedua, poligami di luar batas (tercakup dalam surat *al-Al-Nisa'* [4] ayat 3). Ketiga, karena seorang perempuan terikat dalam perkawinan dengan orang lain (terdapat dalam surat *al-Nisa'* [4] ayat 24). Keempat, mengawini istri yang sudah ditalak tiga, sampai ia menikah lagi dan bercerai dengan orang lain (tercakup dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 230). Kelima, larangan karena sedang melakukan ihram, baik calon istri, suami atau keduanya (didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim).²⁸¹ Keenam, larangan karena perzinahan, baik laki-laki atau perempuan (tercakup dalam surat *al-Furqan* [25] ayat 68 dan 70). Kecuali, terdapat beda pendapat ulama tentang perkawinan antara pezina laki-laki dengan perempuan yang dizinainya. Ketujuh, larangan karena beda agama (tercakup dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 221).

²⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 12

²⁸¹ Muslim, *op. cit.*, Juz 2, hlm. 1020 dan 1031

Berdasarkan pemikiran di atas bahasan ini ingin menegaskan batasan maksimal poligami yang dibolehkan. Tentang halalnya menikahi seorang perempuan, maka hal itu telah sama-sama diketahui, meskipun tidak ada ayat yang menjelaskan tentangnya. Hal itu didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa perkawinan yang halal itu akan terwujud dengan menikahi istri paling kurang sebanyak satu orang. Lebih jelas lagi, bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang halalnya seorang laki-laki menambah jumlah istrinya lebih dari satu orang sampai batas yang telah ditetapkan yang disertai dengan pilihan untuk melakukan akad sekaligus atau dengan cara terpisah.²⁸²

Pertama kali yang perlu ditegaskan, seperti disebutkan Ibn Hummam,²⁸³ imam mazhab yang empat dan mayoritas umat Islam telah sepakat bahwa seorang laki-laki boleh menikah maksimal sampai empat orang perempuan (merdeka). Menurut golongan Hawariy, seorang laki-laki boleh menikah dengan jumlah sesuai keinginannya dan golongan Rawafidh membolehkan sampai sembilan orang. Sedang golongan Khawarij membolehkan sampai 18 orang perempuan. Sementara itu, ada juga banyak orang yang menyebutkan bahwa tidak ada pembatasan dalam jumlah yang dibolehkan menikahi perempuan.

Sejalan dengan pendapat golongan Rawafidh, menurut ulama Zahiriyyah seorang laki-laki boleh memiliki sembilan orang istri. Pendapat ini didasarkan pada penjumlahan dari *masna*, *sulasa* dan *rubu'* (2 + 3 + 4) dalam surat *al-Nisa'* [41 ayat 3 di atas, Menurut sebagian riwayat, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn al-Sibagh, sebagian pengikut Syi'ah, dan al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸² Muh}ammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy (Ibn Humam), *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut:

Da}al-Fikr, t.th.), Juz 3, hlm. 240

²⁸³ *Ibid.*, Juz 3, hlm. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qasim bin Ibrahim. Menurut mereka, hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah menyuruh memilih empat orang istri terhadap para sahabat yang masuk Islam bersama para istri mereka di atas mengandung kelemahan, yaitu di antara para sanadnya terdapat orang yang *majhul*. Sementara dalam persoalan sepenting ini tidak bisa disandarkan pada hadis seperti itu. Lebih dari itu, Rasulullah SAW sendiri malah memiliki sembilan orang istri, dalam riwayat lain menyebutIn sebelas orang. Sementara dalam surat *al-Ahzab* [33] ayat 21, Allah menegaskan bahwa Rasulullah itu adalah teladan bagi umatnya. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa dalam pembatasan istri hanya sampai empat orang itu sendiri juga menjadi perdebatan, yang masing-masing pendapat tentangnya tidak memiliki dalilyang kuat.²⁸⁴

Lebih lanjut menurut ulama Zahiriyah, seperti disebutkan al-Syawkaniy,²⁸⁵ yang dimaksud dengan kata (,) yang terdapatdalam surat *al-Nisa'* [4] ayat 3 adalah untuk mengumpulkan bukan untuk pilihan. Di samping itu, walaupun huruf *waw* dalam ayat itu diartikan untuk pilihan, secara kebahasaan kata *masna* itu sendiri berarti dua-dua. Demikian juga dengan *sulasa* dan *ruba'*, menunjukkan atas tiga-tiga dan empat-empat. Pengertian seperti ini merupakan sesuatu yang tidak diperdebatkan oleh para ahli Bahasa. Oleh karena itu, pada dasarnya, adalah sah bagi seorang laki-laki menikah dengan sejumlah perempuan dengan syarat dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Maksudnya, ia menikahi dua, tiga, dan empat orang perempuan, kemudian menikahi dua, tiga dan empat orang lagi setelah menceraikan yang pertama.

²⁸⁴ A1-Syawkaniy, *op. cit.*, Juz 6, hlm. 289-290

²⁸⁵ *Ibid.*, Juz 6, hlm. 290

Ibn Hummam²⁸⁶ menjelaskan bahwa yang dijadikan dasar pada pendapat golongan Khawarij juga menggunakan logika “tambahan” terhadap bilangan dalam ayat itu. Akan tetapi mereka mendasarkan penjumlahan itu pada ‘urf bahasa Arab; kata *masna*, *sulasa* dan *rubu'* merupakan bentuk kata yang berarti pengulangan pada masing-masingnya (dua-dua, tiga-tiga, empat-empat). Dengan menjumlahkan ketiga kata bilangan pengulangan itu, maka diperoleh angka 18.

Sementara pendapat yang tidak membatasi jumlah istri dalam satu perkawinan, kata Ibn Hummam,²⁸⁷ sepertinya menggunakan alasan bahwa penyebutan bilangan di belakang perintah menikah itu secara substansi bukan berarti membatasi jumlah kebolehan menikah itu.²⁸⁸

Dari sudut pandang mereka masing-masing, semua kesimpulan yang dikemukakan ulama di atas ada benarnya. Akan tetapi, sudut pandang yang mereka gunakan itu menyiratkan adanya pengkhususan dalam pemahaman ayat itu. Sementara kaidah dasar dalam hal itu menyebutkan bahwa “pada dasarnya tidak ada pengkhususan, kecuali didasarkan pada dalil.”²⁸⁹ Artinya, kurang tepat melakukan pembatasan jumlah pernikahan semata-mata dengan mengandalkan ayat dalam surat *al-Al-Nisa'* [4] ayat 3 itu saja.

Dalam memberikan jawaban terhadap berbagai pendapat itu, sebagai wakil dari jumhur ulama, Ibn Hummam²⁹⁰ memulainya dengan memberikan

²⁸⁶ Ibn Humam, *op. cit.*, Juz 3, hlm. 239. Bandingkan dengan: Muh}ammad Khathib al-Syarbayniy (al-Syarbayniy), *al-Iqna' li al-Syarbayny*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), Juz 2, hlm. 401

²⁸⁷ Ibn Humam, *Ibid.*, Juz 3, hlm. 239. Bandingkan dengan: Al-Syarbayniy, *al-Iqna'*, Juz 2, hlm. 401

²⁸⁸ Analogi yang sejalan dengan ini adalah: “ambilah air laut itu satu geriba dan dua geriba dan tiga geriba”. Dalam kalimat yang terakhir ini kata bilangan yang disebutkan di dalamnya tidak menjadi penentu yang membatasi jumlah pengambilan air yang diperintah itu.

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



gambaran umum tentang surat al-Nisa” [4] ayat 3 di atas. Menurutnya, ayat itu semata-mata menjelaskan tentang jumlah perempuan yang dibolehkan untuk dinikahi dalam satu masa; bukan untuk menjelaskan kehalalan itu sendiri. Dasar pertimbangannya adalah kebolehan atau kehalalan menikah itu merupakan pengetahuan yang sudah diketahui sebelum datangnya Alquran dan Sunnah. Karena kodrat manusia diciptakan saling berpasangan dan memiliki kecenderungan alamiah untuk menikah. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa tujuan utama ayat tersebut adalah pembatasan jumlah perempuan yang boleh dikawini dalam satu waktu, bukan untuk membatasi substansi kebolehan itu. Esensi ayat itu merupakan penjelasan kebolehan itu yang dikaitkan dengan batasan jumlah, bukan untuk membatasi “bagaimana” kebolehan itu harus dilakukan.

Tentang penggunaan kata *masna*, *sulasa* dan *rub'a* sendiri, Ibn Hummam²⁹¹ menjelaskan bahwa semua kata itu merupakan bentuk pengulangan dari kata dua, tiga dan empat. Akan tetapi pemahamannya dalam ayat itu bukanlah seperti dikemukakan oleh orang-orang yang berkesimpulan bahwa jumlah perempuan yang halal dinikahi itu sampai 18 orang. Dalam hal ini, kata-kata tersebut berarti dua, tiga dan empat dengan akad yang dilakukan serentak atau dua, tiga dan empat dengan akad berurutan (dengan jarak waktu yang relatif cukup jauh). Kemudian, kata bilangan itu sendiri dikaitkan dengan kebolehan menikah, dan hal itu maksimal hanya sampai empat orang.²⁹²

²⁹¹ *Ibid.*, Juz 3, hlm. 239-240

²⁹² Lihat juga: Al-Syafi'i, *op. cit.*, Juz 5, hlm, 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penggunaan huruf *waw* () sebagai pembatas antara bilangan dalam ayat itu sendiri, kenapa bukan *aw* (), juga memberikan ketentuan tersendiri.²⁹³ Kalau ayat itu dibatasi dengan huruf *aw*, akan menimbulkan pemahaman bahwa kebolehan terbatas pada salah satu bilangan itu, dan bukan itu maksud ayat tersebut. Maksud ayat itu adalah membolehkan para lelaki (suami) untuk mewujudkan bilangan itu; jika mereka mau boleh dengan cara menduakan, menigakan dan mengempatkan. Oleh karena itu, tidak beralasan sama sekali pendapat yang mengatakan bahwa boleh menikahi perempuan sampai sembilan atau 18 orang.²⁹⁴

Dalil yang menunjukkan pengkhususan atau pembatasan maksimal sampai empat orang adalah riwayat yang berasal dari Ghaylan bin Maslamah dan al-Haris bin Qays di atas. Al-Syawkaniy²⁹⁵ menyebutkan, meskipun dua hadis itu memiliki cacat, tetapi secara substansial keduanya menguatkan tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki memiliki lebih dari empat orang istri dalam satu waktu. Selain itu, Ibn Hummam²⁹⁶ juga menyebutkan riwayat lain, dengan substansi kasus yang sama, tentang Fayruz al-Daylamiy. Hal itu juga dikuatkan oleh *ijma'*. Sementara itu, keadaan Nabi yang memiliki lebih dari empat orang istri dipandang sebagai kondisi khusus yang hanya berlaku bagi Nabi SAW.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹³ Sebagian ulama memahami huruf *waw* itu dengan makna *aw*. Jadi seolah ayat itu memberikan pilihan dua atau tiga atau empat. Akan tetapi ulama lain menyebutkan bahwa walaupun pada hakikatnya yang dipakai itu adalah huruf *waw*, akan tetapi huruf itu menempati posisi *badal*. Oleh karena itu ayat tersebut bukan memberikan legalitas terhadap penjumlahan seluruh bilangan yang ada di dalamnya, karena ia berarti “tiga sebagai ganti dari dua, dan empat sebagai ganti dari tiga”. Lihat dalam: al-Jassas}, *op.cit*, Juz 2, hlm. 346

²⁹⁴ Ibn Humam, *op. cit.*, Juz 3, hlm. 240

²⁹⁵ Al-Syawkaniy, *op. cit.*, Juz 6, hlm, 290

²⁹⁶ Ibn Humam, *loc. cit.*

Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa seseorang dilarang menambah jumlah istrinya lebih dari empat orang.²⁹⁷

Pembahasan tentang batasan poligami juga berkaitan dengan status perkawinan seorang muslim, sementara akad nikahnya dilakukan pada waktu ia masih kafir. Status orang kafir dan semua istrinya masuk Islam, sementara ia memiliki istri lebih dari empat orang atau di antara istrinya ada yang bersaudara, menurut Imam Malik ia harus memilih yang ia ingini (suka) empat orang dari istrinya dan salah satu dan istrinya yang bersaudara. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i (w. 204 H),²⁹⁸ Ahmad (w. 241 H),²⁹⁹ dan Abu Dawud (w. 275 H).³⁰⁰ Akan tetapi, Ibn al-Majisyun, satu-satunya pengikut Malikiyyah yang berpendapat bahwa kalau ia menikahi dua orang bersaudara, ia harus menceraikan keduanya, kemudian mengulangi akad dengan salah satu dari dua orang bersaudara itu yang ia ingini. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, al-Sawriy dan Ibn Abi Layla, ia harus memilih empat orang istri yang dinikahnya lebih dulu. Kalau ia menikahi mereka dengan satu akad ia harus menceraikan semua istrinya itu.³⁰¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹⁷ Sebagai perbandingan, seorang budak laki-laki, dalam satu waktu, hanya boleh menikahi dua orang budak perempuan lainnya. Hal itu didasarkan pada *ijma'* sahabat. Di antara pertimbangan yang mengantarkan pada kesimpulan itu adalah adanya keringanan pembebanan hukum bagi para budak yang juga hanya setengah dari orang merdeka. Pernikahan itu sendiri juga termasuk bagian dari kebutuhan. Oleh karena itu, seorang budak tidak mungkin akan disamakan dengan orang merdeka, sebagaimana orang merdeka juga tidak bisa disamakan dengan Nabi yang boleh menikah sampai sembilan orang. Al-Syarbayniy, *op. cit.*, Juz 2, hlm. 402

²⁹⁸ Al-Syafi'i, *op. cit.*, Juz 4, hlm. 265 dan Juz 7, hlm. 361. Lihat juga: al-Syarbayniy, *op. cit.*, Juz 3, hlm. 196. Al-Ansariy, *op. cit.*, Juz 2, hlm. 80

²⁹⁹ 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah (Ibn Qudamah), *al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybaniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 1-), Juz I, hlm. 120. al-Bahutiyy, *op. cit.*, Juz 5, hlm. 122

³⁰⁰ 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin H}azm (Ibn H}azm), *al-Muh}alla*, (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), Juz. 9, hlm. 441

³⁰¹ Muh}ammad bin Ahmad bin Muh}ammad bin Rusyd (Ibn Rusyd), *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 2, hlm. 37

Penyebab munculnya perbedaan di atas, seperti disebutkan Ibn Rusyd (W. 595 H),³⁰² adalah perbedaan dalam penggunaan dalil hukum. Ulama yang berpendapat ia harus memilih istri yang ia sukai mendasarkan pertimbangannya pada hadis Ghaylan bin al-Tsaqafiy dan Qays bin al-Haris, di atas. Nabi memberikan keleluasaan kepada keduanya untuk memilih istri yang mereka sukai. Dalam hadis-hadis di atas, Nabi sama sekali tidak membedakan keadaan perkawinan mereka. Oleh karena itu, hadis itu tidak memberikan ketentuan harus memilih istri yang dinikahi lebih awal. Berbagai riwayat tersebut juga tidak menghendaki agar mengulangi pernikahan yang telah mereka lakukan sebelum Islam. Karena dengan penggunaan kata menahan secara jelas menunjukkan untuk melanjutkan yang telah ada.³⁰³

Sementara ulama yang mengatakan bahwa ia harus memilih empat orang istri yang dinikahinya lebih dulu mendasarkan pendapatnya pada *qiyas*. Akad terhadap istri yang lebih dan empat orang sebelum ia masuk Islam disamakan dengan akad terhadap istri yang lebih dan empat orang dalam Islam, yaitu fasid. Akan tetapi, Ibn Rusyd menegaskan bahwa pendapat dengan argumentasi terakhir ini adalah pendapat yang lemah.

Seandainya orang itu tidak mau memilih empat orang dari istri-istri yang dimilikinya, seperti disebutkan Ibn Qudamah (W. 620 H),³⁰⁴ ia boleh ditahan dan dikenai sanksi hukuman *takzir* sampai ia mau memilih empat orang dari mereka. Dalam penyelesaian kasus itupun, seorang hakim tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk memilihkan istri-istri baginya, kecuali orang

³⁰² *Ibid.* Penjelasan lebih rinci tentang hal ini, lihat dalam: al-Syafi'i, *Op. cit.*, Juz 4, hlm, 265 dan Juz 7, hlm 361

³⁰³ Al-Syarbayniy, *op. cit.*, Juz 3, hlm, 196

³⁰⁴ Ibn Qudamah, *op. cit.*, Juz 1, hlm, 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut mewakilkannya kepada hakim. Selama masa pemilihan itu, suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah semua istri-istrinya. Karena dalam masa itu, semua mereka masih berstatus sebagai istrinya.

Dalam proses memilih istri, orang tua dari suami tidak memiliki wewenang. Hak pilih itu sepenuhnya ada di tangan anak. Hanya raja pelaksanaan pemilihan bam dilakukan ketika anak telah dewasa. Hak pilih itu sendiri sangat berkaitan dengan rasa cinta dan syahwat. Seseorang tidak bisa menggantikan orang lain dalam pelaksanaannya. Konsekwensi dari pengunduran masa pemilihan ini, semua nafkah istri-istri tetap menjadi tanggung jawab anak sampai pemilihan dilaksanakan. Sekiranya dalam masa pemilihan itu suami meninggal dunia, ahli warisnya tidak berhak untuk menentukan atau memilih empat orang dari istri-istrinya itu. Dalam keadaan seperti itu, semua istrinya wajib menjalankan *'iddah* sesuai dengan ketentuan dan keadaan masing-masing.³⁰⁵ Demikian juga persoalan kewarisan, semua istri tetap berhak mendapatkan bagian “istri” secara kolektif, karena hak mereka masih tetap ada selama belum diceraikan.

Persoalan berikutnya, kalau istri memeluk agama Islam lebih dulu dari suaminya, menurut imam Malik, Abu Hanifah dan al-Syafi'i, jika suami juga masuk Islam dalam masa *'iddah* istri, maka ia lebih berhak terhadap istrinya itu. Jika suami segera masuk Islam setelah istrinya, sebelum pernikahan mereka *difasakh*, maka pernikahan mereka tetap diakui sah secara hukum. Hal itu didasarkan pada riwayat yang menceritakan tentang Safwan bin Umayyah yang

³⁰⁵ Karena semua istri tersebut berpeluang untuk dipilih atau diceraikan, sementara *'iddah* yang dipilih adalah *'iddah* kematian dan *'iddah* yang diceraikan adalah *'iddah quru'*, maka ulama Hanabilah dan al-Syafi'iyah mewajibkan mereka untuk menjalankan *'iddah* terpanjang dari dua kemungkinan *'iddah* yang mereka jalankan. *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa istrinya, 'Atikah bint al-Walid bin al-Mughirah, telah masuk Islam lebih dulu satu bulan dari Safwan. Kemudian Nabi mengukuhkan pernikahan Safwan dengan istrinya itu.³⁰⁶

Akan tetapi kalau suami yang lebih dulu memeluk agama Islam dari pada istrinya, menurut Imam Malik kalau istri enggan memeluk agama Islam, setelah ditawarkan, maka perkawinan mereka putus. Menurut Imam Syafi'i, kondisi seperti ini sama saja dengan sebelumnya, kalau keislaman istri terjadi dalam masa 'iddahnya, maka suami tetap lebih berhak terhadapnya.³⁰⁷

Perbedaan pendapat di atas disebabkan adanya pertentangan antara kandungan umum nas dengan kehendak *qiyas*. Kandungan umum potongan ayat:

أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - ١٠

Artinya: “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”),

Yang terdapat dalam surat al-Mumtahanah [60] ayat 10, menghendaki perceraian segera antara mereka. Akan tetapi terdapat Asar yang bertentangan dengan kandungan umum ayat ini, yaitu riwayat tentang keislaman Abu Sufyan bin Harb yang lebih dulu dua bulan dari istrinya, Hindun binti Utbah Setelah memeluk Islam ia kembali ke Makkah. Hindun, yang masih kafir, memegang jenggotnya dan menyuruh penduduk Makkah membunuhnya. Akan tetapi, selang beberapa hari kemudian, Hindun juga masuk Islam, dan mereka tetap diakui sebagai suami istri. Sementara itu, *qiyas* yang tidak sejalan dengan Asar itu adalah fungsi 'iddah, baik suami yang Islam lebih dulu atau istri, tetap

³⁰⁶ Ibn Rusyd, *op. cit.*, Juz 2, hlm 37

³⁰⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sama. Kalau fungsi ‘*iddah*’ tersebut diakui dengan lebih dulunya istri memeluk Islam, ia juga wajib diakui dengan Islamnya suami lebih dulu.³⁰⁸

Kalau yang terjadi adalah seseorang masuk Islam, sementara sebelumnya ia telah memiliki istri yang berhubungan nasab (ibu dan anak), seperti dijelaskan al-Syarbayniy,³⁰⁹ dalam hal itu berkemungkinan terjadi salah satu dan enam kondisi berikut:

Pertama, kalau ia telah menggauli keduanya, baik diawali oleh pernikahan yang sah maupun tidak, kedua perempuan itu menjadi haram baginya selamanya. Hal itu disebabkan karena dengan hanya menggauli salah satunya menimbulkan keharaman terhadap yang lain, apalagi dengan menikahi salah satunya. Kedua perempuan (ibu dan anak) itu tetap berhak mendapatkan mahar; yang dinikahi secara sah (*sahih*) berhak mendapat mahar *musamma* dan bagi yang dinikahi dengan cara yang tidak sah berhak mendapatkan mahar *misil*.

Kedua, kalau suami belum menggauli keduanya, maka tetaplah pernikahan dengan si anak, dan batallah pernikahan dengan ibu. Hal itu didasarkan karena akad yang dilakukan terhadap seorang perempuan menimbulkan keharaman untuk menikahi ibunya, tidak sebaliknya. Jika nikah dengan ibu dilakukan secara sah, ibu itu tetap berhak mendapatkan setengah mahar *musamma*. Tapi kalau ia dinikahi dengan cara yang tidak sah, ia berhak mendapatkan setengah mahar *misil*. Munculnya hak ibu (istri) ini didasarkan pada pemutusan perkawinan sebelum *dukhul* dalam Islam. Pendapat seperti inilah yang dipandang kuat oleh al-Muqriy yang dipertegas oleh al-Bulgayniy dan lain-lain. Akan tetapi, sebagian ulama lain berpendapat bahwa ibu tidak

³⁰⁸ *Ibid*, Juz 2, hlm. 37-38. Lihat juga: Al-Syarbayniy, *op. cit.*, Juz 3, hlm 196

³⁰⁹ Al-Syarbayniy, *Ibid.*, Juz 3, hlm 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berhak mendapatkan mahar sedikitpun, karena pernikahan yang terjadi adalah nikah *fasad*. Sedang menurut pendapat lain, dengan dasar nikah *fasad* itu, suami diberi hak sepenuhnya untuk memilih antara memberi setengah mahar atau tidak memberi sama sekali.

Ketiga, kalau suami telah menggauli anak saja sebagai istrinya, maka haramlah baginya ibu anak selamanya. Akan tetapi, ibu tetap berhak mendapatkan setengah mahar *misil*. Seperti keadaan penjelasan sebelumnya, pernikahan dengan ibu ini ada ulama yang menganggapnya *fasid* dan ada juga yang menganggapnya tidak *fasad*.

Keempat, kalau suami telah menggauli ibu saja sebagai istrinya, maka haramlah keduanya bagi suami selamanya. Keharaman anak didasarkan pada *dukhul* yang telah dilakukan suami dengan ibunya. Sementara keharaman si anak didasarkan atas akad yang dilakukan terhadap anaknya.

Keadaan seperti ini kalau nikah yang dilakukan adalah nikah yang sah. Dalam keadaan seperti itu, seperti dikutip al-Rafi'iy dari al-Baghawiy, si ibu berhak mendapatkan mahar *misil*, dengan adanya *dukhul*. Tapi menurut pendapat lain, dengan telah terjadinya *dukhul* itu si ibu tetap menjadi istri suami yang menggaulinya, dan perkawinan dengan si anak dibatalkan dengan dasar nikah *fasid*.

Kelima, ketika terjadi keraguan; apakah suami telah menggauli salah satu dari mereka atau belum. Dalam keadaan seperti ini, suami dianggap belum menggauli keduanya. Hanya saja, akan dipandang lebih terpuji kalau kedua perempuan itu diharamkan bagi suami.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keenam, kalau terjadi keraguan; apakah salah satu dan yang telah digauli telah batal nikahnya didasarkan pada keyakinan bahwa salah satu dan keduanya haram dinikahi. Dalam keadaan seperti ini, al-Mawardi mengatakan karena Islam itu sendiri sama seperti permualaan dan perkawinan, mestilah dalam keadaan itu memulai pernikahan dengan orang yang diyakini kehalalannya untuk dinikahi.

Berdasar pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Islam memberikan “kelapangan” kepada seorang laki-laki merdeka (tidak carat hukum) untuk menikah sampai empat orang perempuan merdeka. Sebagai orang merdeka yang cakap hukum, dalam melakukan perkawinan poligami itupun ia tidak diwajibkan meminta izin kepada pihak manapun. Hal itu didasarkan pada sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa ciri mendasar orang merdeka adalah ia terbebas dari intervensi pihak manapun.³¹⁰

7. Syarat Poligami

a. Adil

Syarat poligami yang disebutkan dalam Alquran surat *al-Nisa'* [4] ayat 3 adalah adil. menurut Ibn Qudamah,³¹¹ tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa keadilan yang dimaksud ayat itu bukanlah keadilan dalam arti memperlakukan para istri dan memberikan segala hal kepada mereka secara sama. Oleh karena itu, seorang suami tidak wajib menyamakan para istrinya dalam hal *jima'*, misalnya. Karena *jima'* merupakan salah satu cara penyaluran syahwat dan rasa cinta. Sementara

³¹⁰ Ibn Humam, *op. cit.*, Juz. 3, hlm. 275

³¹¹ Ibn Qudamah, *op. cit.*, Juz 7, hlm. 334. Lihat juga: 'Abdullah bin Qudamah, al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ah}mad bin Hanbal, (Bairut: al-Maktab al-Islamiy, 1988), Juz 3, hlm. 131. Zakariya bin Muh}ammad bin Ah}mad bin Zakariya al-Ans}ariy Abu Yahya (disebut: al-Ans}ariy), *Fath al-Wahhab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), Juz 2, hlm. 107. Ibrahim bin Muh}ammad bin Sa}im bin Dhuyan (Ibn Dhuyan), *Manar al-Sabil* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1405 H), Juz 2, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

persoalan kecenderungan yang ia punya. Persoalan itulah yang dimaksud Allah dengan ketidakanggupan berbuat adil terhadap para istri yang disebutkan dalam surat *al-Nisa* [4] ayat 129, berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ١٢٩

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu antai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Keadilan yang diwajibkan dalam arti penyamaan antara semua istri itu, menurut para ulama fikih,³¹² adalah dalam hal pembagian hari (bermalam) dengan masing-masing mereka. Pendapat seperti ini didasarkan pada hadis Nabi yang menceritakan bahwa ia membagi hari-harinya untuk bersama istrinya. Setelah membaginya, ia berdoa agar Allah tidak mencela pembagian yang ia lakukan. Hadis itu berbunyi sebagai berikut:

عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يَعْنِي الْقَلْبَ (رواه أبوداود والبيهقي والحاكم)³¹³

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Yazid al-Khatamiy, dari ‘Aisyah ia berkata: “Rasulullah SAW membagi (hari-harinya) dengan cara yang adil. Kemudian ia berdoa: ‘Ya Allah, inilah pembagian yang aku lakukan dalam hal yang aku

³¹² Banyak Kitab yang bisa dirujuk tentang ini, misalnya: Ibn Dhuyan, *Ibid*, Juz 2, hlm. 199. Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti (al-Bahuti), *Kasysyaf al-Qina* (Bairut: Dar al-Fikr, 1402 H), Juz 5, hlm. 29, Ah}mad ‘Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Haraniy, *Kutub wa Rasa’il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh* (t.tp.: Maktabah ibn Taymiyyah, t.th.), Juz 32, hlm. 269-270

³¹³ Abu Dawud, *op. cit.*, Juz 2, hlm. 242. al-Bayhaqiy, *op. cit.*, Juz 7, hlm. 298. al-Hakim, *op. cit.*, Juz 2, hlm. 204



miliki, Janganlah Engkau mencelaku sehubungan dengan apa yang Engkau miliki tapi tidak aku miliki”³¹⁴. (HR. Abu Dawud, al-Bayhaqiy, al-Hakim)

Dalam hal ini, persamaan dalam nafkah, tempat tinggal dan pakaian juga tidak menjadi sesuatu yang diwajibkan; hanya disunatkan. Untuk itu, berdasar nas, seorang suami dituntut untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian sesuai kemampuannya. Kalau suami termasuk kelompok orang kaya, maka dituntut untuk memberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing istrinya. Kalau ia masih memiliki kelebihan harta, menurut pendapat yang populer di kalangan ulama Malikiyyah,³¹⁵ tidak ada halangan sama sekali baginya untuk memberikan lebih kepada salah satu dan mereka, sesuai keinginannya.

b. Mampu Menafkahi

Nafkah secara bahasa berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran,³¹⁶ *al-nufuq* yang berarti hancur.³¹⁷ Ibn Bakar menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq* atau *nifaq*. Akan tetapi merupakan istilah untuk sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya.³¹⁸ Sedang secara istilah berarti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, budaknya dan hewan temaknya. Materi nafkah itu sendiri

³¹⁴ Para ahli hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “yang Engkau miliki dan tidak ku miliki” dalam hadis itu adalah hati. Lihat dalam Kitab hadis di atas.

³¹⁵ Muh}ammad bin ‘Abd al-Rahman al-Maghribiy Abu ‘Abdillah, *Mawahib al-Jalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H), Juz 4, hlm. 10. Lihat: al-Dasugiy, Juz 2, hlm. 399

³¹⁶ Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy (al-Nawawiy), *Tahrir Al-faz} al-Tanbih*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1408 H), ho 288. Muh}ammad ‘Abd al-Ra’uf al-Munawiy, *al-Tawqif ‘Ala Mahimmat al-Ta’arif*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H), hlm. 703

³¹⁷ Qasim bin ‘Abdillah bin Amir ‘Ali al-Qawnuniy (al-Qawnuniy), *Anis al-Fuqaha*, (Jedah: Dar al-Wafa', 1406 H), hlm. 168, Lihat juga dalam: Muh}ammad Amin (Ibn ‘Abidin), *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 3, hlm. 571-572

³¹⁸ Ala' al-Din Muh}ammad bin ‘Aliy al-Husniy (Ibn ‘Aliy al-Husniy), *Durr Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abs}ar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 2, hlm. 571. Lihat juga: Ibn ‘Abidin, *Op. cit.* Juz 3, hlm. 572

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.³¹⁹

Dikaitkan dengan pihak yang berhak menerimanya, nafkah terdiri dari nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Dalam hal ini, seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya dari pada nafkah untuk orang lain. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

نَحْكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدٍ نَا عَلَيَّهِ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ " : وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ : قَبِّحَكَ اللَّهُ. (رواه أبو داود والبيهقي والحاكم)³²⁰

Artinya: “ Dari H{akim ibn Mu’awiyah al-Qusyairi dari ayahnya berkata: aku berkata: Ya Rasulullah, apa hak istri kami? Nabi menjawab: “Hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh juga mengisolasi kecuali di dalam rumah.” Abu Dawud mengatakan, jika engkau mencela, jangan katakan: Allah mencelamu

Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya). Tentang kewajiban nafkah pangan dan pakaian, disebutkan Allah dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلَدهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلَدهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ٢٣٣ -

³¹⁹ Zayn bin Ibrahim bin Muh}ammad bin Muh}ammad bin Bakar (disebut Ibn Bakar), *al-Bihar al-Ra'iq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 4, hlm. 188. Lihat Juga Al-Munawiy, *op. cit.*, hlm. 703. Lihat Juga Al-Qawnuniy, *op. cit.*, hlm. 168, Lihat juga: Ibn 'Ali al-Husniy, *op. cit.*, Juz 2, hlm. 57.

³²⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'as\ bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abu Daud*, Tahqiq Mah}ammad Mah}uddin 'Abdul H{amid, Juz II, hadis nomor 2142, (Beirut: al-Maktabah al-'Isriyyah, t.th), hlm. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Di samping beberapa ayat di atas, Nabi sendiri juga menyebutkan beberapa hal penting tentangnya. Ketika haji wada', misalnya, Nabi pernah menyebutkan bahwa:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ... (الْحَدِيثُ)

Artinya: “Maka takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan farji mereka dengan kalimat Allah, dan kamu berhak atas mereka untuk tidak memberi kesempatan pada seseorang yang kamu benci duduk di tikarmu. Kalau mereka lakukan juga yang demikian itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan aku telah meninggalkan pada kamu sesuatu yang tidak akan sesat sesudahnya kalau kamu pegang teguh dengannya, yaitu Kitabullah.” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Malik dari Jabir bin ‘Abdillah).

Dalam hadis lain lain Rasulullah SAW juga menyebutkan hak istri dari suaminya, dan menjadi kewajiban suami terhadap istrinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدُنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَ إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَ إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah al-Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara kami atasnya? Ia berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.". (HR. Abu Dawud).

Dalam konteks perkawinan, wajib bagi seorang laki-laki yang ingin menikah untuk segera menyiapkan kemampuannya agar dapat memberi nafkah kepada calon istrinya. Jika dia belum memiliki pekerjaan yang memadai untuk membiayai hidupnya dengan istrinya, maka secara syar'i dia belum bisa menikah.

Hal ini secara jelas terlihat pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.” (HR. Bukhari)³²¹

Ketentuan umum tentang perkawinan tersebut juga berlaku untuk Poligami, artinya laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada lebih dan satu orang istri, maka secara syara’ tidak halal baginya untuk berpoligami karena nafkah kepada seorang istri atau beberapa orang wajib secara *ijma’*.

Poligami Dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Undang-undang No. 1/1974 menganut azas monogami, hal itu secara tegas dibunyikan dalam Pasal 3 ayat (1): “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.³²² Poligami hanya dibolehkan kalau hal itu dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dan yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.³²³ Hal itu juga disebutkan dalam pasal 3 No. 1/1974, yaitu pada ayat (2), yang berbunyi: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dan seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.³²⁴

Keberadaan azas monogami itu sendiri secara tegas disebutkan dalam Penjelasan

³²¹ Bukhary –No. 4677

³²² *Undang-tindang Perkawinan Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (selanjutnya disebut UU), (Jakarta: Cemerlang, t.th.), hlm. 2

³²³ Khusus bagi umat Islam, pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Agama, Hal itu didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 1 yang menegaskan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (selanjutnya disebut: Tim Penyusun), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), hlm. 247

³²⁴ UU, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UU No. 1/1974 pada bagian umum poin 4 huruf c³²⁵ dan penjelasan PP No. 10/1983.³²⁶

Peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang menikah lebih dan satu orang, akan tetapi jumlah istri yang dimiliki seseorang dalam satu waktu maksimal hanya sampai empat orang. Hal itu disebutkan secara tegas dalam Bab IX KHI, pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: “Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri”, Oleh karena itu, kalau seseorang telah memiliki empat orang istri, baik masih terikat dalam perkawinan maupun salah satu atau semuanya dalam *iddah talak raj’i* tidak bisa lagi melangsungkan perkawinan berikutnya.³²⁷

Secara umum hukum perkawinan Indonesia mengatur tiga hal mendasar dalam Poligami, yaitu izin pengadilan dan tata cara poligami, alasan melakukan poligami (syarat alternatif) dan Syarat melakukan poligami (syarat kumulatif).

1. Izin Pengadilan dan Tata Cara poligami

Dalam UU. No. 1 tahun 1974 atau KHI disebutkan bahwa kalau seorang laki-laki yang telah memiliki istri hendak menikah lagi, terlebih dahulu ia harus menyampaikan maksudnya itu dan memohon izin untuk melakukannya kepada Pengadilan Agama. Permohonan tersebut harus memuat penyebab ia melakukan poligami; sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Hal itu sangat dibutuhkan, karena kelengkapan persyaratan

³²⁵ *Ibid.*, hlm. 28

³²⁶ Tim Penyusun, *op. cit.*, hlm. 393

³²⁷ Hal itu secara tegas disebutkan dalam Pasal 42 KIAL “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam ‘*iddah talak raj’i*’ ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa ‘*iddah talak raj’i*’. Departemen Agama RI. (selanjutnya disebut: Depag RI.), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991/1992), hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Yaani Riau

itulah yang akan diperiksa pertama kali oleh (majelis hakim) Pengadilan. Agama.

Sehubungan dengan tata cara pengajuan permohonan poligami ini, pasal 56 ayat

(2) KHI menegaskan: “Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 “.³²⁸

Bab VIII PP No. 9/1975, Beristri Lebih Dari Seorang, terdiri dari 4 (empat) pasal (41-44), memberikan panduan dalam proses penyelesaian permohonan poligami. Tentang persoalan yang sama, pada dasarnya KHI mengulangi ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975. Setelah permohonan diterima Pengadilan. Agama, pada Pasal 41 PP No. 9/1975, disebutkan bahwa: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 2) Bahwa istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat

³²⁸ Depag RI., *op. cit.*, hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima oleh Pengadilan;

- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.³²⁹

Untuk meyakinkan (majelis hakim) Pengadilan Agama, diizinkan atau tidaknya seseorang untuk melakukan poligami tidak hanya didasarkan atas pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan tertulis yang diajukannya. Akan tetapi hal itu juga harus dikuatkan oleh keterangan langsung oleh pihak istri si pemohon. Hal itu disebutkan secara jelas dalam Pasal 42 ayat (1) PP. No. 9/1975, sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.³³⁰
- b. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut, seperti disebutkan pasal 42 ayat (2), dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima. Lengkapnya bunyi ayat tersebut sebagai berikut: Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.¹³⁹

Setelah pemeriksaan dilakukan secara seksama, dan kalau seandainya (majelis hakim) Pengadilan Agama permohonan itu memiliki alasan yang kuat, maka Pasal 43 PP No, 9/1975 menetapkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin untuk melakukan poligami, Secara jelas, pasal itu menyebutkan: “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih

³²⁹ Tim Penyusun, *op. cit.*, hlm. 139

³³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.³³¹

Kalaupun permohonan yang diajukan memenuhi syarat materil dan syarat formil, bisa wadi ketika pemeriksaan dilangsungkan istri, yang mengalami salah satu dari tiga syarat alternatif, tidak menyetujui keinginan suaminya untuk menikah. Untuk hal itu, Pasal 59 KHI menegaskan: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³³²

Petunjuk tentang tata cara poligami bagi PNS diatur dalam PP No, PP 10/1983. Pada pasal 4 PP tersebut ditegaskan:

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- d. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

³³¹ *Ibid.*

³³² Depag RI., *op.cit.*, hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat.³³³

Pasal 5 dan pasal 9 PP No, 10/1983 memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh pejabat yang menerima permohonan tersebut. Pada pasal 5 disebutkan sebagai berikut:

- a. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- b. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.³³⁴

Pertimbangan yang diberikan oleh pejabat yang menerima permohonan tersebut harus diberikan secara tertulis. Tentang hal ini disebutkan dalam Penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut: Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak, Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan

³³³ Tim Penyusun, *op. cit.*, hlm. 385

³³⁴ *Ibid.*, hlm. 386

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.³³⁵

Sedang pada pasal 9 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dan atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- c. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.³³⁶

Urgensi izin pengadilan itu terlihat lebih nyata ketika calon mempelai poligami hendak melaksanakan akad nikah. Hal itu dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 6 PP No. 9/1975 berikut:

- a. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- b. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai

³³⁵ *Ibid.*

³³⁶ *Ibid.*, hlm. 387

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatat meneliti pula:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- 3) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 4) Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.³³⁷

Kalau calon mempelai poligami tidak bisa memperlihatkan izin Pengadilan, seperti yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) huruf d di atas, Pegawai Pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan mereka. Hal itu secara tegas disebutkan dalam pasal Pasal 68 KIR “Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila istri mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.³³⁸ Kalau istri tetap bersikeras hendak melaksanakannya, maka ia harus “rela” dengan perkawinan yang tidak tercatat. Karena Pasal 44 PP No. 9/1975 menegaskan: “Pegawai Pencatat dilarang untuk

³³⁷ *Ibid.*, hlm. 129

³³⁸ Depag. RI, *op. cit.*, hlm. 40



melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.³³⁹

Tidak sampai di situ saja, kalau perkawinan itu tetap dilangsungkan, maka tindakan itu dinyatakan sebagai tindakan pidana pelanggaran. Sanksinya, laki-laki yang melakukan poligami itu didenda setinggi-tingginya. Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedang Pegawai Pencatat nikah yang melangsungkan atau membantu melangsungkan pernikahan yang melanggar hukum itu dikenai hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal itu disebutkan dalam Bab IX PP No. 9/1975, Ketentuan Pidana, Pasal 45:

- a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
- b. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7,500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinggiaya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.³⁴⁰

³³⁹ Tim Penyusun, *op. cit.*, hlm. 139

³⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama, secara tegas disebutkan dalam pasal 56 ayat (3) KHI sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁴¹ Konsekwensi berikutnya, sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama itu dapat dibatalkan. Ketentuan umum tentang hal ini dapat dirujuk dari UU No. 1/1974 pasal 22: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁵¹ KHI “menafsirkan” ketentuan umum ini pada 3 (tiga) pasal yaitu pasal 70 dan pasal 71. Penyebutan perkawinan poligami sebagai salah satu dasar pengajuan pembatalan perkawinan secara tegas terdapat pada pasal 71 huruf (a).³⁴²

Dari seluruh uraian di atas, terlihat sangat jelas bahwa walau hukum perkawinan, khususnya UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 dan KHI, ditetapkan secara khusus untuk menertibkan perkawinan umat Islam Indonesia, akan tetapi ada pergeseran paradigma “kemerdekaan” seorang laki-laki merdeka dalam melakukan poligami dari paradigma yang digunakan oleh ulama fikih klasik. Dengan menjadikan izin Pengadilan sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan poligami, seolah-olah peraturan perundang-undangan menjadikan rakyat Indonesia yang beragama Islam berada di bawah “pengampuan” Pengadilan dalam persoalan poligami.

2. Persyaratan untuk melakukan Poligami

Dalam pasal 4 ayat (I) UU No. 1/1974 disebutkan sebagai berikut:

³⁴¹ Lengkapnya, ayat (3) pasal tersebut berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Depag RI., *op. cit.*, hlm. 35

³⁴² Depag RI., *op. cit.*, hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.³⁴³

Dari redaksi yang digunakan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974 di atas, intinya juga disebutkan di dalam PP No. 9/1975 BAB VIII, beristri lebih dari seorang, Pasal 40,³⁴⁴ dapat dipahami bahwa syarat utama bagi seorang laki-laki muslim untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang adalah adanya izin dari Pengadilan Agama.³⁴⁵ Artinya, perkawinan lebih dari seorang yang diakui legal oleh perundangan-undangan adalah perkawinan yang terlebih dahulu telah diajukan permohonan (izin)-nya kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya, dalam ayat (2) pasal 4 UU No. 1/1974 justru lebih mempertegas kewenangan pengadilan dalam perkawinan poligami tersebut. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁴⁶

³⁴³ UU, *op. cit.*, hlm. 2

³⁴⁴ Bunyi PP No 9/1975 BAB VIII, Beristri Lebih Dari Seorang, Pasal 40 tersebut adalah: "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan". Tim Penyusun, *op. cit.*, hlm. 138

³⁴⁵ Dalam Penjelasan UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 Pasal 49 Ayat (2) menjelaskan bahwa izin beristri lebih dari seorang menempati urutan pertama dari 22 bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Tim Penyusun, *op. cit.*, hlm. 288-289

³⁴⁶ UU, *op. cit.*, hlm. 2-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain persyaratan yang disebutkan pada pasal 4 ayat (2) di atas, dalam UU No. 1/1974 juga disebutkan syarat lain yang dimuat pada pasal 5 sebagai berikut:

c. **Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

d. **Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan** bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³⁴⁷

Dalam konteks ini, besar kemungkinan persyaratan adil yang disebutkan dalam pasal 55 KHI, khususnya ayat (2) dan (3), merupakan penegasan terhadap persyaratan yang terdapat pada ayat (1) huruf c UU No. 1/1974 di atas. Pasal 55 tersebut berbunyi:

- 1) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (ayat 2).
- 2) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi,

³⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 3

suami dilarang beristri dari seorang (ayat 3).³⁴⁸

Perbedaan penting persyaratan yang disebutkan dalam dua pasal (4 dan 5) UU No. 1/1974 di atas, di dalam PP No. PP 10/1983 disebutkan bahwa persyaratan yang disebutkan pada pasal 4 merupakan persyaratan alternatif, sedang persyaratan pada pasal 5 adalah persyaratan kumulatif. Hal itu disebutkan pada pasal 10 ayat (1) PP No. PP 10/1983 yang merupakan petunjuk pelaksanaan UU No. 1/1974 khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam. Hal itu berarti, Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dari ketiga syarat kumulatif di atas.

Perbedaan persyaratan tersebut tidak mengubah kewenangan pengadilan dalam menentukan boleh atau tidaknya, yang juga menentukan sah atau tidaknya, perkawinan poligami yang dilakukan seseorang. Bisa dikatakan persyaratan di atas hanya “rambu-rambu” yang harus diperhatikan (majelis hakim) Pengadilan Agama dalam memberikan izin kepada seseorang yang hendak melakukan poligami. Ketika Pengadilan, terbebas dari bias atau mengandung bias, memandang bahwa persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka orang itu dapat diberi izin. Akan tetapi, ketika Pengadilan memandang bahwa persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka orang itu tidak diberikan izin untuk berpoligami. Putusan itu sendiri, betapa kecil pun peluangnya, juga bisa muncul karena adanya intervensi pihak-pihak yang berkepentingan.

Persoalan yang sudah semestinya dipatuhi semua orang Islam, dalam hal ini (majelis hakim) Pengadilan Agama dan pihak yang mengajukan permohonan, perkawinan poligami yang dilangsungkan itu tetap saja tidak

³⁴⁸ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa “melanggar” ketentuan dasar dalam perkawinan, seperti larangan menggabungkan perempuan yang memiliki hubungan nasab atau susuan sebagai istri. Hal ini termasuk ketentuan dasar yang disebutkan dalam bagian larangan perkawinan. Dalam psal 41 ayat (2) KHI larangan itu dinyatakan tetap berlaku berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj’i* tetapi masih dalam masa ‘*iddah*’.³⁴⁹

Kalau UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 di atas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberi izin seseorang yang bukan PNS untuk melakukan poligami, maka kewenangan tersebut, bagi mereka yang PNS, diserahkan kepada atasan masing-masing. Hal itu dapat dilihat dalam PP No. PP 10/1983 Pasal 12. Kewenangan atasan yang diatur dalam pasal ini bukan hanya dalam hal memberikan izin beristri lebih dari seorang, akan tetapi termasuk izin untuk melakukan perceraian. Lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

e. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

- 1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- 2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

³⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dan Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik. Negara yang bersangkutan.
- 4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.³⁵⁰

Berbeda dengan persyaratan alternatif yang berlaku sama bagi semua rakyat Indonesia (PNS dan non PNS), PP No. 10/1983 mengemukakan redaksi persyaratan kumulatif yang sedikit berbeda bagi PNS. Syarat kumulatif bagi PNS ini juga dibedakan antara PNS laki-laki (melakukan poligami; memadu) dan PNS perempuan (dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat; dimadu). Walaupun PNS Perempuan dapat diizinkan menjadi istri kedua, akan tetapi izin itu hanya diberikan kalau yang akan menjadi bakal suaminya tidak berstatus sebagai PNS,³⁵¹ Persyaratan kumulatif untuk PNS laki-laki dimuat dalam Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi:

f. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- 1) Ada persetujuan tertulis dari istri;
- 2) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- 3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa

³⁵⁰ Tim Penyusun, *op. cit.*, hlm. 389

³⁵¹ Hal itu secara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) PP No. 10/1983, yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat Dari Pegawai Negeri Sipil". *Ibid.*, hlm. 385



ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.³⁵²

Berbeda dengan PNS laki-laki, PNS perempuan tidak harus memenuhi persyaratan alternatif tertentu untuk dimadu. Karena persyaratan alternatif itu memang persyaratan yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan melakukan poligami. Persyaratan kumulatif untuk PNS perempuan disebutkan dalam Pasal 11 PP No. 10/1983 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

g. Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila

- 1) Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami;
- 2) Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- 3) Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁶³

Sebagaimana terlihat dalam ketentuan secara keseluruhan dari PP No. 10/1983, bahwa aturan pernikahan bagi PNS memang diatur lebih detil dibanding dengan ketentuan yang mengatur masyarakat yang bukan PNS. Hal itu juga terlihat dalam persoalan izin perkawinan poligami ini. Kalau bagi masyarakat umum tidak disebutkan secara tegas kondisi yang menyebabkan ditolaknya permohonan izin poligami yang diajukan seseorang, maka di dalam PP No. 10/1983 hal itu disebutkan secara tegas. Hal-hal yang dapat menyebabkan ditolaknya permohonan izin poligami yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵² Argumentasi yang mendasari hal itu, salah satunya, seperti disinggung dalam Penjelasan PP No. 10/1983, adalah keharusan PNS untuk memberikan “contoh” dan “teladan” kepada bawahan dan masyarakat *Ibid.*, hlm.. 393



diajukan PNS laki-laki disebutkan dalam pasal 10 ayat (4) PP No. PP 10/1983, sebagai berikut:

h. Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

- 1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 2) Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
- 3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- 5) Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.³⁵³

Sementara hal-hal yang dapat menyebabkan ditolakny permohonan izin poligami yang diajukan PNS perempuan disebutkan dalam pasal 11 ayat (2) PP No. PP 10/1983, sebagai berikut:

Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila: adalah hak bersama secara timbal dari pasangan suami istri itu terhadap yang lain, seperti bersenang-senang, adanya hubungan *musotarah*, kewarisan dan sebagainya. Dalam UU No. 1/1974 hal ini disebutkan secara umum pada pasal 31 ayat (1) dan (2).³⁵⁴ Sementara di antara kewajiban bersama secara timbal balik suami istri adalah saling mencintai, memelihara kehormatan, serta memelihara dan mendidik anak. Hal ini dalam UU No. 1/1974 disebutkan

³⁵³ *Ibid.*, hlm. 338

³⁵⁴ Bunyi pasal tersebut adalah (1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. UU, *op. cit.*, hlm. 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum dalam pasal 30.³⁵⁵ dan juga diulang, dengan redaksi berbeda, tapi substansi yang sama, di dalam KHI pasal 77 ayat (1).³⁵⁶ Sebagai ketentuan yang sedikit agak memperjelas, UU No. 1/1974 menambahkan dua pasal tentang kewajiban bersama ini, yaitu pasal 33 dan pasal 31 ayat (3).³⁵⁷

Konteks pembicaraan perundang-undang itu tertuju pada perkawinan monogami akan tetapi bukan berarti hal itu terbatas pada perkawinan monogami semata. Semua hak dan kewajiban tersebut juga diberlakukan sama terhadap perkawinan poligami. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban suami dalam perkawinan poligami tentu juga tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewajibannya dalam perkawinan monogami. Pembicaraan selanjutnya akan difokuskan pada hak dan kewajiban suami dalam perkawinan poligami saja.

i. Hak Suami dalam Perkawinan Poligami

Walaupun suami istri telah disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan, secara personal mereka tetap merupakan dua individu terpisah dan berbeda. Karena itu, mereka masing-masing juga memiliki hak dan kewajiban terhadap yang lain. Dalam hal ini, sebagai pasangan dari istrinya, suami memiliki hak terhadap istrinya, yang sekaligus menjadi kewajiban istri terhadapnya.

Di dalam UU No, 1 tahun 1974, ketentuan yang berhubungan dengan hak suami itu terdapat dalam pasal 34 ayat (2). Ayat itupun sesungguhnya

³⁵⁵ Bunyi pasal tersebut adalah: yang menyatakan bahwa: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". *Ibid.*, hlm. 12

³⁵⁶ Dalam pasal tersebut disebutkan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat" Depag. RI., *op. cit.*, hlm. 46

³⁵⁷ Pada pasal 33 disebutkan bahwa: "Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". UU, *op. cit.*, hlm.. 13. Selanjutnya di dalam pasal 31 disebutkan bahwa: "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga". UU, *op.cit.*. hlm. 12



tidak secara langsung menyebutkan hak suami, akan tetapi menyebutkan kewajiban istri. Ayat itu berbunyi: “istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”.³⁵⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa suami berhak atas istrinya untuk diatur perseoalan rumah tangganya.

Ketentuan yang berhubungan dengan ini, diatur lebih rina dalam yaitu pada pasal 83 dan 84. Pada pasal 83 disebutkan sebagai berikut:

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁵⁹

Sementara pada pasal 84 disebutkan sebagai berikut:

- a) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁶⁰

Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam perkawinan poligami, suami juga memiliki hak lain, yaitu hak yang berhubungan dengan harta

³⁵⁸ UU., *op. cit.*, hlm. 13

³⁵⁹ Depag RI., *op. cit.*, hlm. 50-51

³⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersama. Terhadap hak yang terakhir ini akan dibahas secara khusus pada bab berikutnya.

j. Kewajiban Suami dalam Perkawinan Poligami

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa kewajiban bagi suami merupakan hak istrinya. Dalam hal kewajiban suami terhadap istri sendiri, juga dapat dilihat dalam dua kategori, yaitu kewajiban yang bersifat non material dan yang bersifat material.

Kewajiban suami yang menjadi hak istri ini, di dalam UU No, 1 tahun 1974, khususnya tentang kewajiban menyediakan tempat tinggal, disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Dua ayat tersebut sebetulnya masih bisa dikatakan bersifat umum, karena di dalamnya kewajiban itu tidak disebutkan khusus buat suami saja, melainkan juga menyertakan istri dalam pengungkapannya. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.³⁶¹

Kewajiban suami berikutnya, yang menjadi hak istri, adalah kewajiban memberikan perlindungan, dan hal itu disebutkan dalam pasal 34 ayat (1). Secara lengkap pasal tersebut berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³⁶²

Di dalam pasal 80 KHI kewajiban suami terhadap istri ini diatur lebih rinci. Pasal ini terdiri atas tujuh ayat sebagai berikut:

³⁶¹ UU, *op. cit.*, hlm. 13

³⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.³⁶³

Dasar hukum dari ketentuan tersebut dapat dirujuk pada surat *al-Nisa*’.

Selain itu, ketentuan di atas juga merupakan hasil pemahaman terhadap firman Allah dalam surat *al-Talaq* [65] ayat 7 berikut:

³⁶³ Depag RI., *op.cit.*, hlm. 48-49

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا - ٧ -

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, KHI mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-naknya atau bekas istri yang masih dalam ‘iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam ‘iddah talak atau ‘iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³⁶⁴

Pasal 81 tersebut sejalan dengan penjelasan Allah dalam surat *al-Talaq* ayat 6 berikut:

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِشْرَعٍ فَلَهُ أُخْرَى -٦-

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ketentuan yang secara khusus mengatur kewajiban suami yang melakukan poligami terhadap istri-istrinya, dalam UU No. 1/1974, terdapat pada Pasal 65, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
 - b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- 2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan ayat (1) pasal ini.³⁶⁵

Lebih lanjut di dalam KHI, pada Bagian Kelima tentang Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang, Pasal 82 juga dijelaskan:

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.³⁶⁶

Sampai di sini kelihatan bahwa keadilan dalam perkawinan poligami yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan masih mengikuti ketentuan yang dijelaskan oleh ulama fikih klasik, yaitu keadilan dalam hal-hal yang bersifat materil. Hal itu adalah logis karena keadilan seperti itulah yang dapat “diukur” dan dinilai secara relatif lebih akurat.

Kewajiban suami itu dipahami sebagai hak istri (yang telah dinkahi dan suami juga harus mengakui adanya hak lain bagi istri, baik istri yang dimadu atau istri tambahannya, di antara hak tersebut adalah hak pembatalan perkawinan (seperti telah disinggung sebelumnya). Selain kewajiban yang telah disebutkan di atas, dalam perkawinan poligami, suami juga memiliki kewajiban lain, yaitu hak yang berhubungan dengan harta bersama. Terhadap kewajiban yang terakhir ini akan dibahas secara khusus pada bab berikutnya.

Sebagai konsekwensi dari adanya hak dan kewajiban tersebut, apabila salah satu pihak (dalam hal ini adalah suami) mengabaikan hak pihak lain

³⁶⁵ UU, *op. cit.*, hlm. 23-24

³⁶⁶ Depag RI., *op.cit.*, hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

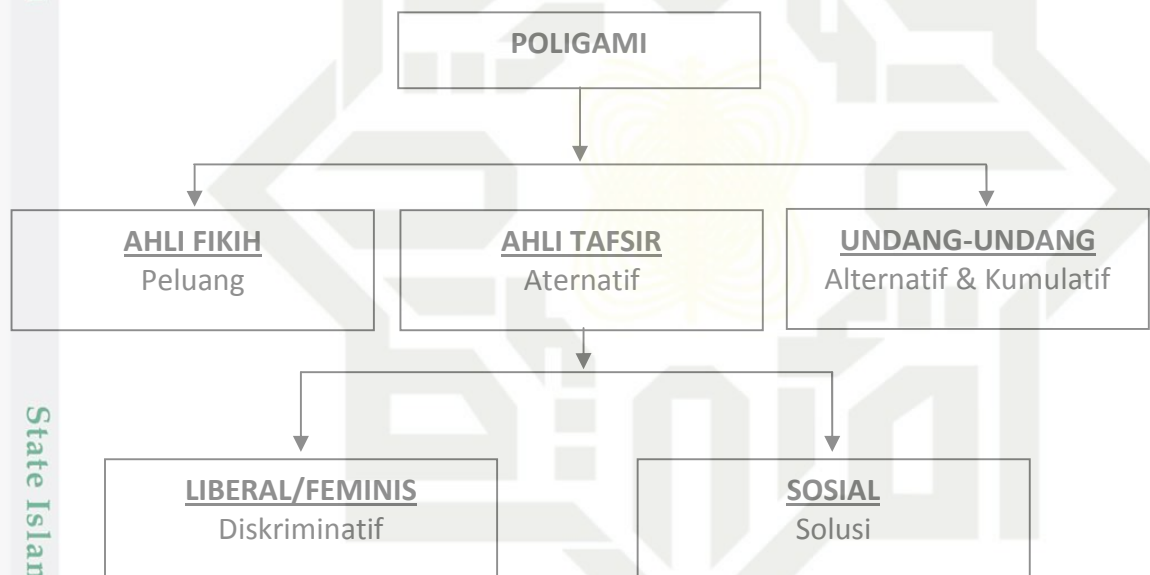
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tidak menunaikan kewajibannya, maka pihak lain (dalam hal ini adalah istri) dapat menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan. Hal itu secara jelas disebutkan di dalam pasal 34 ayat (3), sebagai berikut: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.³⁶⁷

Merangkum semua penjabaran di atas, dapat penulis kemukakan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel: 4
Poligami Dalam Berbagai Perspektif



Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa beragam corak pemikiran dan cara pandang para ahli tentang poligami. Para fuqaha/ahli fikih menjadikan poligami sebagai peluang bagi suami, dan peluang itu bisanya akan diperjuangkan untuk mendapatkan atau mewujudkannya. Berbeda halnya dengan para *mufassir*/ahli tafsir mereka memandang poligami itu sebagai alternatif, ketika poligami itu alternatif maka pemberlakuannya menjadi pilihan

³⁶⁷ UU, *op. cit.*, hlm 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terakhir, sepanjang ada jalan atau alternatif lain, poligami belum bisa dilaksanakan.

Dikaji dari segi undang-undang, poligami tidak hanya sebagai alternatif, namun juga bersifat kumulatif. Dalam pelaksanaannya, suami benar-benar sudah tidak ada pilihan lain selain berpoligami, namun sebelum hal itu dilakukan suami dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan yang berat dan ketat, seperti mendapatkan izin pengadilan dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Lain lagi halnya dengan kelompok sosiolog, bagi mereka poligami merupakan solusi dari berbagai persoalan. Misalkan di negara yang dilanda peperangan, jumlah janda meningkat tajam dan anak yatim membutuhkan kasih sayang seorang ayah, maka poligami adalah solusi untuk mengatasi problem tersebut. Demikian juga dalam mengatasi ketidakseimbangan jumlah antara laki-laki dengan perempuan, jika laki-laki tidak berpoligami maka akan bertambah banyak perawan tua, untuk mengatasi masalah tersebut poligami bisa menjadi solusinya. Di samping masalah tersebut, dalam kasus lain seorang laki-laki memiliki harta berlimpah, yang mampu menafkahi lebih dari satu orang istri, sementara perempuan lain banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka untuk mengurangi angka kemiskinan itu berpoligami dengan pria kaya adalah solusinya.

Berbeda dari semua pendapat di atas, kelompok liberal, kaum feminis dan pengiat jender dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu adalah bentuk nyata diskriminasi terhadap perempuan. Poligami merupakan cara melegitimasi penindasan atas harkat dan martabat perempuan, poligami adalah legalisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan hak-hak perempuan, dan poligami bagi mereka merendahkan derajat perempuan dibalik kedok doktrin agama. Berdasarkan pernyataan di atas, kaum liberal, feminis dan aktifis jender menentang poligami sepanjang zaman.

Demikianlah perspektif beberapa kalangan tentang poligami, mereka memandang persoalan dari sudut pengetahuan dan pemahaman masing-masing. Semua perspektif pemikiran di atas tidak bisa disalahkan dan akan terus ada sampai akhir masa. Hanya saja langkah yang perlu diambil adalah dengan menarik titik persamaannya untuk dijadikan pemikiran baru dalam mengatasi berbagai persoalan yang mengitari poligami. Sebagai seorang muslim, tentu akan lebih patuh dan taat kepada ajaran Islam, sementara ajaran Islam itu adalah solusi dari berbagai persoalan, demikian juga poligami yang jelas merupakan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi, tentu keberadaannya sebagai bagian dari syari'at memiliki hikmah dan manfaat.

C. Berlaku Adil Dalam Poligami

1. Pengertian Adil

Secara etimologi adil berarti tidak berat sebelah atau menetapkan sesuatu (hukum) dengan benar.³⁶⁸ Keadilan juga dapat dimaknai dengan tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan adalah tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya. yang adil, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya.

³⁶⁸ al-Mis}riy, Abi al-Fadhl Jamaluddin Muh}ammad ibn Mukarram Ibn Manzur al-Afriqiy, t. *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Sader, t.th.), Jilid XI, hlm. 430

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah.
- c. Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan.
- d. Berpihak atau berpegang kepada kebenaran.
- e. Tidak sewenang-wenang.³⁶⁹

Dengan kata lain, keadilan adalah menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar/ketentuan masing-masing haknya.³⁷⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adil” adalah merupakan sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak kepada salah satunya, atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban.³⁷¹ Maka dengan demikian, keadilan adalah merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kedudukan dan nilai yang sama sebagai manusia. Akan tetapi, perlu ditekankan juga bahwa pada masalah-masalah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, terkadang diperlukan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa yang disebut sebagai suatu keadilan.

2. Teori Keadilan Perspektif Barat

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean etics*. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,

³⁶⁹ Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press: 1991), hlm. 12

³⁷⁰ Sayid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika Islam*, (Jakarta, Intermedia: 1981), hlm. 91

³⁷¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 13.



“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁷² Hal penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Selanjutnya berangkat dari pemikiran John Rawls. John Rawls merupakan salah satu filsuf berpengaruh yang mendobrak kebuntuan filsafat politik di paruh kedua abad ke-20. Dalam teorinya, Rawls menjelaskan ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*. *Pertama*, ditekankan pentingnya posisi asali. Posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Di antara bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Rawls mengasumsikan bahwa pihakpihak dalam posisi asali tidak mengetahui konsepsi tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis.³⁷³

³⁷² Carl Joachim Friedrich, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

³⁷³ John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem aturan yang sesuai

dengan prinsip keadilan yang disepakati. John Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama, dengan kata lain keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.

Oleh karena itu maka eksistensi suatu masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Namun Rawls menambahkan, walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata secara baik (*Twell ordered Society*). Menurutnya, keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu, betapapun pentingnya keadilan formal, Rawls tidak ingin berhenti pada taraf ini. Ia menyeberangi formalisme ini dengan merumuskan sebuah teori keadilan yang lebih memberi tempat kepada kepentingan semua pihak yang terjangkau kebijakan publik tertentu. Untuk itu Rawls percaya bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair.³⁷⁴

Di sini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.³⁷⁵ Tomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justicia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan

³⁷⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, op. cit., hlm 65.

³⁷⁵ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.t), hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaifuddin Kahim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.³⁷⁶

3. Teori Keadilan Perspektif Islam

Kata 'Adil berasal dari Bahasa arab yang berbentuk masdar dari kata kerja (عدل - يعدل - عدلا)³⁷⁷ Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, berpegang pada kebenaran.³⁷⁸ Murtada Mutahhari dalam bukunya mengutip pendapat beberapa ulama mengenai makna adil yang antara lain; menurut al-Bayd{awiy kata adil berarti "berada di pertengahan dan mempersamakan". Hal senada pun dilontarkan oleh Rasyid Rid{a, Ia mengatakan keadilan yang diperintahkan di sini dikenal oleh ahli bahasa Arab dan bukan berarti menetapkan hukum (memutuskan perkara) berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama. Sedangkan al-Asfahani mengatakan kata adil mempunyai makna memberi bagian yang sama rata. Ada juga yang mengatakan adil adalah penempatan sesuatu pada tempat.³⁷⁹

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* dan Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam mengisyaratkan keharusan penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat martabat bagi mereka yang berbuat adil, kemudian melarang dan mencela bagi yang menentang tindakan keadilan. Keadilan juga merupakan kebajikan yang bisa menjadi kan pelakunya dekat dengan ketakwaan karena keadilan merupakan investasi dari ketakwaan. Hal tersebut dapat dijumpai dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -٨-

³⁷⁶ Ibid., hlm. 156

³⁷⁷ Muh}ammad Fu'ad Abd al-B qiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: D r al-Fikr, 1981), hlm. 448

³⁷⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8.

³⁷⁹ Murtad}a Mut}ahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981), hlm. 53.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Ma’idah (5): 8).³⁸⁰

Menurut Sayyid Qutub kehendak atau kepentingan setiap individu maupun masyarakat, atau berdasarkan kepentingan golongan yang satu dari golongan yang lain, atau bagi generasi yang satu atas generasi yang lain. Masing-masing mereka memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri berdasarkan keadilan dan persamaan. Islam melaksanakan terwujudnya keadilan sosial dengan tetap memelihara unsur-unsur dasar dalam fitrah manusia, tetapi tidak pula menutup mata terhadap kemampuan yang dimiliki setiap orang.³⁸¹

Selanjutnya Sayyid Qutub menambahkan, menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan adalah merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial. Jadi, Islam memandang bahwa keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.³⁸²

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan

³⁸⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm.108.

³⁸¹ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 33-35.

³⁸² *Ibid.*, hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٩٠ -

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”³⁸³

Berdasarkan dua ayat di atas, dapat dikatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan kebajikan dan keadilan serta kebajikan tersebut mencakup baik dalam urusan umum. Konsep keadilan dalam perspektif Alquran dapat dilihat pada penggunaan lafaz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya. Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran*, ia mengemukakan bahwa Lafaz adil dalam Alquran disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surat.³⁸⁴

Lafaz *al-'Adlu* adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, di antaranya, oleh al-Baidhawi menyatakan bahwa *al-'adl* bermakna *al-Inshaf wa al-Sawiyat*, artinya: berada di pertengahan dan mempersamakan,³⁸⁵ Rasyid Ridha, kemudian Sayyid Qutb menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.³⁸⁶

³⁸³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 138

³⁸⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran*, (Mesir: Darul Hadits, 1939), hlm. 550-551

³⁸⁵ Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961/1381, hlm. 325

³⁸⁶ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid V, Bairut: Daar al-Ihya' al-Turas al-,,Arabi, 1386/1967, hlm. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian secara etimologis *al-'adli* bermakna *al-Istiwa* (keadaan lurus) juga

bermakna: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana, dan moderat.³⁸⁷ bahkan kata *al-*

'adl juga bermakna *al-'Iwijaj* (keadaan menyimpang) atau kembali, dan berpaling.³⁸⁸

Selanjutnya terdapat lafaz lain yang semakna atau sinonim dengan kata *al-'adli* yakni:

al-Qistu dan *al-Mizan*.

Al-Qist mempunyai banyak arti, yakni: berlaku adil, pembagian, memisah-misahkan, membuat jarak yang sama antara satu dengan yang lain, hemat, neraca (ميزان),

angsuran, *muqsit* artinya orang yang adil.³⁸⁹ Lafaz *al-Qist* dalam Alquran disebutkan 25

kali³⁹⁰ dengan berbagai bentuk dan perubahannya yang diartikan dengan “yang adil”.

Keadilan yang tercakup pada lafaz ini meliputi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak

perorangan atau pembagian, sehingga penggunaan lafaz *al-Qist* pada ayat 3 surah *al-Nisa'*

adalah pemenuhan kebutuhan hak pemeliharaan anak perempuan yatim oleh walinya dan

para istri yang dinikahi.³⁹¹

Sedangkan lafaz *al-Mizan* dalam Alquran disebutkan 23 kali dengan

berbagai bentuknya. Lafaz *waznun* yang berarti timbangan atau menimbang,

juga bermakna seimbang, sama berat, sama jumlah, juga bermakna keseimbangan,

juga berarti adil atau keadilan.³⁹² Dengan demikian lafaz ini bermakna alat yang digunakan

untuk mengukur atau norma yang digunakan untuk menetapkan keadilan.

³⁸⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya; Pusaka Progresif, 1984, hlm. 971-972

³⁸⁸ *Ibid.*,

³⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 1201-1202

³⁹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran...* hlm. 653-654

³⁹¹ Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan Jilid XVIII*, (Theheran: Dar al-Kutub al-Isamiyat, 1397), hlm. 33

³⁹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran...* hlm. 840-841

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Keadilan Merupakan Perintah Allah

Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran berasal dari bahasa Arab, yakni: عدل yang bermakna: istiqamah, seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain.

Adil dapat pula diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya, oleh Ibrahim Mustafa menyebutkan dalam kitab mu'jamnya "mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi kewajibannya".³⁹³ Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata adil diartikan dengan 1). Tidak memihak atau tidak berat sebelah, 2). Berpihak kepada kebenaran, 3). Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Secara bahasa adil berarti *al-Qist* yang artinya keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Termasuk *al-Qist* banyak disebut dalam Alquran berarti keadilan baik sebagai perbuatan manusia yang diperintahkan Tuhan maupun sebagai perbuatan dan keputusan Tuhan. Dengan demikian Alquran baik secara implisit maupun eksplisit memerintahkan agar keadilan dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan diwilayah publik maupun domestik.³⁹⁴

Adapun salah satu makna adil adalah tengah atau pertengahan, yaitu makna etimologinya dalam bahasa arab. Dari segi konsep makna keadilan itu jauh lebih luas dan rumit dari makna kebahasaannya. Menurut Murtadha Mutahhari terdapat empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu Pertama, perimbangan atau keadaan seimbang (mauzun/balanced), tidak pincang. Jika suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu

³⁹³ Ibrahim Mustafa, et.all., *al-Mu'jam al-Wasieth*, Theheran: al-Maktabah al-Imiyah, 1934, hlm. 593

³⁹⁴ Sri Purwaningsih, *Kiai Dan Keadilan Jender*, Semarang: Walisongo Pres, 2009, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian yang lain dan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk yang pas dan sesuai dengan fungsi.

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan (*musawa, egalite*) dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Tapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan yang lain, maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan justru kezaliman.

Ketiga, pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak (*'Ita' kulli dzi haqq haqqah*). Maka kezaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan dari hak orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak.

Keempat, keadilan berarti keadilan Tuhan (*al-'adli al-Ilahiy*), berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan.



Menurut al-Isfahani, secara potensial keadilan menunjukkan perilaku moral pada diri manusia dimana dia berusaha mencapai persamaan, sedangkan secara aktual keadilan berarti bahwa persamaan tersebut tergantung pada kebenaran.³⁹⁵

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan.

Beberapa ulama "tafsir menjelaskan kata adil tersebut, di antaranya: al-Maraghi memaknai adil dengan "menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif".³⁹⁶ Oleh al-Raghib al-Asfahani, menyebutkan bahwa lafaz tersebut bermakna "memberi pembagian yang sama".³⁹⁷

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar.³⁹⁸ Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut di perolehnya, demi ki an sebaliknya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.

Alquran menggunakan beberapa lafaz yang bermakna adil yang dipakai dalam konteks kali mat yang berbeda, yakni: lafaz, قسط, عدل, dan ميزان yang bermakna perintah Allah kepada manusia untuk berlaku adil.³⁹⁹ Seperti firman Allah swt., pada surah al-A'raf ayat 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...

Artinya: "Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil..." (Q.S. al-A'raf: 29).⁴⁰⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

³⁹⁵ Ibid, hlm. 71-72

³⁹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, (t.t.: Daar al-Fikr, 1974/1394), hlm.

69

³⁹⁷ Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an...* hlm. 325

³⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 111

³⁹⁹ Ibid., hlm. 113

⁴⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan)*” (Q.S. *al-Nahl* : 90)⁴⁰¹

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ - ٧ - أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ - ٨ -

Artinya: “*Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia meletakkan neraca (keadilan) agar kamu tidak melampaui batas, tentang neraca itu*”. (Q.S. *al-Rahman* : 7-8)⁴⁰²

Kata adil dalam Alquran berulang 28 kali dengan bermacam-macam bentuk, tidak satupun yang dinisbatkan kepada Allah swt. menjadi sifat-Nya, dari semua kata adil tersebut, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu: 1). Adil dalam arti sama, 2) Adil dalam arti seimbang, 3). Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu, dan 4). Adil yang dinisbatkan kepada ilahi.⁴⁰³

Adil dalam arti sama dapat dilihat pada surah *al-Nisa'* ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “*...dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*” (Q.S. *al-Nisa'* : 58).⁴⁰⁴

Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi .

Abd. Muin Salim menyebutkan bahwa perintah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia secara kontekstual tidak hanya kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat melainkan kepada setiap orang yang memiliki

⁴⁰¹ *Ibid.*, hlm. 277

⁴⁰² *Ibid.*, hlm. 531

⁴⁰³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat...*

114-116

⁴⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan atau kewenangan mengurus atau memimpin orang lain, seperti suami terhadap istrinya dalam pemberian nafkah terutama jika istri lebih dari satu, orang tua terhadap anak-anaknya, terutama yang berhubungan dengan *hibah*.⁴⁰⁵

Adil dalam arti seimbang atau harmonis dapat dilihat pada surah *al-Infitar* ayat 6 dan 7:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - ٦ - الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ - ٧ -

Artinya: “Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhan-mu Yang Maha Pemurah?. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang”. (Q.S. *al-Infitar*: 7).⁴⁰⁶

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa sekiranya Allah swt. menjadikan salah satu di antara anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar, ukuran, posisi, atau syarat yang seharusnya, maka pasti terjadi ketidak seimbangan atau jauh keserasian. Seorang putri menjadi cantik karena adanya keseimbangan, keserasian, dan kesesuaian ciptaan Allah swt. pada dirinya, demikian juga seorang putra yang dinilai gagah perkasa dan sebagainya adalah karena ciptaan Allah swt. terjadi keseimbangan pada dirinya.

Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu, Allah swt. menetapkan hukum yang harus ditegakkan dalam kehidupan tidak lain adalah untuk memberi perlindungan kepada setiap orang atau individu yang harus dinikmati dalam kehidupannya setiap hari. Demikian pula janji-janji Allah swt dalam Alquran, Q.S. *al-Najm* ayat 38-40 :

أَلَا تَذَرُّ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى - ٣٨ - وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - ٣٩ - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى - ٤٠ -

Artinya: “Bahwa seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain, dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (Q.S. *al-Najm* : 38-40)⁴⁰⁷

⁴⁰⁵ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasaah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran...* hlm. 212

⁴⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 588

⁴⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 527

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu Allah menyatakan dalam firmanNya Q.S. *al-Najm* ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan apahala yang lebih baik (syurga)”. (Q.S. *al-Najm*: 31)⁴⁰⁸

Pernyataan tersebut adalah sebagai tanda keadilan Allah swt. kepada hamba-hambanya, Dia memberi janji akan memberi balasan atau imbalan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya, yang baik dibalas dengan kebaikan dan yang jahat dibalas sesuai dengan kejahatannya. Allah swt. mengutus Rasul-Nya agar menegakan keadilan dan memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat dan berlaku adil, firman Allah Q.S. *al-Nahl* ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) (Q.S. *al-Nahl* : 90)⁴⁰⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ٨ -

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. *al-Maidah*: 8)⁴¹⁰

Perintah berbuat adil dalam Alquran sangat tegas, yakni selain menggunakan kata-kata atau *ushlub amar* (أمر - يأمر) juga menggunakan *fi'il amar* (اعملوا) kedua *ushlub* tersebut menunjukkan perintah yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan.

Rasulullah saw. diutus oleh Allah swt. untuk menegakkan keadilan di antaranya agar :

⁴⁰⁸ Ibid.,

⁴⁰⁹ Ibid., hlm. 277

⁴¹⁰ Ibid., hlm. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manusia menegakkan kehidupan yang berkeadilan, disebutkan pada surah *al-Hadid* ayat 25 dan surah *al-Nahl* ayat 90.
- Kepemimpinan yang adil melahirkan tanggung jawab memberi perlawanan kepada kezaliman, disebutkan pada surah *al-Baqarah* ayat 124.
- Menjadi misi ke-Nabi-an atau ke-Rasul-an Nabi Muhammad saw keadilan menjadi syarat terwujudnya ketaqwaan, disebutkan pada surah *al-Maidah* ayat 8.

Dengan demikian keadilan menjadi sebuah hal yang sangat penting dimiliki dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya seorang suami yang dalam keluarga menjadi imam (pemimpin), sebab menjadi misi ke-Rasulan Nabi Muhammad saw yang merupakan tanggungjawab kepemimpinan yang harus ditegakan sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan ketaqwaan kepada Allah swt.⁴¹¹ Berikut penulis simpulkan makna adil dalam poligami menurut berbagai kalangan:

Tabel: 5
Makna Adil dalam Poligami

NO	NAMA TOKOH/UNSUR	PENDAPAT
1	Ibn Hazm	Adil secara lahir dan batin, adil dalam memberikan nafkah serta adil dalam cinta dan kasih sayang, (materi dan immateri, kualitatif dan kuantitatif).
2	Jumhur ulama fikih klasik (Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali)	Pertama adalah dalam konteks materi dan nafkah lahiriyah, dalam hal ini suami yang berpoligami dituntut untuk berlaku adil dan itu sesuatu yang bisa dan mungkin dilakukan. Sementara keadilan kedua adalah adil dalam bentuk nafkah batin, seperti cinta, kasih sayang dan perasaan, yang sudah dipastikan tidak seorang suaminya yang bisa melakukannya. Dari itu keadilan kedua ini bukanlah keadilan yang dituntut yang menjadi syarat boleh atau tidaknya berpoligami.

⁴¹¹ Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, Al-Risalah, Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010, hlm. 278



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Ulama Tafsir	Adil dalam hal materi, yaitu kesamaan, keseimbangan, kesamarataan dalam hal jumlah giliran menginap, nafkah hidup yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan rumah. Sementara keadilan secara maknawi atau urusan hati adalah kecenderungan dan cinta/kasih sayang bukan merupakan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.
4	Adil menurut Undang-undang	Adil dalam memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya
5	Adil menurut Sosiologi	Keadilan manusia dalam segenap bidang kehidupan yang tidak terbatas kepada 'material' dan ekonomi saja, melainkan meliputi nilai-nilai spiritual dan kerohanian, berdasarkan norma dan nilai operatif, yang sesuai dengan ajaran Islam.
6	Adil menurut Psikologi	Keadilan dalam berpoligami mengacu kepada tiga aspek yaitu: berdasarkan keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan interaksional. Berdasarkan hal itu keadilan dapat dilihat dari berbagai aspek, Pada aspek moral, keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat. Pada aspek operasional, di dalam masyarakat masalahnya menjadi sangat kompleks dan sulit, serta sering tidak mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada aspek individu, keadilan juga sulit diformulasikan. Makin sulit menemukan orang yang benar-benar memegang keadilan sebagai nilai kehidupan dan moralitas yang dijunjung tinggi. Psikologi mengkolaborasikan antara substansi keadilan yang dikehendaki al-Qur'an dengan teori psikologi. Maka dalam perspektif ini, keadilan hati tidak dapat dibahas karena hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia, akan tetapi keadilan fisik seperti dalam hal nafkah finansial dan giliran malam dan lainnya dapat dikaji melalui perspektif psikologi.

Berdasarkan data pada tabel di atas, tergambar dengan jelas berbagai prinsip keadilan dalam poligami yang dikemukakan oleh para ulama dan para ahli, namun secara garis besar prinsipnya tetap sama, yaitu suami dituntut untuk berlaku adil dalam setiap tindakan dan perbuatan terhadap istri-istrinya agar tidak terjadi penindasan atau pelanggaran atas hak-hak perempuan. Keadilan yang dimaksudkan di sini meliputi dua hal pokok, yakni adil dalam memberikan nafkah berupa makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, rumah atau tempat tinggal. Kemudian adil dalam hal batin atau hati dan perasaan, suami harus adil dalam berbagai cinta dan kasih sayang tanpa membendakan siapapun istrinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. pemikiran Ibn Hazm tentang adil dalam poligami sangat jelas dan tegas. Menurutnya hukum berlaku adil terhadap istri yang dipoligami adalah wajib. Suami yang tidak dapat berlaku adil harus menceraikan istrinya, sebab tidak ada alasan apapun dan tidak ada faktor darurat untuk melegalkan suami berlaku tidak adil terhadap para istrinya. Adil yang dimaksud oleh Ibn Hazm adalah adil secara mutlak, yaitu adil lahir dan batin, materi dan immateri, atau adil secara kuantitatif dan kualitatif tanpa adanya perbedaan dan pengunggulan antara satu istri dengan istri yang lain terutama dalam hal nafkah lahir serta dalam hal hati, perasaan, cinta dan kasih sayang. Penulis mendapati bahwa Ibn Hazm menempatkan istri dalam pernikahan sebagai subjek, dan mengharamkan apabila istri dijadikan sebagai objek.

Ibn Hazm cenderung keras dalam membantah pendapat yang tidak sejalan dengannya, ia tidak sungkan mengatakan pendapat orang lain itu sesat, jahil, batil, dan bahkan pendapat yang berasal dari setan. Ibn Hazm juga mendobrak kejumudan dengan berpendapat bahwa *taqlid* adalah haram, dan mengajak para ulama untuk menolak *taqlid*. Untuk menjawab masalah-masalah kontemporer Ibn Hazm menggunakan metode *istinbat istidlal* dengan *al-dalil*.

pemikiran Ibn Hazm tentang syarat adil dalam poligami sangat relevan dengan peraturan dan perundang-undangan di mayoritas negara-negara muslim. Ciri khas pemikiran hukum keluarga Ibn Hazm adalah tekstualis yang bersifat dialektis-hermeneutis (hubungan timbal-balik dan bolak-balik), bukan hubungannya yang bersifat dikotomis-eksklusif antara sisi normativitas *nash*. Ibn Hazm adalah seorang ulama besar yang corak pemikirannya didasarkan pada makna tekstual *nas* dan bukan pada sisi kontekstualnya. Hal ini disebabkan selain dari pemahaman normatifnya terhadap al-Qur'an juga karena diwarnai bahkan dibentuk oleh kondisi sosial dan kultur Andalusia yang mengitarinya.

Ketentuan poligami di negara-negara tersebut memperlihatkan sebuah upaya jalan tengah antara mempertahankan poligami di satu sisi dan melindungi hak-hak perempuan di sisi yang lain dengan cara memperketat persyaratan dalam pembolehan poligami. Adapun negara yang melarang keras poligami dalam hukum keluarganya terkait relasi jender termasuk yang memberikan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk relasi yang tidak membatasi hak-hak perempuan, karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hukum keluarga.

B SARAN

1. Terkait dengan pemikiran Ibn Hazm tentang syarat adil dalam poligami, perlu kiranya ditela'ah lebih dalam oleh para ahli hukum Islam dan hakim dalam menetapkan perkara. Para ulama, hakim dan penegak hukum meski mengkaji lebih dalam pemikiran Ibn Hazm terkait isu poligami dalam konteks perkembangan era mutakhir. Sebab pemikiran Ibn Hazm dinilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimilai cocok untuk era modern karena lebih berhati-hati dalam membolehkan suami untuk berpoligami.

2. Terhadap hukum keluarga Islam senantiasa mesti dimodernisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan diberi ruang untuk lahirnya aturan hukum baru berdasarkan kearifan lokal, misalnya di Provinsi Aceh yang telah merumuskan aturan tersendiri dalam poligami. Demikian juga terhadap hal baru yang muncul dalam persoalan siapa yang berhak memberikan keputusan tentang adil atau tidaknya seorang suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ‘Abid al-Jabiri, *Binyah al-Aql al-‘Arabi*, Libanon: Markaz Dirasah al-Wandah al-Arabiyyah, 2009, cet- ke-2
- ‘Abd al-H}alim Uwais, *Ibn Hazm wa Juhuduhu fi al-Bahts al-Tarikhi wa al-Hadari*, Kairo: Dar al-I’tisham, tth.
- _____, *Ibn H}azm al-Andalusi*, Cairo: al-Zahra li al-I’lam al-‘‘Arabi, 1988
- ‘Abd al-Nas}ir Taufiq al-Atar, *Ta’addud al-Zaujat min al-Nawahly; Diniyah wa alljima’iyah wa al-Qanuniyah*, Kairo: tp, 1972
- ‘Abd al-Rahman bin ‘Ali bin Muhammad al-Jawziy Ibn al-Jawziy, *Zad al-Masir*, Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1404 H, Juz 2
- ‘Abd al-Wahab al-Khallaf, *Masadir al-Tasyri’ fi ma la Nassha fih*, Kuweit: Dar al-Qalam, tth.
- ‘Abdul Aziz, *‘Adillat al-Tasyri’ al-Mukhtalaf fi al-lhtijaj biha*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1979
- ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Ibn Qudamah, *al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybaniy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 1-, Juz I
- ‘Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Bairut: al-Maktab al-Islamiy, 1988, Juz 3
- ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969
- ‘Abdurrahman al-Jaziri, *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga*, Surabaya: Pustaka Media, 1997
- ‘Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tashri’ wa Falfasatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- ‘Ali Al-Sabuni, *Kekeliruan Pandangan Terhadap Poligami Rasulullah saw*, Terj. Zainuddin, Bandung: Tragenda Karya, 1993
- ‘Ali bin ‘Umar Abu al-Hasan al-Daruqutniy, *Sunan al- Daruqutniy*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966, Juz 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Bairut: Dar al-Afaq alJadidah, t.th., Juz. 9
- ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Jurjaniy disebut: al-Jurjaniy, *al-Ta’rifat*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1405 H
- ‘Ala’ bin Khalil, *Taysir Wusul ila al-Usul*, Beirut: Dar al-Ummah. 2000
- A. Hafi Ansori, et.al., *Ensiklopedi Islam, Jilid II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998
- A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970
- A. R. Gibb & J. Krammer ed, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, London: Luzac & CO, 1961, Juz III
- A. Rahman I. Doi, *Syari’ah Te Islamic Law, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syari’ah*. Terj. Zainuddin dan Ruysdi Sulaiman, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Haqa’iq wa Abatilu Khusumih*, Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, t.th.
- Abd al-Nasir Taufiq al-Attar, *Ta’addud al-Zawjat Diniyah wa al-Ijtima’iyah wa al-Qanuniyah*, Kairo: tp, 1972
- Abd. Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, , 1995
- Abdul Aziz Dahlan. et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid 6, 1978
- Abdul Hakim Uwais, *Analisa Runtuhnya Daulah-daulah Islam*, Terj. Yudian Wahyudi, Solo: Pustaka Mantiq, 1990
- Abdul Nasir Taufiq al-‘Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu USul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994, cet.1
- Abdullah Ahmad al-Na’im, ed. *Islamic Family Lawin a Changing World: A Global Resource Book* New York: Zed Book Ltd., 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah dan Teguh, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I,
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afk r al-Dauliyah, t.th.
- Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud, Al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Jilid.I
- Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud, Al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Jilid. I
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Tabar . *Jami' al-Bayan al-Ta'wil al-Qur'an, Tahqiq Muhammad Shakir*, al-Q hiraah: Maktabah ibn Taymiyah, t.th.
- Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961
- Abu al-Hasan 'Ali bin Abi Bakr, *al-Lubab fi Tahzib al-Ansab*, Beirut: Maktabat al-Quds, tth., Jilid II
- Abu al-Qasim 'Abdurrahman bin Ishaq al-Zujajiy disebut al-Zujajiy, *Kitab Huruf al-Ma'aniy*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984
- Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'as bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abu Daud, Tahqiq Muhammad Mahyuddin 'Abdul Hamid*, Juz II, hadis nomor 2142, Beirut: al-Maktabah al-'Isriyyah, t.th.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan ` al-Ta`wil Ayi al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, Juz II
- Abu Muhammad al-Maqdisi, 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Hanbali, *al-Mughn* . Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1997
- Achmad Fedyani Saifuddin, *Poligini dalam Perspektif Sosial Budaya; Suatu Catatan Teoritis*, Makalah Dipresentasikan pada Seminar tentang *Poligami dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Budaya*, yang diadakan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 29 Agustus 2007
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Ahmad ‘‘Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Haraniy, *Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh* t.tp.: Maktabah ibn Taymiyyah, t.th.
2. Ahmad al-Kataniy, *al-ijihad wa al-Mujtahidun fi al-Maghrib wa al-Andalus*, t.tp, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
3. Ahmad Al-Maqari al-Tilmasaniy, *Nafhu al-Tiyyb min GuSni al-Andalasiy al-Ratib*, t.t, Dar Sadir, 1388 171/1968 M, vo1.2
4. Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy al-Bayhaqiy, *Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, Juz 7
5. Ahmad bin Hanbal Abu ‘Abdillah al-Syaybaniy disebut Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Mu’assasah al-Qurthuhah, t.th., Juz 2
6. Ahmad Tompson dan ‘Ataur Rahim, *Islam Andalusia: Sejarah Kebangkitan dari Keruntuhan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004
7. Ahmad al-Hufy, *Limadza 'Addada An-Nabiyyu Zawjatihi?*, Terj. Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, *Mengapa Rasulullah Berpoligami*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
8. Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V, t.t.: Daar al-Fikr, 1974/1394
9. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
10. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya; Pusaka Progresif, 1984
11. As al-Din Muhammad bin ‘Aliy al-Husniy Ibn ‘Aliy al-Husniy, *Durr Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Absar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H, Juz 2
12. Asqalani, *Lisan al-Mizan*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, jilid 4
13. Attar menyebutkan secara umum ada empat ekses Dari poligami, yaitu, cemburunya wanita, laki-laki tidak bijaksana, anak-anak berkelahai dan kesulitan ekonomi.
14. Bukhary, *Shahih al-Bukhary, Maktabah Syamilah*, Juz. VII, 31 No. Hadis 1839 Surabaya: Pustaka Progresif, 1984
15. Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Sulis, Jakarta: Pustaka Amasegini, 2002

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Katani, *al-ijihad wa al-Mujtahidun fi al-Maghrib wa al-Andalus*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996,
2. Muhammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982
3. Maqarri, *Naf al-Tib fi al-Andalus wa Zikr Wazirih*, di-Tahqiq oleh Ihsan 'Abbas Beirut: al-Rifa'i, 1968 M /1388H, Jilid 2, Jilid VI
4. Misriy Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur al-Afriqiy, t.t., *Lisan al- 'Arab*, Beirut: Dar Sader, t.th., Jilid XI
5. Arullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
6. Nawawi, *Raudhah al-Thalibin, al-Maktabah al-Islamy, Juz VII*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
7. Al-Shafdi, al-Wafi bi al-Watayaf, Beirut: Dar al-Fikr, tth., jilid III.
8. Al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyyat al-Kubra*, Kairo: Matba'at 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakauhu, 1964, Jilid II
9. Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
10. Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
11. Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, tt. vol 3,
12. Zahabi, *Siyar 'Alam al-Nubala*, Libanon: Bairut: al-Afkar al-Dauliyyah, 2004, Jilid 18
13. _____, *Tadzkirat al-Huffazh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M, Vo1.3
14. _____, *Tazkirat al-Huffaz*, Heiderabad: Matba'at Majlis Dairat al-Ma'arif al-'Utsmaniyyat, 1376, jilid III
15. _____, *Mizan al-I'tidal*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, tth.,
16. Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, Al-Risalah, Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Aminah Wadud, *Alquran Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali Jakarta: Serambi, 2006
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, cet, Ke-1
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amri Siregar, *Ibn Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumher Hukum Islam*, Jogjakarta: Belukar, 2009
- Anwar Khalid, *al- Zahiriyyah Ibn Hazm Nazhariyyah al-Mari'fah wa Manahiju al-Bahs/*, Aman: Wizarat al-S|aqafah, 1995
- Ariati Jamil dan Amany Lubis, *Seks dan Gender, dalam Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: PSW UIN, 2003
- Arif Khalil Muhammad, Abu 'Ubaid, *al-Imam Dawud al-Zahiri wa Asaruhu fi al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Dar al-Arqam, 1984
- Atabik 'Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlol, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam – Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2006
- Chen, Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta: LPUI, 2001
- Ch Joachim Friedrich, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Chadijah Nasution, dalam: *Poligami Tinjauan Historis Sosiologis*, di-download Dari <http://mukhahaans.blogspot.com/2008/06/poligami-tinjauan-historis-sosiologis.html>. Hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018
- D Amarudin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, Jakarta: Yayasan Adil, 2007
- Daji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991/1992
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Gema Risalah, 1993
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994
- Elizabeth H. White, "Legal Reforms as an Indication of Women's Status In Muslim Nations", dalam Lois Beck dan Nikkie Kiddie ed., *Women In the Muslim World* ESA: Havard University Press, 1978
- Encyclopaedia Britannica, *Ibn Hazm Encyclopxdia Britannica*. 2006. Encyclopaedia Britannica Online; R. Arnaldez, Ibn Hazm. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online, 2013
- Fadhur Rohmah, "Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat", Semarang: IAIN Walisongo, 2006
- FR Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugat wa al-'Ilam*, Beirut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 198
- Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991
- G. Zihher, *The Zahiris: Their Doctrine and Their History*, Leiden: EJ Brill , 1971, 109-110. Lihat: pula Philip K Hitti, *History of the Arabs*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, ed. 6
- H. A. R. Gibb & J. H. Kramer, et al., ed, *"Ibn Hazm", Sorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: E. J. Brill, 1951, Jilid 3
- H. M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, editor, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan Hukum Modern dari Kitab-kitab Fikih* Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999, Jilid 2
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994
- <http://ighanie-np-blogspot.com>, *Biografi dan Pemikiran Ibn Hazm dan Gagasan Usul Fiqh dalam Kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, diakses pada tanggal 05-12-2018
- <http://www.tastAbigu.com/2015/05/biogafi-ibn-Hazm>, diunduh 5 Desember 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/fbnu_Hazni; Joseph A. Kechichian, *A mind of his own*, Gulf News: 21:30 December 20, 2012 diunduh pada hari Jum'at 08 Desember 2018
- <https://islamqa.info/ar/161540> diunduh pada hari Jum'at, 08 Desember 2018
- <https://1dfeui.or.id/content/task-view/id-50/itemid-28>. Hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018
- Ibnu al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, XII, Beirut: Dar Shadir, 1965
- Ibnu al-Mulaqqan, *al-Ta'uzhih li Syarh Jami' al-Shahih*, Wazaratul Auqaf wal-Syunyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV
- Ibnu Hazm, *al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, Mesir: Dar al-Hadis, 1987, Jilid II
- _____, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Hadits, 1984, Jilid VII
- _____, *al-Muhalla fi Sharh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Athar*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, *Manahij al-'Adillat fi al-Ijtihad fi al-Ra'y fi al-Tasyri' al-Islami*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975
- _____, *Mulakhkhas Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'yi wa al-Istihsan, wa al-Taqlid wa al-Ta'lil, di-tahqiq* oleh Sai'd al-Afghaniy, Damaskus: Jami'at Damaskus, 1960 M/1329 H
- _____, *Risalat Naqt al-'Arus fi Tawarikh al-Khuiafa'*, Beirut: Muassasat al-'Arabiyyat, 1987
- _____, *Tauq al-Hamamat fi al-Ulfati wa al-Allaf*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1977
- _____, *Tafsir Alfazh Tajri Baina al-Mutakallimin fi al-Usul*, Beirut al- Muassasat al-'Arabiyyat, 1983
- Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri, Maktabah Salafiyah Juz IX*, Mesir: Maktabah Syamilah, 2000
- Ibn Hajar, *Lisan al-Mizan*, Beirut: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyyah, 2002, Jilid 4
- Ibn Humam, *op. cit.*, Juz 3, 239. Bandingkan dengan: Muhammad Khathib al-Syarbayniy, *al-Iqna' li al-Syarbayny*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H, Juz 2
- Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*, ditahqiq oleh Ihsan 'Abbas, Beirut: Dar Sadir, 1972, Jilid 3
- Ibn Muflih, *al-ItlaqSad al-Arsyad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, juz 2
- Ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid III, Terj. MA. Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah*, Semarang: al-Syifa', 1990
- Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1998
- Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhuyan Ibn Dhuyan, *Manar al-Sabil* Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1405 H, Juz 2
- Ibrahim Mustafa, *et.all.*, *al-Mu'jam al-Wasieth*, Theheran: al-Maktabah al-Imiyah, 1934
- Ighaz Goldziher, *The Zahiri's Their Doctrine and Their History*, Leiden: E.J. Brill, 1971
- Ihsan 'Abbas, *Tarikh al-'Adab al-Andalusi*, Beirut: Dar al-S|aqafah, t.th., Cet. Ke-1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Syaukani, *Rekontruksi Epistemology Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Terj. Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993
- Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, Mesir: Dar al-Fikr, 1989
- J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto ed, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. Ke-4
- Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, terj. Mustofa 'Aini Jakarta: Dar al-Haq, 2015, Cet. XIV
- Jalaluddin al-Suyuti, *Tabaqat al-Huffadz*, Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H, cet, ke-1
- Jan Michel Otto (ed), *Syaria Incorporated: A Comparative Overviw of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Amsterdam: Leiden University Press, 2010
- JND. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husein, *Hukum Islam di Dunia Modern* Surabaya: Amapres, 1991
- John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* New York: Syracrus University Press, 1982
- John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Kham Hilmi Farhat, *Ta'addud al-Zawjat Bayn al-Adyan*, Terj. Abdurrahman Nuryaman dengan judul *Poligami dalam Pandangan Islam, Yahudi dan Nasrani*, Jakarta: Darul Haq, 2007
- Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, dalam UNISIA, Vol. XXX No. 66 Desember 2007
- _____, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* Jakarta: INIS, 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

- Kompilasi Hukum Islam, Buku I *Hukum Perkawinan*, Surabaya: Arikola, 2003
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Rosdakarya, 2006
- M. 'Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006
- M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr. 1975
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995
- _____, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, vol 2,
- _____, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998
- Mahmud 'Ali Himayah, *Ibn Hazm: Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, terj: Halid al-Kaf Jakarta: Lentera, 2001
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968
- _____, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- Mamud bin 'Umar bin Muhammad al-Zamakhsari, *Tafsir al-Kashshaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, Vol. I
- Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahutiy al-Bahutiy, *Kasysyaf al-Qina'* Bairut: Dar al-Fikr, 1402 H, Juz 5
- Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Moh. Bahrudin, *Maz/ hab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibn Hazm* Jurnal: al-'Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011
- Mohammad Yasir Alimi, dkk., *Advokasi Hak-hak Perempuan : Membela Hak, Mewujudkan Perubahan Cet.I*; Yogyakarta: LKiS, 1999
- Mohd Nazir, PD., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muh. Rusli, *Kesetaraan Gender Perspektif Pemikiran Islam*”, Yin Yang 6, no. 1, Januari – Juni 2011
- Muhammad ‘Abd al-Ra’uf al-Munawiy, *al-Tawqif ‘Ala Muhimmat al-Ta’arif*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H
- Muhammad ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Rahim al-Mubar Kafuriy Abu al ‘Ala, *Tuhfah al-Ahwaz/iy Bi Syarh Jami’ al-Turmudziy*, Beirut: Dar al-Kutub t.th., Juz. 4
- Muhammad ‘Abd al-Ra’uf al-Munawiy, *al-Tawqif ‘Ala Muhimmat al-Ta’arif*, Bairut: Dar al-Fikr’, 1410 H
- Muhammad ‘Abduh, *Tafsir al-Manar*. Misr: Dar al-Manar, 1367 H
- Muhammad ‘Abdullah Abu Su’ailaik, *al-Imam Ibn Hazm al-Zahiriyy: Imam Ahli al-Andalusi*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1995
- Muhammad ‘Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Matba’ah Muhammad ‘Ali Sabih, 1953, Juz II
- Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Minal-Qur’an*, Mekah: Dar al-Salam, 1997
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm, Hayatuhu wa ‘Ashruhu, Arauhu wa Fiquhu*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1954
- _____, *Muhadharat fi Tarikh al-Maz/ahib, al-Fiqhiyyat*, Kairo: al-Matba’at al-Madani, t.th.
- _____, *Tarikh Maz/hib al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr al-'Arabiyy
- _____, *Ibn Taimiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Muhammad al-Alusiy, *Ruh al-Ma’ainiy fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’ al-Masaniy*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-‘Arabiyy, t.th., Juz 4
- Muhammad al-Humaidi, *Jadzwat al-Muqtabis fi Tarikh ‘Ulama al-Andalus*, Tunisia Dar al-Gharb al-Islami, 2008, Jilid. 2
- Muhammad al-Muntasir al-Kittani, *Mu’jam Fiqh al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Jiil, 1996, jilid:12
- Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar Hasyiyah Ibn Abidin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H, Juz 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Anshori, “*Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Hak Hadh nah Bagi Ibu Yang Menikah Lagi*”, Semarang: IAIN Walisongo, 2006
- Muhammad Atho’ Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998
- _____, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Ciputat Press, Jakarta, 2003
- Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Maghribiy Abu ‘Abdillah, *Mawahib al-Jalil*, Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H, Juz 4
- Muhammad bin ‘Abd al-Wahid al-Siwasiy Ibn Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz 3
- Muhammad bin ‘Abdillah Abu ‘Abdillah al-Hakim al-Naysaburiy disebut Hakim, *al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990
- Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, *Nay al-Awtar min Ahadis Sayd al-Akhbar Syarh Muntaga al-Akhbar*, t.tp: Idarah al-Taba’ah al-Minbarah, t.th., Juz 6
- _____, *Fathu al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz.1
- Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa al-Turmuziy disebut: al-Turmuziy, *Sunan al-Turmudziy*, Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turas al-‘Arabiyy, t.th., Juz 3
- Muhammad bin Abi Bakar Ayyub al-Zar’iy Abu ‘Abdillah Ibn al-Qayyim, *Hasyiyah Ibn al-Qayyim*, Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995, Juz 6
- Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsiy, *al-Mabsuth*, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1406 H, Juz 5
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Qutubiy, *al-Ahkam al-Qur’an*, Kairo: Dar al-Syu’ub, 1372 H, Juz 5
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th., Juz 2
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimiy disebut. Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993
- Muhammad bin Idris Abu ‘Abdillah al-Syafi’i, *Musnad al-Syafi’i* Beirut Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th., Juz 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- _____, *Ahkam al-Qur'an li al-Syafi'i*, Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H, Juz. 1
- _____, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H, Juz. 5
- _____, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Tabariy, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil 'ay al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H, Juz 4
- Muhammad bin Musfir al-Tawil, *Ta'adud al-Zawjat fi al-Islam*, Iskandariyah: Dar al-Iman, t.th.
- Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwayni disebut Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz 1
- Muhammad Farid Wajdi, *Dairat al-Ma'arif al-Qran al-Rabi'a 'Asyar al-Isyirin*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1971
- Muhammad Fu'ad Abd al-B qiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Muhammad Jawad Mughniayah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamzah*, diterjemahkan oleh: Idrus al-Faff dkk. dengan Judul "*Fiqh Lima Mazhab*" Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, Jakarta: Lentera, 1996
- Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Mannar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., vol. 4
- Muhammad Shahr r., *al-Kit b wa al-Qur' n: Qira'ah Mu'asirah*. Dimasq: al-'Ah li li al-Tib 'ah wa al-Tawz ', 1990
- Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga Mesir dan Pakistan, " dalam Johanes den Heijer dan Syamsul Anwar ed. , *Islam, Negara, dan Hukum* Jakarta: INIS, 1993
- Muhammad Syams al-Haqq al-'Azhim Abadiy Abu al-Thayyib al-'Azhim Abadiy, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H, Juz 6
- Muhammad 'Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 2000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran*, Mesir: Darul Hadits, 1939
- Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan Jilid XVIII*, Theheran: Dar al-Kutub al-Islamiyat, 1397
- Muhhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Muhammad, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, N. M Tripathi PVT. LTD., Bombay, 1972
- _____, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)* Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987.
- Murtada Mutahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981
- _____, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: PT, Lentera Baseitama, 2000
- Mustafa al-Khinn, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqahaq*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985
- Mustaf ibn al-'Adawi, *al-Tash l li Ta'w l al-Tanz l*, al-Mans rah: D r al-Khulaf ', 2001
- Mustafa Adib al-Bugha al-'Adillat al-Mukhtalaf fiha, Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, t.th.
- Mustafa al-Siba'iy, *Al-Mar'ah Bayn al-Fiqh wa Al-Qanun*, Bairut: Dar al-Warraq, 1999, 60. Lihat juga 'Abdullah Nasih' 'Ulwan, *Ta'addud al-Zawjat fi Al-Islam wa Hikmatu Ta'adud Zawjat al-Nabiy ttp*, Dar al-Salam, tt.
- Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Musfir Al-Zahrani, *Nazharat fi Ta'addud Al-Zawjat*, Riyadh: Maktabah al-Taubah, t.th.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayriy al-Naysaburiy Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya' al-Turas al-'Arabiyy, t.th., Juz. 4
- Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim. di-tahtliq oleh Abu Qutaybah*, t.t.: Dar Taibah, 2006, cet-I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mustafa al-Harusi, *al-Madrasah al-Malikiyyah al-Andalusiyyah ila Nihayat al-Qarni al-Salis al-Hijriy Nasyatan wa Khasaisa*, al-Mamlakat al-Maghribiyyah: Wizarat al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 1418 X11-1997 M
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Paramadina, 2001
- Nate Olsen, "Marriage and Divorce in Islamic and Mormon Polygamy: A Legal Comparison", *Intermountain West Journal of Relegius Studies*, Volume 1, Number 1 2009.
- Nizaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran* Jakarta: Paramadina, 2001
- Siwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Nindita Qomaria Hapsari, "Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Meminang Wanita Yang Sedang dalam Pinangan Orang Lain", Semarang: IAIN Walisongo, 2006
- Ninik Lailiyah, "Study pemikiran Ali Asghar Engineer tentang poligami relevansinya dengan kesetaraan gender", Semarang: IAIIN Walisongo, 2004
- Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996
- Nurouzzaman Shiddiqi, *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet. Ke-1
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. Walid Khalidi, London, Mac Millan Press Ltd., 1974
- Pras A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qasim bin 'Abdillah bin Amir 'Ali al-Qawnuniy al-Qawnuniy, *Anis al-Fuqaha'*, Jedah: Dar al-Wafa', 1406 H
- Rahman Alwi, *Fiqh Maz/hab al-Zahiri*, Jakarta: Referensi, 2012, cet. Ke-1
- Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* Cet. 1; Bandung: Mizan, 1999
- S. Ali Yasir, *Di B'Alig Poligami Rasulullah saw.*, Surabaya: PT, Bina Ilmu, 1982
- Sadiq Ibn Hasan al-Qanuji, *Abjad al-'Ulum*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978, Juz 3
- Salaman Nasir Wizarat al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41 Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyah, 2002
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press: 1991
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Sayid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika Islam*, Jakarta, Intermasa: 1981
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid V, Bairut: Daar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1386/1967
- _____, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* Yogyakarta: Kibar Press, 2007
- _____, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999
- _____, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- _____, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta : LKAJ-SP, 1999
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki*. Pengantar dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ruhaini Dzuhayatin, *Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 2000

Soerjono Soekanto & Sri Pamuji, *Pengantar Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985

Supurwaningsih, *Kiai Dan Keadilan Gender*, Semarang: Walisongo Pres, 2009

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1 Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1992

Sulayman bin al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th., Juz 2

Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Prees, 2001

Syaifullah, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung, Fokus Media, 1993

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Ilham Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka Kausar, 2006, Cet. Ke-1

Syekh Ibn Hajar al-Haytamiy, *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj* Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M

Syekh Sulaiman al-Bujayramiy, *Ujayramiy 'Ala al-Khothib*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993

Syekh Nawawi al-Bantaniy, *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.

Syihabuddin al-Qolyubiy dan Syihabuddin 'Umayroh, *Hasyiyatani Qolyubiy 'Umayroh*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, Jilid I.Cet.I

_____, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tahir Ahmad Makki, *Dirasat 'an Ibn Hazm wa Kitabuhu Tauq alHamamat*, Kairo: Maktabat Wahbat 1976
- Tagy al-D n al-Hishn , *Kif yah al-Akhy r, Juz II*, D r al-Kutub al-Isl miya , 2004
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka Depdikbud, 2005
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Undang-tindang Perkawinan Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, selanjutnya disebut UU, Jakarta: Cemerlang, t.th.
- UU Perkawinan No 1 tahun 1974, Surabaya: Arikola, 2003
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Wahbab al-Zuhaili, *Ta'addud al-Zauj t, al-Mabda' wa al-Nadhariyyah wa al-Ta biq* , Damaskus: D r al-Maktabi, 2000
- _____, *Usfil al-Fiqh al-Islamy*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005
- _____, *Usul Fiqh al-Islami*, jilid I, Beirut Dar al-Fikr, 1986
- _____, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: D r al Fikr, 2005, Juz II
- _____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002
- Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progresif, 2002
- Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy al-Nawawiy, *Tahrir Al-faz al-Tanbih*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1408 H
- Yusuf bin 'Abdillah al-Humawiy Abu 'Abudillah, *Mu'jam al-Buldan* Bairut: Dar al-Fikr, t.th., Juz 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Yayah Abdullah al-Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Alih Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005
- Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2012
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Alih bahasa Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1999
- Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Ansariy Abu Yahya disebut: al-Ansariy, *Fath al-Wahhab*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H, Juz 2
- Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansariy Abu Yahya, *al-Hudud al-Aniqah*, t.tp. Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1411 H, Juz 1
- Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar disebut Ibn Bakar, *al-Bahr al-Ra'iq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th., Juz 4
- Zulaecha Nursalasa, "Keharaman Poligami di Masa Sekarang *Study Analisis Pemikiran Musdah Mulia*", Semarang: IAIN Walisongo, 2009



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Sobri
2. Tempat / Tgl Lahir : Saniang Baka, 03 Mei 1975
3. NIM : 31695104850
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Dosen
6. Sumber Biaya Pendidikan : Beasiswa Kementerian Agama
7. Program Studi : Hukum Islam
8. Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
9. No Telp / HP : 08126752398
10. Email / FB : msobrihabib@yahoo.co.id / Muhammad Sobri
11. Alamat
 - a. Jalan : Raya Kp. Kalawi RT/RW 001/005 No. 31
 - b. Gang : -
 - c. Kelurahan / Desa : Lubuk Lintah
 - d. Kecamatan : Kuranji
 - e. Kabupaten / Kota : Padang

DATA PENDIDIKAN

12. Sekolah Dasar : SD Kecamatan X Koto Di Bawah Kabupaten Solok
13. LTP : MTsN Batu Tebal Tanah Datar
14. LTA : MAN X Koto Singkarak
15. MTs – Aliyah : Pondok Pesantren Syaikh M. Jamil Jaho
16. Tarata Satu (S1)
 - Perguruan Tinggi : IAIN Imam Bonjol Padang
 - Fakultas : Syari'ah
 - Jurusan : Perbandingan Hukum dan Mazhab
 - IPK : 3.67
 - Alamat Perguruan Tinggi : Jl. M. Yunus No 17 Lb. Lintah Kuranji Padang
17. Tarata Dua (S2)
 - Perguruan Tinggi : IAIN Imam Bonjol Padang
 - Program Studi : Hukum Islam
 - Konsentrasi : Syari'ah
 - IPK : 3,45
 - Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Jend. Sudirman No 15 Padang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARYA TULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DATA ORANG TUA

18. Nama Ayah
19. Nama Ibu

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

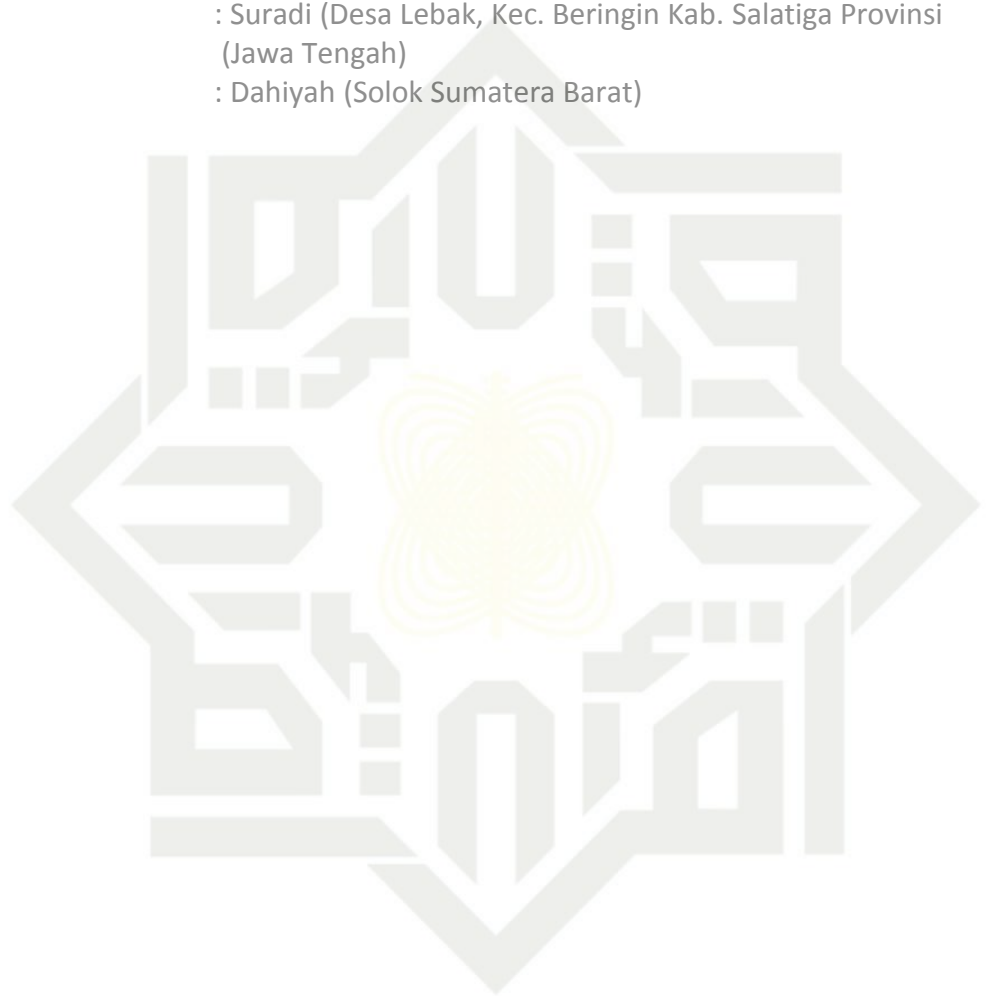
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Fisabilillah Sebagai Mustahik Zakat (Komparasi Pemikiran Ulama Syafi'iyah dan Yusuf Qaradhawi, (Penerbit Hayfa Press, 2015) ISBN: 978-602-8372-51-0)

: Pemikiran Sosiologi Hukum Islam Muhammad Atho' Mudzhar, (Penerbit Hayfa Press, 2012 ISBN: 978-602-8374-90-3)

: Suradi (Desa Lebak, Kec. Beringin Kab. Salatiga Provinsi Jawa Tengah)

: Dahiyah (Solok Sumatera Barat)



UIN SUSKA RIAU